

Seri Jalur Rempah untuk Penguatan Pendidikan Karakter



REMPAH, KOLONIALISME, DAN KESINAMBUNGAN EKONOMI

DI PANTAI TIMUR PULAU SULAWESI

La Ode Rabani
Sarkawi. B. Husain
Johny Alfian Khusyairi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI



Seri Jalur Rempah untuk Penguatan Pendidikan Karakter

REMPAH, KOLONIALISME, DAN KESINAMBUNGAN EKONOMI DI PANTAI TIMUR PULAU SULAWESI

La Ode Rabani
Sarkawi. B. Husain
Johny Alfian Khusyairi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

Seri Jalur Rempah untuk Penguatan Pendidikan Karakter

REMPAH, KOLONIALISME, DAN KESINAMBUNGAN EKONOMI

DI PANTAI TIMUR PULAU SULAWESI

Penulis

La Ode Rabani
Sarkawi. B. Husain
Johny Alfian Khusyairi

Pemeriksa Akhir

Lukman Solihin
Imelda Widjaja
Asma Aisha

ISBN

978-602-244-918-8 (PDF)

Desain Sampul dan Isi

Dwi Pengkik

Pemeriksa Aksara

Suhairi Ahmad

Gambar Sampul

Early record of standing-gaff 'ketch' rig on a Sulawesi ship, 1831. Cargo vessels of Makassar, at Besuki [Java], watercolour by François-Edmond Pâris. Collection Musée de la Marine, Paris.
Sumber: <https://www.sea.museum/2018/01/24/unesco-heritage-lists-indonesian-wooden-boat-building>

Penerbit

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dikeluarkan oleh:

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kompleks Kemendikbudristek, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365 | Faks. +6221-5741664
Website: <https://pskp.kemdikbud.go.id/>
Email: pskp.kemendikbudristek@gmail.com

Cetakan pertama, 2022

PERNYATAAN HAK CIPTA © PSKP/Copyright@2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA SAMBUTAN

Rempah, kolonialisme, dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru secara faktual saling berkaitan. Nusantara pada masa kolonial pernah berada dalam pusaran perebutan bangsa-bangsa besar dan berinteraksi dengan peradaban dan ideologi besar, karena berlimpahnya sumber daya yang dimiliki berupa rempah, yang merupakan komoditas paling berharga saat itu.

Buku ini berjudul *Rempah, Kolonialisme, dan Kesinambungan Ekonomi di Pantai Timur Pulau Sulawesi*, merupakan hasil kajian yang membahas bagaimana rempah dan kolonialisme ikut mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pantai timur Pulau Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya. Bagaimana pusat-pusat ekonomi baru itu berlanjut, tumbuh, dan berkembang sejalan dengan semakin kuatnya pengawasan kolonial di pantai timur Pulau Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya. Pantai timur yang dimaksud meliputi sebagian daratan dan wilayah pantai timur Pulau Sulawesi seperti sebagian wilayah Sulawesi Tengah dan sebagian Sulawesi Tenggara, termasuk pulau-pulau di sekitarnya seperti Pulau Buton, Muna, Kepulauan Menui, Salabangka, dan Siompu.

Dalam kesempatan ini, saya selaku plt. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan menyampaikan terima kasih kepada tim atas upaya yang penuh dedikasi, sehingga penulisan dan penerbitan buku ini dapat selesai tepat pada waktunya. Namun, kami memahami bahwa buku ini masih memerlukan masukan dari semua pihak. Akhir kata, semoga penulisan dan penerbitan buku hasil penelitian ini dapat bernilai guna bagi para pemangku kepentingan yang memfokuskan diri pada penelitian mengenai sejarah jalur rempah. Demikian dan terima kasih.

Jakarta, November 2022

Plt. Kepala Pusat

Irsyad Zamjani, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan rahmat-Nya, buku berjudul *Rempah, Kolonialisme, dan Kesinambungan Ekonomi di Pantai Timur Pulau Sulawesi* hadir ke hadapan pembaca yang budiman. Kerangka dasar buku ini tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan pendekatan baru atau cara berpikir baru yang memandang bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dibaca dari sebagian sisi saja, tetapi harus melihatnya secara holistik. Terbukanya sumber-sumber digital yang bisa diakses secara mudah melalui jaringan internet cepat mempermudah penulis melihat secara saksama relasi antara rempah, kolonialisme, dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru.

Paradigma integrasi telah membantu penulis untuk mengatakan bahwa antara rempah dan kolonialisme bagai dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, dan bagai penggunaan uang, memiliki efek yang multi dimensi. Namun, substansi buku ini difokuskan pada efek ekonomi yang lahir dari jejaring dan perdagangan rempah yang melibatkan pantai timur Pulau Sulawesi sebagai wilayah *frontier* atau wilayah terdekat dari pusat produsen rempah di Kepulauan Maluku. Kebijakan *hongitochten* era VOC yang diberlakukan di pusat-pusat produsen rempah membuat daerah lain juga menjadi tempat tumbuh produsen rempah yang tak kalah ramai. Pada perkembangannya, sejumlah kompensasi diberikan kepada para penguasa lokal sebagai ganti rugi atas penebangan pohon rempah.

Kami menyadari bahwa banyak hambatan dalam proses awal lahirnya buku ini, baik dari segi teknis maupun nonteknis. Hambatan itu di antaranya adalah serangan *ransomware* beberapa kali yang menghancurkan seluruh *file* yang sejak awal sudah disiapkan. Selain itu, pandemi yang mewariskan batuk-batuk dan gangguan kesehatan lainnya ikut mengganggu pikiran. Akan tetapi, di tengah tantangan itu, rasa optimis selalu bergelora untuk menyelesaikan buku ini.

Buku ini lahir berkah dari kontribusi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Pusat Penelitian Kebijakan yang kini berubah menjadi Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan yang telah membiayai penelitian sebelumnya sebagai bahan utama buku ini. Dukungan lain yang diberikan adalah dalam bentuk *monitoring* dan evaluasi di setiap tahapan penelitian dan penulisan. Ruang akademis disiapkan dalam bentuk *workshop* dan bentuk lainnya untuk menghadirkan buku ini. Untuk semua dukungan positif tersebut, kami mengucapkan banyak terima kasih. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung kehadiran buku ini hingga sampai ke tangan pembaca.

Pada akhirnya, kami menyadari bahwa buku ini masih membutuhkan masukan konstruktif untuk perbaikan pada masa mendatang. Semua masukan konstruktif itu akan dijadikan sebagai masukan dalam kerangka penyempurnaan buku ini. Kepada pihak-pihak yang tak sempat kami sebutkan, mohon maaf dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menganggapnya sebagai amal jariah. Aamiin YRA.

Surabaya, Agustus 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	ix
BAB I	
PENGANTAR: RELASI REMPAH DAN KOLONIALISME	1
1.1. Sejarah dan Hubungan Rempah dan Kolonialisme	1
1.2. Penelitian Terdahulu	5
1.3. Dasar Teoritis	8
1.4. Sumber Penulisan Buku	9
1.5. Sistematika	10
BAB II	
ALAM DAN PUSAT-PUSAT PERMUKIMAN DAN TERBENTUKNYA ZONA-ZONA EKONOMI	13
2.1. Pengantar	13
2.2. Alam	14
2.3. Pusat-Pusat Permukiman di Kawasan Pantai Timur Pulau Sulawesi..	16
2.4. Pantai Timur Pulau Sulawesi dan Sumber-Sumber Ekonominya	28
2.5. Terbentuknya Zona-Zona Ekonomi	33
BAB III	
REMPAH, KOLONIALISME DAN SISI LAINNYA	37
3.1. Rempah dan Kolonialisme	37
3.2. Sisi Lain dari Jalur Rempah di Jalur Manila: Jejak Cina dalam Perdagangan Rempah	38
3.3. Relasi Global di Pantai Timur Sulawesi Timur.....	41

BAB IV

KESINAMBUNGAN:

TUMBUHNYA PUSAT-PUSAT EKONOMI BARU 45

4.1. Perluasan Ekonomi Kolonial 45

 4.1.1. Ekspansi Militer dan Kepentingan Ekonomi 46

 4.1.2. Riset..... 48

 4.1.3. Eksplorasi dan Eksploitasi..... 49

4.2. Aktivitas Komersial 53

4.3. Pusat-Pusat Baru, Pengembangan Kota dan Pelabuhan..... 57

BAB V

PENUTUP 65

DAFTAR PUSTAKA..... 69

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 2.1.	Pusat-Pusat Permukiman	18
Gambar 2.2.	Teluk Tomori (Tolo) di Kolonodale 1930an	20
Gambar 2.3.	Foto Udara Teluk Kendari lengkap dengan jalur masuk ke teluk Kendari	21
Gambar 2.4.	Pusat Permukiman di sisi darat Teluk Baubau	22
Gambar 2.5.	Sketsa Kota Baubau tahun 1920an	24
Gambar 2.6.	Sketsa Permukiman di Kota Raha oleh Couveur 1935	26
Gambar 2.7.	Sketsa Pusat Permukiman di Bungku	27
Gambar 3.1.	Peta Jalur Perdagangan Maritim Cina Melalui Jalur Manila	39
Gambar 3.2.	Peta Pusat-pusat Ekonomi Baru di Pantai Timur Pulau Sulawesi	42
Tabel 4.1.	Aspal Dunia dan Perusahaan Pengelolanya	51
Gambar 4.1.	Pengolahan Kopra tahun 1935	54
Gambar 4.2.	Kopra Kering Kualitas 1	54
Tabel 4.2.	Data Komoditas dan pelabuhan-pelabuhan 1920	58
Tabel 4.3.	Data Penderita Malaria di Kota Baubau pada bulan Januari-Juni 1922 dan 1923	61

BAB I

PENGANTAR: RELASI REMPAH DAN KOLONIALISME

1.1. Sejarah dan Hubungan Rempah dan Kolonialisme

Lokus dan substansi buku ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang berubah dan berkembang di jalur rempah di Pantai Timur Sulawesi. Wilayah tersebut meliputi sebagian daratan dan wilayah pantai timur Pulau Sulawesi yang terdiri dari sebagian wilayah Sulawesi Tengah dan sebagian Sulawesi Tenggara, termasuk pulau-pulau di sekitarnya seperti pulau Buton, Muna, Kepulauan Menui, Salabangka, dan Siompu. Pulau-pulau itu ditempatkan dalam konteks pendukung aktivitas ekonomi di sepanjang jalur rempah. Wilayah pantai timur Pulau Sulawesi adalah salah satu kawasan yang menjadi zona perdagangan maritim. Posisinya yang berada di lintasan perdagangan dunia dan peran serta masyarakatnya sebagai pedagang dan pelayar menempatkan kawasan ini layak menjadi salah satu zona perdagangan maritim. Artinya, kawasan ini menjadi zona baru melengkapi 5 zona yang telah disebutkan oleh Kennet R. Hall seperti Teluk Bengal, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Laut Jawa (Hall, 2010, 2011, 2016). Dengan demikian, penelitian ini telah menambah satu zona baru perdagangan maritim di zona pantai timur pulau Sulawesi atau dalam perspektif geo-maritim dinamakan dengan zona pantai timur Pulau Sulawesi, yang menjadi salah satu rute penting dalam perdagangan rempah Nusantara.

Rempah sebagai komoditas dalam sejarah telah menjadi salah satu yang paling dicari di seluruh dunia. Posisi rempah semakin penting saat berperan dalam kehidupan manusia dan menjadi kebutuhan manusia di seluruh dunia. Indonesia atau Nusantara sebagai produsen rempah memperoleh dampak yang signifikan. Mulai dari menjadi pusat perdagangan, budaya, hingga pada titik tertentu sebagai pusat politik. Efek paling terkenal dalam sejarah

rempah adalah munculnya persaingan antar negara di dunia untuk menguasai komoditas rempah, menguasai jalur perdagangan, serta upaya memonopoli komoditas rempah (Iskandar, 2005; S. Mansyur, 2011; Sharangi, 2018). Akibatnya, muncul konflik hingga peperangan dalam usaha merebut kekuasaan komoditas rempah.

Perebutan penguasaan rempah memberi efek penting bagi terciptanya sebuah bangsa, namun pada saat yang sama ikut menarik bangsa lain untuk menguasainya. Rempah telah menjadi sumber ekonomi penting dan pada saat yang sama juga telah menjadi “biang” atas kehadiran negara-negara lain untuk menguasai rempah (Hilmar, 2020). Kepulauan Maluku dan sekitarnya sebagai pusat produsen rempah menjadi wilayah paling merasakan situasi tersebut. Pada titik itu, perjumpaan dan interaksi dengan masyarakat lokal menjadi sebuah keniscayaan. Hal yang sama juga terjadi pada bangsa-bangsa lain sebelumnya seperti India, Cina, dan Arab (Amir, 2020; Effendy & Hamid, 2020; Freedman., 2008; Sheriff & Currey, 1987; Siringoringo, 2017).

Interaksi Nusantara dan bangsa-bangsa lain sepanjang jalur rempah yang membentang dari Nusantara (Kepulauan Maluku) sampai ke Eropa telah memberi banyak implikasi. Implikasi itu di antaranya adalah berubahnya orientasi para pedagang yang awalnya hanya ingin mencari keuntungan ke misi kolonialisme dan munculnya pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang jaringan rempah yang dilalui (Nagel, 2018; Rabani, 2017, 2019). Selain itu, permukiman (*settlements*) yang berpusat di pesisir berkembang menjadi kota-kota pelabuhan dan maritim saat rempah dan variannya telah menjadi komoditas paling penting yang mendorong perkembangan kota dan aktivitas ekonomi (Andaya, 2000; Beaujard, 2019; Hussin, 2011).

Wilayah-wilayah tersebut mempunyai komoditas rempah yang cukup beragam, mulai dari lada, jahe, kelapa, kemiri, dan sejenisnya. Pusat-pusat produsen lada di Banten (Soedewo, 2007), Sumatra (Aceh) (Findlay & O'Rourke, 2001; Ismail, 1991; Lailatussyukriyah & Hartutik, 2017; Swantoro, 2019), dan Kalimantan khususnya di Banjarmasin telah menjadi pusat penanaman dan perdagangan lada (Fong, 2013; S. P. Mansyur et al., 2019; Noor & Sayyidati, 2020; Susilowati, 2009). Kepulauan Maluku telah menjadi pusat penanaman cengkeh dan pala yang paling utama sehingga arus perdagangan dan jaringannya menempatkan kepulauan Maluku sebagai pusat rempah dunia (S. Mansyur, 2011; Milton, 2015, 2015; Pattikayhatu, 2012).

Dampak bagi kepulauan Maluku ketika menjadi pusat rempah dunia telah menyeret wilayah sekitarnya menjadi jalur akses yang dilalui dari dan ke pusat rempah (Rabani, 2016a; Zuhdi, 2014, 2020). Pada saat yang sama, wilayah-wilayah sekitar pusat produsen rempah tersebut ikut berkembang, tidak hanya sebagai perluasan penanaman rempah, tetapi juga menjadi pusat ekonomi baru karena berada di jalur perdagangan rempah. Masyarakat di sekitar jaringan rempah ikut aktif dan mendapat kesempatan untuk berkembang bersama-sama sebagai pendukung aktivitas perdagangan seperti yang terjadi di pantai timur Pulau Sulawesi.

Sejarah pantai timur Pulau Sulawesi dalam sejarah perdagangan rempah dapat ditelusuri sejak perjanjian VOC dengan Sultan Buton pada 1613, perang Amboyna 1623, dan kebijakan VOC tentang pembatasan dan penebangan pohon cengkeh (*hongitochten*) di wilayah Kesultanan Buton. Selain itu, keterlibatan Buton dalam berbagai aktivitas menentang dominasi Eropa di Banda (Zahari, 1977a) memperkuat rekaman historis kawasan ini dalam sejarah rempah di Kepulauan Maluku. Buton dan pantai timur Pulau Sulawesi ikut serta menjadi bagian yang menerima dampaknya, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku utama dalam perdagangan rempah secara aktif. Perang Amboyna telah melibatkan Buton lebih luas dan dalam. Buton menjadi bagian dari wilayah taklukan Ternate pada musim angin timur dan menjadi bagian dari wilayah Taklukan Kerajaan Gowa pada musim angin barat (J. W. Schoorl, 1991a; Zuhdi, 1998a, 1999a). Kondisi itu telah membawa dampak berarti bagi sejarah Buton, yakni menjadi arena sejarah yang menarik, salah satunya adalah hadir dan berkembangnya peradaban luar di Buton dan sekitarnya, meskipun di tengah krisis karena menjadi ruang yang diperebutkan oleh kerajaan kuat seperti Bone, Gowa, Ternate, dan VOC Belanda. Salah satu peradaban yang lahir di tengah krisis adalah dibangunnya banyak benteng-benteng di wilayah kekuasaan Buton (Darmawan & Fahimuddin, 2012; Taalami et al., 2015; Udu, 2012).

Kebijakan penebangan pohon cengkeh atau *hongitochten* yang membatasi jumlah produksi telah ikut mengubah sejarah elite Buton, dari pelayar dan pedagang menjadi birokrat yang menerima gaji dari VOC. Kesultanan Buton menerima f100/tahun sebagai kompensasi dari VOC atas penebangan pohon cengkeh di Pulau Wangi-wangi (kini: Wakatobi). Sebagai wilayah perlintasan jalur perdagangan rempah, Buton dan wilayah pantai timur pulau Sulawesi lainnya telah dimanfaatkan oleh VOC untuk mendapatkan tenaga tambahan

khususnya sebagai pekerja (budak) dan tentara yang dipekerjakan di perkebunan dan kapal-kapal VOC . Selain itu, kapal-kapal rakyat dari Buton ikut menyuplai komoditas dari pulau-pulau kecil di luar jangkauan kapal VOC yang umumnya bertonase besar. Mereka mengambil komoditas dari pulau-pulau kecil untuk diangkut ke pelabuhan-pelabuhan utama (Rabani, 2020).

Semakin intensifnya keterlibatan kawasan pantai timur Pulau Sulawesi dalam perdagangan global, pelan tapi pasti mulai berubah di tengah ancaman politik tiga kekuasaan, yakni Gowa di Barat, Ternate di Timur, dan juga Eropa (Belanda) (J. W. Schoorl, 1991a; Zuhdi, 2018; Zuhdi et al., 1996a). Pilihan bersekutu dengan yang lebih kuat harus dijalankan agar tetap bertahan hidup, yakni bekerja sama dengan VOC (1602-1799) dan pada masa selanjutnya menjadi negara kolonial Belanda (1800-1900), dan dilanjutkan dengan Hindia Belanda (1900-1942). Tidak hanya itu, pada saat bersamaan, interaksi intensif juga dilakukan Buton dengan Gowa dan Ternate, meskipun “hanya” berdasarkan angin musim yang berganti setiap 6 bulan (musim angin timur dan barat). Akibatnya, menurut Pim Schoorl, Buton dipermainkan layaknya bola bulu tangkis yang raketnya dipegang Ternate dan Gowa (P. Schoorl, 1991, 2003a). Sementara interaksi Buton yang lebih intensif dilakukan dengan Kerajaan (Bugis) Bone seperti di Perjanjian Bungaya (Andaya, 2004; Stapel, 1922a).

Catatan tentang peran masyarakat pantai timur Pulau Sulawesi di kepulauan Maluku sebagai pekerja dan pemasok kebutuhan perkebunan seperti kapak, parang, pisau, dan sejenisnya menjadi hal penting di perkebunan rempah . Oleh karena itu, penelitian ini mengisi dan memperkuat narasi tentang signifikansi kontribusi masyarakat pantai timur pulau Sulawesi dalam sejarah rempah dan kolonialisme di Nusantara (Indonesia).

Rempah, kolonialisme, dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru secara faktual saling berkaitan. Nusantara tidak akan berada dalam pusaran perebutan bangsa-bangsa besar dan berinteraksi dengan peradaban dan ideologi besar, jika tidak ada sumber daya berupa rempah, komoditas paling berharga . Perebutan hegemoni antarbangsa tersebut membawa Nusantara pada pusaran kolonialisme beberapa negara Eropa modern seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Dalam kerangka yang sama, negara-negara itu kemudian membangun interaksi dan kerja sama serta beradaptasi dengan situasi lokal dengan tujuan utama menguasai komoditas, jaringan, dan akses

perdagangan rempah, khususnya di sekitar pusat produksi rempah. Situasi demikian tidak hanya meninggalkan jejak peradaban positif, tetapi juga menghasilkan sejumlah krisis.

Secara teoretis, keberadaan rempah dan kehadiran kolonialisme telah ikut membentuk dan membangun identitas Nusantara sebagai penghasil utama rempah dunia melalui promosi nama Nusantara dalam beragam laporan dan terbitan serta perebutan ruang laut hingga jalur perdagangan rempah. Peperangan dan konflik yang ikut menyeret penduduk Nusantara seperti memberi pelajaran tentang strategi bertahan, dan pada saat yang sama ikut belajar tentang sistem pertahanan melalui sejumlah pelajaran tentang membangun benteng, mengoperasikan senjata meriam, navigasi kapal, pembuatan kapal dengan tonase besar dari sebelumnya, dan berbagai pengetahuan lainnya sebagaimana yang tersirat dalam Perang Amboyna yang dahsyat dan luas pada 9 Juli 1623 (Knapp, 1992; Stark, 1996).

Dalam kerangka seperti itu, penelitian ini membahas bagaimana rempah dan kolonialisme ikut mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pantai timur Pulau Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya. Bagaimana pusat-pusat ekonomi baru itu berlanjut, tumbuh, dan berkembang sejalan dengan semakin kuatnya pengawasan kolonial di pantai timur Pulau Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya.

1.2. Penelitian Terdahulu

Ada dua fungsi utama tinjauan pustaka dalam penelitian. Pertama, sebagai rujukan historiografi bagi sumber yang diulas dan kontribusi sumber yang digunakan. Kedua, sebagai sumber pengetahuan, sumber rujukan yang memberi perspektif dan menunjukkan posisi penelitian yang baru dilakukan, terutama pada tema terkait. Karena itu, beberapa pustaka di bawah ini dihadirkan untuk memenuhi dua fungsi di atas.

Sumber yang mengulas tentang jalur rempah sudah banyak diterbitkan, tetapi tidak sebanyak jalur sutra atau jalur caravan (*silk and caravan route*) yang dipublikasikan secara luas. Pada 1980an, jalur rempah yang mengarah ke Nusantara terseret dalam konsep jalur sutra sehingga yang memperoleh keuntungan publisitas adalah jalur sutra, saat Cina menjadi ikon utama pada jalur ini. Oleh karena itu, penguatan pengetahuan dan publikasi jalur rempah dapat menunjang dan memperkuat posisi jalur rempah dalam sejarah dan

pemajuan Kebudayaan Nasional (Hilmar, 2020). Dalam konteks itu, buku terbaru berjudul *Rempah Nusantara Mengubah Dunia* (Effendy & Hamid, 2020), diterbitkan atas kerja sama BPNB Kalimantan Timur dan Ruas Yogyakarta, penting disebut karena berkontribusi dalam penelitian. Penelitian ini menyediakan ruang baru bagi kajian selanjutnya, khususnya pada relasi rempah, kolonialisme, dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di Kawasan pantai timur Pulau Sulawesi. Buku ini secara keseluruhan terdiri dari 19 artikel yang ditulis dalam perspektif sejarah, antropologi, dan arkeologi. Ragam perspektif tersebut sebagai upaya menggali pengetahuan rempah di Nusantara.

Kajian Prof. Susanto Zuhdi mengenai *Jalur Pelayaran dan Perdagangan Rempah di Sulawesi Tenggara dalam Abad ke-17 dan ke-18* menampilkan masyarakat kawasan yang dikenal sebagai pewaris tradisi bahari di Nusantara bersama-sama dengan orang-orang Mandar, Madura, Bugis, Makassar, dan terutama orang-orang Buton. Sumbangan pemikiran Susanto Zuhdi dalam tulisan ini terkait pengetahuan keterlibatan intensif masyarakat Sulawesi Tenggara dalam perdagangan rempah di Nusantara (Zuhdi, 2020). Zuhdi tidak melihat apa yang terjadi di Sulawesi Tenggara sebagai satu-kesatuan secara politik dan ekonomi serta dimainkan secara bersama oleh Bugis-Makassar-VOC Belanda dan Ternate. Hal itu tampak dari adanya ruang kultural, ekonomi, politik, dan kantong-kantong etnik di pantai timur Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya.

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan Rabani menyatakan bahwa dampak perdagangan rempah ikut mendorong tumbuhnya kota-kota pelabuhan (Rabani, 2020). Kajian itu dilengkapi dengan pembahasan mengenai aktivitas komersial yang menyertai perdagangan rempah seperti perdagangan kayu, produksi peralatan pertanian dan perkebunan dari besi, biji besi, dan alat-alat pertanian dari pantai timur Pulau Sulawesi (Rabani, 2019). Aktivitas komersial itu juga ikut mendorong berkembangnya kota-kota pelabuhan (Rabani, 2010a).

Namun, kekurangan dari tulisan itu adalah tidak menghadirkan kontribusi pulau-pulau di sekitar daratan pantai timur Pulau Sulawesi dalam aktivitas perdagangan. Padahal, pulau Wangi-wangi misalnya, berkontribusi sebagai penghasil rempah, pulau Binongko sebagai pusat produksi alat-alat pertanian (pandai besi) dan senjata, serta Wawonii dan Kabaena berkontribusi dalam perdagangan rempah dan kelapa .

Selain itu, tinjauan pustaka yang cukup menarik adalah buku yang diedit Imam Muhtarom, dkk . (ed.) dengan judul *Arus Balik: Memori Rempah dan*

Bahari Nusantara, Kolonialisme, dan Poskolonialisme (Ombak, 2014). Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang terdiri dari 3 tema utama: rempah, kolonialisme, dan poskolonialisme. Walaupun menampilkan tema rempah dan kolonialisme, buku ini tidak mengaitkan relasi rempah-kolonialisme dan dampaknya pada tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. Pada titik inilah perbedaan tulisan ini dapat diidentifikasi.

Hilmar Farid dalam tulisannya “Dekolonisasi Jalur Rempah demi Memajukan Kebudayaan Nasional” (Effendy & Hamid, 2020) memaparkan konsep dan pandangan terkait pengembangan pengetahuan dan wawasan mengenai jalur rempah untuk dipublikasikan secara luas dalam kerangka Pemajuan Kebudayaan Nasional. Sejumlah tawaran penting disampaikan agar publisitas tema jalur rempah beredar luas dan tersosialisasi dengan baik pada seluruh rakyat Indonesia dan juga dunia. Bagaimana jalur rempah menjadi fondasi pemajuan kebudayaan nasional diuraikan secara jelas dan lugas. Tulisan ini memberi kontribusi pada pengetahuan bagaimana menguatkan dan membumikan jalur rempah seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia dan dunia. Jalur rempah di masa depan harus menjadi salah satu ikon kebudayaan dan kebanggaan Indonesia dan dikenal luas sebagai lokasi yang pernah menjadi kawasan kosmopolitan.

Kontribusi pengetahuan mengenai jalur rempah yang juga membantu tulisan ini berasal dari karya Alex J. Ulaen, *Kota Pelabuhan di Pesisir Utara Sulawesi dalam Lintasan Jalur Rempah-Ternate*. Tulisan Ulaen (2020) memberi wawasan pada terbentuknya perdagangan dan kota pelabuhan di pesisir utara Sulawesi. Karya itu menguatkan argumentasi bahwa wilayah sekitar Kepulauan Maluku sebagai pusat produksi rempah ikut tumbuh sebagai pusat-pusat ekonomi baru bersamaan dengan intensifnya akses perdagangan rempah. Hanya saja, tulisan Ulaen belum menghubungkan antara efek rempah dan proses kolonialisme yang ikut mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru.

Relasi perdagangan rempah dengan dunia global dapat dilihat dalam buku *Indian Spices* karya Amit Baran Sharangi (Springer, 2018). Karya ini secara komprehensif mencakup produksi, pemrosesan, dan pascapanen rempah-rempah dengan fokus tambahan pada sejarah dan keunikan produk regional legendaris ini. Aspek yang berharga dari karya ini adalah penyajian rantai nilai untuk rempah-rempah pada pemasaran dan ekspor produk, di mana kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi tampak pada geliat perluasan areal

penanaman. Buku ini akan memberikan perspektif pada pencarian data sejauh mana rempah berkontribusi pada tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru.

Selain itu, *Kepulauan Rempah-Rempah* yang ditulis oleh M. Adnan Amal (2016) membahas posisi Maluku Utara yang pernah menjadi kawasan terpenting di Indonesia sebagai produsen rempah-rempah. Produksi rempah yang dihasilkan membuat orang-orang Eropa datang dengan keberanian lebih dan pada perkembangan kemudian ikut mengubah sejarah kepulauan Maluku pada 1250-1950. Kerajaan-kerajaan lokal ikut aktif dalam komersialisasi rempah dan melakukan transaksi dengan Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang pada saat yang sama juga ikut menjadi pesaing dalam rangka memperebutkan monopoli rempah. Akibatnya, kawasan Maluku menjadi ruang konflik dan pertempuran beberapa bangsa Eropa pada abad XVII. Buku Adnan Amal memberi kontribusi pada pengalaman sejarah Maluku utara bahwa rempah menggerakkan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi yang diperankan oleh raja-raja lokal beserta masyarakatnya dan juga orang-orang Eropa.

Beberapa kajian yang dipaparkan di atas memberi tanda bahwa relasi rempah dan perdagangan masih didominasi oleh perspektif barat/Eropa. Sementara pustaka mengenai kaitan antara rempah dan Cina, Jepang, dan wilayah Asia lainnya sangat tidak memadai. Namun demikian, beberapa tulisan mengenai hal itu telah ditemukan dan akan disertakan dalam daftar pustaka.

1.3. Dasar Teoretis

Interaksi dan integrasi kolonialisme di pesisir timur Pulau Sulawesi terkait erat dengan perdagangan rempah. Intensifnya perdagangan rempah dan juga komoditas lainnya yang ikut diperdagangkan melahirkan kerja sama untuk kemajuan atau dalam istilah Prof. Sartono Kartodirdjo disebut sebagai *integrasi progresif* (Kartodirdjo, 1992b), di mana interaksi dan adaptasi antara kolonial dengan orang-orang lokal tidak selamanya menghasilkan kerugian. Hal ini terlihat dari bukti-bukti material yang ada di beberapa kerajaan di pantai timur Pulau Sulawesi seperti Bungku, Mori, Banggai, dan Buton. Selain itu, masyarakat lokal mempunyai kesempatan luas untuk terlibat aktif dalam perdagangan dan menunjang tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan itu.

Dengan demikian, konsep rempah, kolonialisme, dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pantai timur Pulau Sulawesi lebih operasional untuk

menjelaskan relasi ketiganya dan memudahkan untuk memahami relevansi antara rempah, kolonialisme, dan perkembangan ekonomi sebagai dampak dari perdagangan rempah dalam waktu yang panjang. Konsep integrasi positif yang diperkenalkan oleh Prof. Sartono digunakan untuk melihat sejauh mana interaksi dan adaptasi itu memberikan dampak kemajuan pada pusat-pusat ekonomi baru di pantai timur Pulau Sulawesi sepanjang tahun 1620an-1920an.

1.4. Sumber Penulisan Buku

Penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu penelitian sejarah, penelitian dokumen, dan penelitian lapangan. Metode sejarah yang digunakan mengacu pada karya Kuntowijoyo (Kuntowijoyo, 1995) dengan 5 tahapan, yakni (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan. Metode ini digunakan untuk menelaah data-data dan dokumen sejarah yang relevan seperti perang rempah, rekaman rempah dalam karya sastra lama, *dagregister*, *colonial verslag*, *indisch verslag*, *memorie van overgave*, dan laporan-laporan pada era VOC, Kolonial, dan Hindia Belanda. Data-data tersebut diperoleh dengan dua cara, yakni akses ke Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional di Jakarta dan daerah terkait seperti di Makassar, Kendari, dan Luwuk. Selain itu, data dan arsip juga diperoleh melalui akses secara daring (*online*) seperti di situs Arsip Kerajaan Belanda, www.nationaalarchief.nl, Arsip Nasional, www.delpher.nl, www.atlasofmutualheritage.nl, dan dbln.nl. Data-data itu kemudian diolah dengan cara melakukan kritik terhadap keaslian dan kredibilitas sumber. Dari penemuan tersebut, data diinterpretasi dan dianalisis untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta sejarah inilah yang akan digunakan sebagai bahan utama penulisan laporan yang berjudul *Rempah, Kolonialisme, dan Tumbuhnya Pusat-Pusat Ekonomi Baru di Pantai Timur Sulawesi dan Pulau-pulau sekitarnya tahun 1620an-1920an*.

Selain itu, penelitian dokumen digunakan untuk menelaah sumber-sumber dokumen yang telah mengalami reproduksi atau alih media, karena sangat dimungkinkan proses tersebut mengubah angka-angka dari bentuk awalnya. Selain itu, kekeliruan para penginput data juga sering terjadi sehingga kesalahan dalam penjumlahan data-data kuantitatif sering kali ditemukan. Sebagai gambaran, ditemukan perbedaan antara data penduduk dalam *Volkstelling* 1930 dan data-data sebelumnya, ketika data-data itu dijumlahkan dengan program

excel atau kalkulator. Kondisi itu melegitimasi penggunaan metode penelitian dokumen dalam penelitian sebagaimana disarankan oleh Sartono Kartodirdjo, bahwa secara sistematis prosedur penyelidikan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu pengumpulan bahan-bahan sejarah, baik dari arsip-arsip dan perpustakaan-perpustakaan di dalam atau di luar negeri dilakukan untuk menjangkau informasi selengkap mungkin (Kartodirdjo, 1992a, p. 9)

Metode penelitian lapangan diperlukan untuk melakukan cek terhadap situs dan data lapangan mengenai rempah dan toponimi asal-usul dari pusat-pusat ekonomi yang tumbuh di sepanjang jalur rempah di pantai timur Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya. Perjalanan dimulai dari Luwuk, kemudian ke Pulau Banggai da Xula, Selanjutnya ke Kolonodale, Bungku hingga ke Kendari, lalu masuk menyusuri selat Buton untuk singgah di Pulau Muna sebagai pusat jati terbesar di Sulawesi, dan berakhir di Buton untuk melihat salah satu pusat kejayaan rempah dan benteng terluas di dunia yang ada di Buton, Ibukota Baubau. Tim melihat juga data lapangan di pulau Wangi-wangi (Togo Mowondu) untuk melihat kondisi lapangan yang di dalam sejarah menjadi korban dari kebijakan *hongitochten* VOC.

Ketiga metode itu diharapkan mampu menjadi pemandu (*guide*) bagi tercapainya tujuan penelitian ini, yakni penguatan pengetahuan jalur rempah tidak hanya pada masyarakat akademik, tetapi juga masyarakat dunia secara keseluruhan.

1.5. Sistematika

Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang menguraikan lingkup rempah, kolonialisme, dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru. Ketiga aspek itu diuraikan dalam bab dan subbab dari laporan penelitian ini.

Bab satu (1) adalah pendahuluan yang terdiri dari 7 bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, dan metode penelitian. Bab 1 memuat hal-hal umum yang menggambarkan relasi rempah, kolonialisme dalam interaksi yang tidak selamanya negatif. Ada bagian-bagian yang jika ditelaah lebih jauh, relasi itu menghadirkan integrasi positif.

Bab dua (2) berjudul Alam dan Pusat-Pusat Permukiman dan Terbentuknya Zona-Zona Ekonomi. Bab ini membahas juga tentang alam dan zona-zona

ekonomi. Pada bab tiga (3), membahas tentang proses kolonialisme dan rempah dengan temuan adanya jaringan atau jalur Manila yang terlibat dalam perdagangan rempah. Cina terlibat aktif dalam jalur ini. Dalam pembahasan ini, keterlibatan Cina dalam perdagangan rempah ikut memastikan keterhubungan rempah dengan jalur sutra.

Pada bab empat (4) menyajikan tentang Tumbuhnya Pusat-Pusat Ekonomi Baru yang disebabkan oleh upaya Belanda melakukan eksploitasi dan ekspansi ekonomi secara luas. Ekspedisi militer dilakukan untuk memaksa penguasa lokal tunduk dan untuk selanjutnya sumber-sumber ekonominya dikuasai, dikontrol, dan dieksploitasi. Pada saat yang sama, dilakukan juga eksplorasi, penelitian, dan budidaya bagi komoditas yang laku di pasar internasional.

Bab lima (5) adalah kesimpulan yang merupakan sintesis dari serangkaian fakta-fakta yang ditulis dalam penelitian ini. Saran untuk penelitian selanjutnya akan ditempatkan pada bagian akhir laporan ini.

BAB II

ALAM DAN PUSAT-PUSAT PERMUKIMAN DAN TERBENTUKNYA ZONA-ZONA EKONOMI

2.1. Pengantar

Bagian ini menghadirkan informasi tentang alam Laut Banda dan interaksinya dengan dunia luar. Hal ini penting untuk memahami interelasi kawasan pantai timur Pulau Sulawesi dengan dunia global. Terdapat beberapa alasan utama yang memaparkan pengetahuan tentang sisi lokal dan global dari pantai timur Pulau Sulawesi.

Pertama, pantai timur Pulau Sulawesi secara faktual terintegrasi secara luas dengan jalur perdagangan utama dunia karena berada pada lintasan menuju pusat produksi rempah. *Kedua*, konsekuensi dari posisi geografis itu menjadikan pantai timur Pulau Sulawesi menjadi ruang publik yang “diperebutkan” oleh kerajaan-kerajaan besar dan kuat di sekitarnya seperti Ternate, Gowa, dan Bone.¹ Orang-orang Eropa juga ikut terlibat melalui perusahaan dagang VOC untuk mengikatkan diri dalam perjanjian abadi dengan kerajaan-kerajaan lokal.²

Ketiga, alam menyimpan dan menghasilkan sumber daya ekonomi dan menjadi komoditas yang dibutuhkan oleh pasar dunia. Komoditas yang dihasilkan antara lain rempah-rempah, nikel, aspal, hasil laut, dan hasil hutan seperti kayu jati, rotan, dan damar. Sementara untuk hasil laut, pantai

¹ E. B. Kielstra, “Het Sultanaat van Boeton,” 1908; Harry A. Poeze and Pim Schoorl, *Excursions in Celebes* (Leiden: KITLV Press, 1991); Pim Schoorl, *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton* (Jakarta: Djambatan, 2003); Susanto Zuhdi, “Labu Rope Labu Wana, Sejarah Butun Abad XVII – XVIII” *Disertasi*, (Universitas Indonesia, 1999); Susanto Zuhdi, G.A. Ohorella, and D. Said, *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton* (Jakarta: Depdikbud, 1996).

² J.W. Schoorl, “Het ‘Eeuwige’ verbond tussen Buton en de VOC, 1613-1667,” dalam *Excursions in Celebes: en Bundel Bijdragen bij het afscheid van J. Noorduyt als directeursecretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde*, ed. oleh Harry A. Poeze (Leiden: KITLV Press, 1991), hlm. 21–61.

timur Pulau Sulawesi menghasilkan teripang, lola, ikan kering, dan sirip ikan hiu. Komoditas tersebut banyak dibutuhkan pasar global. Kondisi itu menjadikan pantai timur Pulau Sulawesi sebagai salah satu penunjang aktivitas perdagangan di Nusantara, khususnya dari dan ke kepulauan Maluku. Menurut H.D. Evers, pantai timur Pulau Sulawesi adalah ruang global Asia Tenggara yang terintegrasi secara luas dengan jaringan perdagangan.³ Secara geografis, posisinya berada dalam lalu lintas perdagangan global dan mudah diakses melalui jaringan perdagangan laut. Pantai timur Pulau Sulawesi menjadi lokasi penting tidak saja karena faktor geografisnya, tetapi juga terkait dengan komoditas ekonomi yang dihasilkan dan mempunyai sarana pendukung seperti perahu dengan berbagai ukuran.

Bentangan alam menyediakan ruang-ruang pertukaran dan perjumpaan secara sosial, ekonomi, dan politik yang menguntungkan, seperti teluk, selat, dan muara sungai. Beberapa kerajaan mampu bertahan lama di ruang-ruang tersebut, seperti Kerajaan/Kesultanan Buton di Teluk Baubau, Kerajaan Laiwui di Teluk Kendari, Kerajaan Tobungku di muara Sungai Bungku, dan Kerajaan Mori di Teluk Tolo. Fakta tersebut menjadi poin keempat karena selain itu, ada Kerajaan Banggai yang juga berpusat di Teluk Lalong, Luwuk. Kerajaan-kerajaan itu masih bertahan hingga 1960-an. Kerajaan Banggai yang pusatnya berpindah ke Luwuk, posisinya berada di Selat Pelleng, di antara laut Banda dan laut Maluku.⁴

2.2. Alam

Dari aspek geografis, penyebutan pantai timur Pulau Sulawesi sependek ingatan penulis, baru ada dalam penelitian ini. Penyebutan itu didasari oleh alasan-alasan berikut ini. *Pertama*, akses antarwilayah dan antar permukiman lebih mudah dilakukan melalui laut, sehingga aktivitas dan mobilitas maritim lebih aman dan nyaman dilakukan. Sementara untuk jaringan jalan darat terhambat oleh tebing, lembah, dan tidak adanya tenaga hewan yang memadai untuk mobilitas penduduk di kawasan itu. *Kedua*, masyarakat umumnya bermukim di sekitar pantai, khususnya pada periode sejarah yang ditulis. *Ketiga*, sumber kemajuan ekonomi, sosial, dan perubahan politik, datangnya

³ Hans-Dieter Evers, "Traditional Trading Networks of Southeast Asia," *Archipel* 35 (1988), hlm. 89-100.

⁴ Louis van Vuuren, *Het gouvernement Celebes: proeve eener monographie*, vol. 1 (Weltevreden, Batavia, Java: Hoofd Encyclopaedisch-Bureau, 1920), hlm. 282-285.

melalui laut. *Keempat* adalah penelitian ini melihat pantai timur Pulau Sulawesi dalam perspektif maritim saat laut Banda menjadi penggerak utama sejarah ekonomi di kawasan itu.

Hasil identifikasi dan penelusuran didasarkan pada laporan tertulis seperti yang terdapat dalam dokumentasi kolonial dan sumber-sumber tercetak lainnya. Hal itu diperkuat oleh hasil penelusuran satelit berbasis program *Google Earth*⁵ yang menunjukkan hal yang sama, yakni adanya ruang untuk berlabuh, seperti teluk, selat, dan muara sungai. Ruang-ruang itu dalam sejarah pelayaran dan perdagangan di Indonesia terbukti dapat menunjang dan membantu memenuhi kebutuhan logistik, serta mampu menjadi pelindung dari beragam ancaman, seperti badai yang dialami selama proses pelayaran dan perdagangan. Secara sederhana, ruang-ruang di tepian selat, teluk, dan muara sungai, kemudian berkembang menjadi pusat permukiman. Ruang-ruang permukiman itu juga dapat dipahami sebagai ruang transit yang terbentuk dan berkembang menjadi permukiman dan menjadi bagian dari kota karena menjadi pusat perjumpaan banyak suku. Pada titik tertentu, ruang-ruang itu berfungsi sebagai pasar atau menurut Weber (1977) disebut sebagai pusat pertukaran.⁶

Beragam fungsi dari alam pantai timur Pulau Sulawesi itu tidak lepas dari tiga hal. *Pertama*, posisi geografis dengan bentangan alamnya berada dalam lintasan perdagangan komoditas dari dan ke pusat produksi rempah-rempah. *Kedua*, adanya kekuatan-kekuatan politik yang mengontrol lalu lintas laut di kawasan itu, sehingga para pedagang dan pelayar itu singgah, sekaligus memenuhi kebutuhan logistik seperti air minum dan menambah bahan pangan sebagai bekal dalam melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya.

Ketiga, ada gangguan alam berupa ombak dan badai yang berasal dari Laut Banda dan sewaktu-waktu mengganggu pelayaran dan perdagangan, khususnya pada saat angin muson Barat atau pada saat pergantian siklus angin. Masyarakat lokal menyebut peristiwa itu dengan *pamali* (lokasinya di sekitar tanjung atau karang). Kondisi itu ikut mempengaruhi masyarakat pantai timur Pulau Sulawesi, terutama adanya cerita tentang tempat-tempat berbahaya. Pemerintah Belanda juga menandai salah satu tanjung yang ada di Pulau Buton

⁵ Penggunaan Google Earth versi pro dilakukan untuk mengamati posisi detail dari ruang alamiah yang dijadikan sebagai tempat berlabuh, khususnya dilihat dari atas atau foto udara.

⁶ Max Weber, "Apakah Yang Disebut Kota," dalam *Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial*, ed. Sartono Kartodirdjo (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1977), hlm. 11-44.

sebagai *Dwaal Bay*,⁷ atau tanjung yang berbahaya. Posisi tanjung ini terletak di sekitar Wawonii. Tanjung itu pada abad XIX menjadi salah satu pos intai yang digunakan oleh bajak laut.⁸

2.3. Pusat–Pusat Permukiman di Kawasan Pantai Timur Pulau Sulawesi

Teluk, selat, dan muara sungai dalam sejarah adalah tempat yang selalu dijadikan pusat permukiman masyarakat. Apakah hal yang sama juga terjadi? Apabila melihat bentangan alam sepanjang pantai timur Pulau Sulawesi, kondisi geografis seperti itu juga ada. Hal itu terjadi karena keadaan alamiah Laut Banda yang luas, selalu berombak besar dan tinggi. Hal itu menjadi salah satu ancaman bagi aktivitas perdagangan, pelayaran, dan mobilitas penduduk. Kondisi demikian telah mendorong penduduk untuk menjadikan selat, teluk, dan muara sungai sebagai salah satu tempat berlindung yang aman. Hal inilah yang membuat permukiman di tiga lokasi tersebut berkembang.

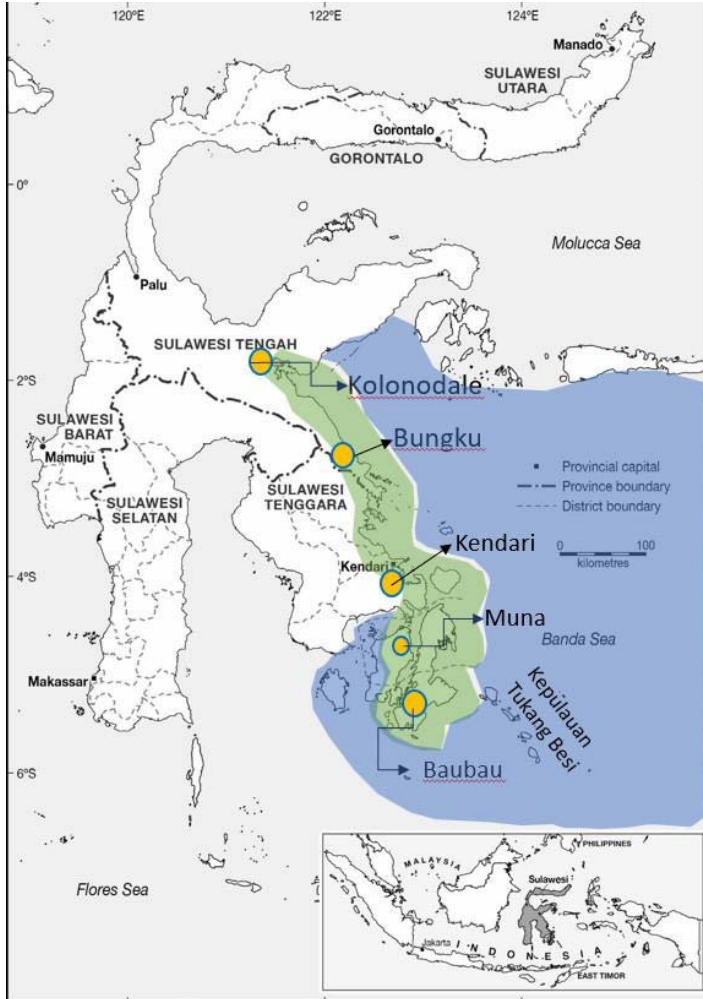
Ada dua cara untuk mengidentifikasi ruang-ruang permukiman penduduk yang mendiami suatu wilayah. Cara pertama adalah dengan memahami kebutuhan rutin mereka, yakni tersedianya air yang layak konsumsi, nyaman, dan aman, khususnya dari ancaman alamiah. Sementara yang berada di wilayah geografis pesisir, biasanya terlindung dari badai karena kondisi perairan yang tenang. Cara kedua adalah memanfaatkan data-data yang tersedia, khususnya yang diterbitkan dalam rangka mengidentifikasi penduduk. Data-data itu adalah data sensus, yang dalam masa pemerintahan Belanda dikenal dengan *volksteling*. Sensus penduduk dilakukan pada 1930 dan laporan tersebut terbit satu tahun kemudian pada 1931. Data-data laporan ini diambil dari dua sumber, yaitu *volksteling* dan *memorie van overgave*. Data tersebut sangat rinci karena memuat detail penduduk yang berbasis distrik atau setingkat kecamatan. Dengan data tersebut, dapat diketahui adanya konsentrasi penduduk, migrasi, profesi penduduk, dan yang lebih penting adalah daerah-daerah atau distrik yang mempunyai penduduk padat. Lokasi dengan kepadatan penduduk cukup tinggi biasanya menjadi pasar dan pusat perekonomian.

⁷ A Ligtvoet, "Beschrijving en Geschiedenis van Boeton," *BKII* (1878), hlm. 1.

⁸ Susanto Zuhdi, G.A. Ohorella, dan D. Said, *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton* (Jakarta: Depdikbud, 1996); Taalami, "Hikayat Negeri Buton, Analisis Jalinan Fakta dan Fiksi Dalam Struktur Hikayat dan Fungsi serta Edisi Teks"; E.J. van den Berg, "Mededelingen Uit de Verslagen van Dr E.J. van Den Berg; Taalambtenaar op Buton 1936-1941," ed. A. A. Cense, *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 110, no. 2 (1954): 154–84; Esther Velthoen, "Contested Coastlines: Diasporas, Trade and Colonial Expansion in Eastern Sulawesi 1680-1905" *Thesis*, (Murdoch University, 2002).

Dua cara di atas memudahkan dalam mengidentifikasi pusat-pusat permukiman. Untuk mendeskripsikan permukiman, kondisi alamiah seperti di atas menjadi hal umum. Selat, teluk, dan muara sungai adalah pusat-pusat permukiman. Laut Banda selama ini dikenal berombak tinggi sehingga ombak itu akan mencapai pesisir dan secara teoretis mempengaruhi permukiman penduduknya. Oleh karena itu, penduduk mencari teluk, muara sungai, dan selat untuk mendirikan permukiman. Pola seperti itu adalah yang paling umum ditemukan. Pusat-pusat permukiman itu pada perkembangannya semakin meluas dan berkembang menjadi pusat ekonomi di mana pasar dan pelabuhan berkembang di sekitarnya. Menurut Max Weber, kondisi tersebut menjadi embrio bagi tumbuh dan berkembangnya sebuah kota.⁹ Adapun lokasi pusat-pusat permukiman dapat dilihat pada Gambar 2.1.

⁹ Max Weber, "Apakah Yang Disebut Kota," dalam *Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial*, ed. oleh Sartono Kartodirdjo (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1977), hlm. 11–42.



Gambar 2.1. Pusat-Pusat Permukiman.

Sumber: diolah penulis dari Peta Sulawesi

Pusat-pusat permukiman yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah permukiman yang berkembang menjadi kota, dan permukiman lainnya yang mendukung perkembangan kota, seperti daerah penyangga yang terhubung dan terintegrasi secara aktif dengan pusat kota. Daerah seperti itu antara lain daerah pusat tambang, di mana sebagian pekerja menjalankan manajemen perusahaannya di kota. Gambaran paling jelas mengenai hal itu adalah Kota Baubau dengan pertambangan Aspal Buton di Pasar Wajo yang berjarak kurang

lebih 50 km dari pusat kota. Artinya, perjalanan dari kota ke lokasi operasional perusahaan tidak membutuhkan waktu lama atau bisa ditempuh kurang lebih satu jam saja.

Untuk memudahkan identifikasi permukiman dalam kaitannya dengan tumbuhnya pusat-pusat permukiman, maka bagian ini mendeskripsikan pusat-pusat permukiman beserta nama-namanya yang selanjutnya tumbuh menjadi kota. Pusat-pusat permukiman itu berada di selat, teluk, dan muara sungai. Teluk tersebut berada di Baubau, Kendari, dan Bungku. Adapun selat yang menjadi pusat permukiman para penduduk seperti Selat Buton, Wangi-Wangi, Salabangka, dan *Tomori (Tollo)* di Kolonodale. Sedangkan permukiman yang terdapat di muara sungai dapat ditemukan di Baubau, Bungku, dan Kolonodale. Permukiman penduduk di kota Baubau, Kendari, dan Kolonodale juga di sekitar sungai yang bermuara di teluk.

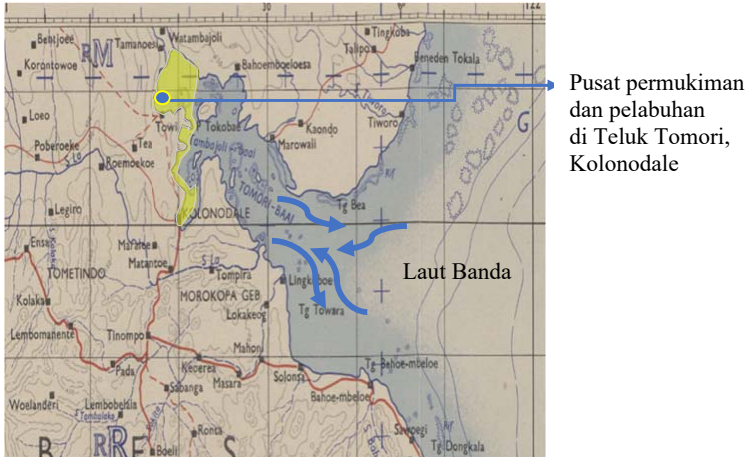
Teluk adalah ruang yang aman untuk tempat berlabuh, mencari ikan, dan terlindung dari badai, khususnya angin dan ombak besar. Teluk menjadi kebutuhan utama bagi mereka yang melakukan pelayaran dengan rute melewati laut dalam dan ombak besar. Situasi geografis seperti itu menjadi hal umum. Jika melihat bentangan alam dari selatan hingga utara, dapat ditemukan beberapa teluk. Teluk paling selatan adalah Teluk Baubau. Di teluk itu, terdapat muara Sungai Baubau. Teluk Baubau juga terhubung dengan Selat Buton dan menjadi jalur pelayaran yang aman menuju Teluk Kendari, untuk selanjutnya menuju Bungku, hingga ke Kolonodale. Di Selat Buton, ada Raha yang menjadi ruang permukiman. Ruang itu pada perkembangannya telah menjadi kota karena menjadi pelabuhan dan secara ekologis mempunyai dataran rendah untuk permukiman. Pejabat pemerintah Belanda, Couvreur mencatat bahwa Raha menjadi pusat kota di Muna serta rumah raja dan para bangsawan.¹⁰ Raha merupakan wilayah permukiman penduduk Muna dan menjadi lokasi kota pelabuhan Raha di Pulau Muna. Pada masa lalu, wilayah ini menjadi tempat permukiman para pelaut dan orang-orang Bajau dan Bugis.

Terdapat dua dari tiga teluk yang paling aman dari badai, yakni Teluk Kendari (Gambar 2.3) dan Teluk Tollo (Gambar 2.2). Teluk Tollo lokasinya berada tepat di lekukan dalam pantai Timur Pulau Sulawesi. Lokasi teluk ini menjadi Pelabuhan Kolodale dan pusat dari Kerajaan Mori. Di sisi darat teluk menjadi pusat permukiman masyarakat Kolonodale.

¹⁰ (Couvreur, 1935a)

Keterangan:

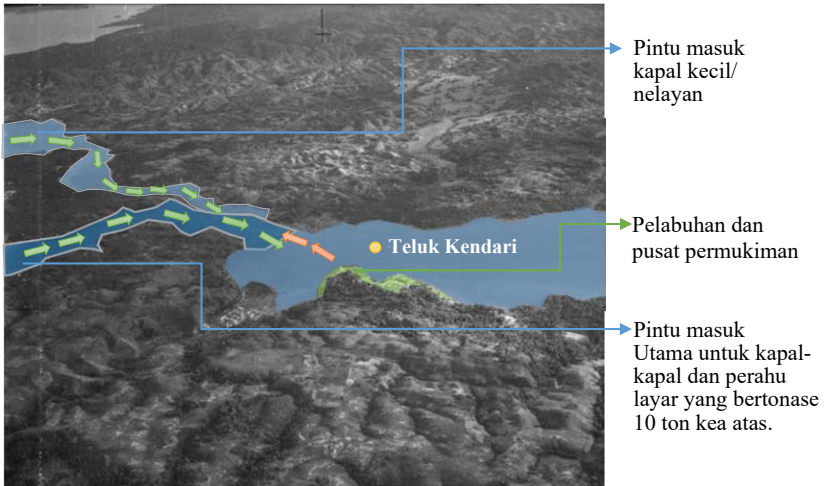
Bagian yang diwarnai merupakan area teluk dan pelabuhan Kolonodale. Pada bagian pesisir bermukim Suku Mori, Bugis, Bajo, dan Morowali (utara).



Gambar 2.2. Teluk Tomori (Tolo) di Kolonodale 1930an

Sumber: diolah dari Peta Sulawesi, Koleksi Digital KITLV

Pulau-pulau yang berada tepat di pintu masuk teluk telah menjadi pelindung paling aman dari ancaman ombak Laut Banda, khususnya saat musim angin timur (lihat detail Gambar 2.2). Teluk Kendari juga menjadi tempat aman dari badai karena ruang teluk tertutup oleh bentangan alamiah yang mengelilingi teluk dan jalur masuk ke teluk yang tidak terlalu lebar. Kondisi ini kemudian melindungi teluk dari arus Laut Banda. Posisi bentangan alamiah yang berbukit relatif tinggi melindungi teluk dari ancaman angin dan gelombang, sehingga aktivitas di dalam Teluk Kendari tetap aman seperti tampak pada Gambar 2.3.

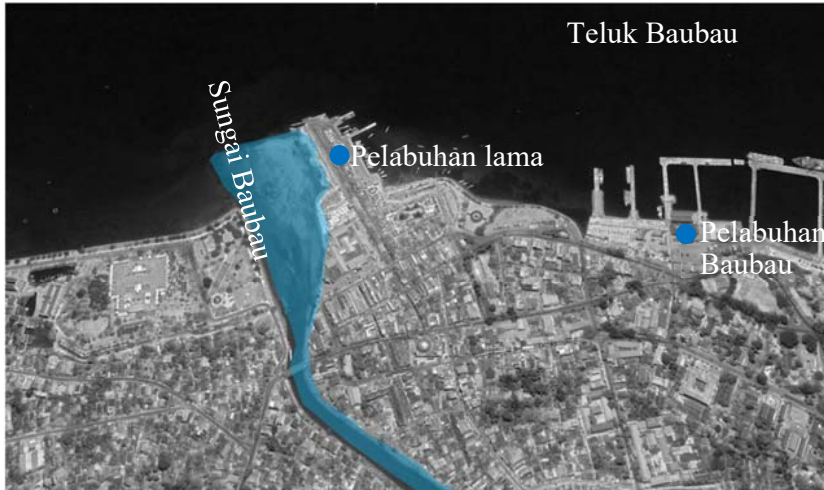


Gambar 2.3.

Foto Udara Teluk Kendari lengkap dengan jalur masuk ke teluk Kendari

Sumber: diolah dari Marine Luchtvaart Dienst Indië, *Luchtopname van de baai bij Kendari*, Koleksi KITLV, *No Panggil*, KITLV MLD50_048, Link: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:744604>

Satu teluk lagi yang tidak seaman Teluk Kendari dan Tolo (Tomori) adalah Teluk Baubau. Teluk Baubau tidak aman terutama saat musim timur, karena berombak dari Laut Banda. Meskipun demikian, jalan masuk yang lebar dan dalam serta adanya pulau-pulau di sekitar Teluk Baubau seperti Siompu dan Kadatua ikut menjamin keamanan untuk masuk ke Teluk Baubau. Ada dua jalan untuk masuk ke Teluk Baubau, dari arah Selat Buton (sebelah selatan teluk) dan dari arah timur. Teluk ini lebih lebar dari Teluk Kendari dan Tomori. Teluk Baubau seperti tampak pada Gambar 2.4 menunjukkan bahwa teluknya yang relatif terbuka pada sisi timurnya tidak menjamin kenyamanan bagi kapal-kapal dan perahu yang berlabuh.



Gambar 2.4. Pusat Permukiman di sisi darat Teluk Baubau

Sumber: diolah dari koleksi Atlasofmutualheritage.

Link: <https://www.atlasofmutualheritage.nl/en/Map-Bouton-Strait.7360>

Untuk mengurangi risiko dan ancaman badai, pemerintah membangun pelabuhan di Teluk Baubau, tepatnya di sekitar muara sungai. Fungsi pelabuhan itu menjadi sarana efektif untuk mobilitas barang. Selain itu, posisinya yang dekat dengan sumber air, menjamin ketersediaan air untuk logistik kapal dan perahu yang akan melanjutkan perjalanan ke wilayah lainnya.

Dengan kondisi itu, posisi Teluk Baubau sangat menguntungkan bagi kapal-kapal uap berukuran dan bertonase besar. Demikian juga teluk pasar Wajo yang tidak aman dari ombak Laut Banda pada musim timur karena harus menerima gelombang tinggi dari Laut Banda. Meskipun demikian, teluk Baubau telah menjadi pelabuhan yang aman ketika pelabuhan dan pusat pergudangan kolonial selesai dibangun pada 1920an.¹¹ Pembangunan pelabuhan yang terletak di sisi Sungai Baubau ini telah menjadi pelindung bagi teluk Baubau karena posisinya membentang dan menghalangi ombak yang masuk ke teluk Baubau. Demikian juga teluk Pasar Wajo, posisinya yang agak menjorok ke dalam dan konstruksi pelabuhan telah mampu melindungi kapal-kapal pengangkut aspal dari ancaman ombak laut Banda. Tekanan ombak yang bersumber dari Laut Banda dapat berkurang secara signifikan oleh adanya beberapa karang dan bentangan Kepulauan Tukang Besi.

¹¹ (Rabani, 2005)

Selain itu, faktor kedekatan jarak dengan sumber air merupakan hal utama di setiap permukiman penduduk. Permukiman penduduk pantai timur Pulau Sulawesi dekat dengan air yang berada di teluk Baubau, di Selat Buton ada di Raha, Kandai atau Kendari terletak di Teluk Kendari, dan pusat permukiman lainnya ada di Bungku dan Kolonodale di sisi darat Teluk Tolo. Semua pusat-pusat permukiman penduduk itu berdekatan dengan sumber air yang berasal dari sungai mengalir ke teluk atau selat.

Cara mudah lain mengidentifikasi pusat-pusat permukiman penduduk adalah dengan penelitian dokumen resmi pemerintah kolonial, seperti *volksteling* atau sensus penduduk di masa pemerintahan Hindia Belanda. Data ini berbasis pada distrik dan memuat jumlah penduduk laki-laki dan perempuan beserta persentasenya. Dengan data *volksteling*, identifikasi terhadap pusat-pusat permukiman penduduk mudah dilakukan, termasuk posisi geografisnya. Dengan data itu, disorientasi geografis dapat dihindari. Kontribusi penting dari sensus penduduk pada masa kolonial itu salah satu di antaranya adalah detail administrasi wilayah dan klasifikasi penduduk. Selain itu, juga memudahkan identifikasi satuan administrasi dan komposisi wilayah. Menurut sensus pada 1930, Bungku dan Kolodale berada pada satuan administratif wilayah *Onderafdeeling* Poso. Selain data sensus, sumbangan peta digital membantu dalam menentukan pusat-pusat permukiman itu secara cepat.

Kota Baubau terletak di sisi darat bagian utara teluk Baubau. Kota Baubau menarik karena menjadi pusat pemerintahan Kerajaan/Kesultanan Buton. Kekuasaan kesultanan dikendalikan dari kota Baubau. Gambar 5 menunjukkan visual teluk saat suasana kota dipenuhi fasilitas pelabuhan, dan sungai di sekitarnya. Kota Baubau mengalami perbaikan lingkungan fisik kota pada 1922 di bawah pengawasan Van Hasselt.¹² Detail perbaikan kota dan lingkungannya dijelaskan tersendiri di bagian lain penelitian ini.

¹² (Hasselt, 1925)



Gambar 2.5. Sketsa Kota Baubau tahun 1920an

Sumber: diolah dari Jh. L. van Hasselt, *De Assainering van Baoe-Baoe, Hoofplaats van de Onderafdeeling Boeton (Zuid-Oost Celebes)*, 1925, lamp.

Pusat kota kolonial Baubau berlokasi di pusat komersial dan mudah diakses melalui laut, kondisinya jauh berbeda dengan pusat kota lamanya. Jika merunut naskah si Panjonga, asal-usul permukiman awal seharusnya di teluk Baubau yang disebut *Welia* (Wolio).¹³ Akan tetapi, situasi permukiman yang tidak aman karena selalu mendapat serangan dari bajak laut membuat pusat permukiman para bangsawan dan elite kesultanan berada di atas bukit, yakni di dalam benteng. Fakta terhadap serangan bajak laut pada permukiman

¹³ (Zahari, 1977a; Zuhrdi et al., 1996c)

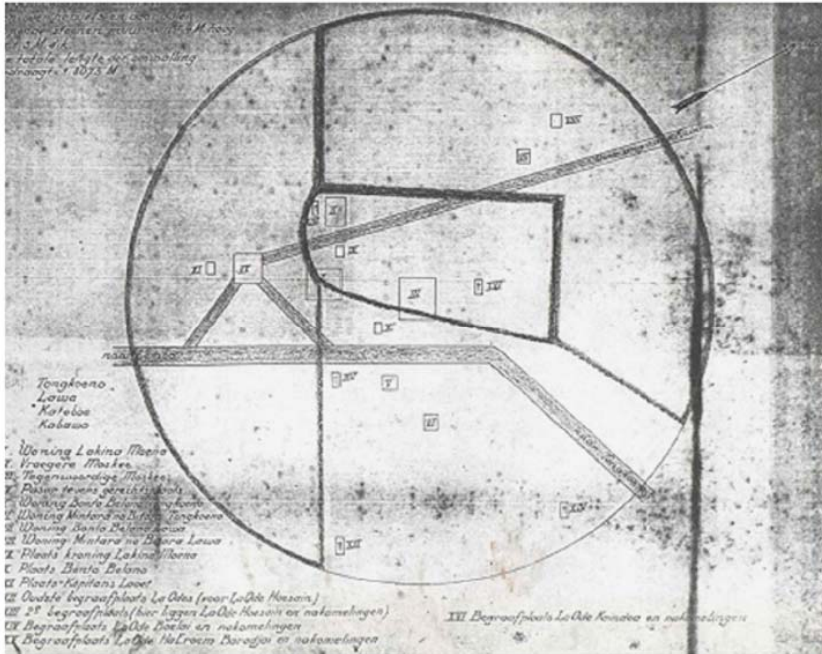
awal sebenarnya meragukan, karena VOC tidak mengalami ancaman serius dari bajak laut ketika mendirikan pos dan permukiman di lokasi yang sama di Baubau. Meskipun dari sisi persenjataan dan kekuatan, VOC lebih unggul dibanding bajak laut yang sering menyerang di Pulau Buton.

Perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan/kesultanan Buton ke area yang lebih tinggi dan medan yang sulit mengakses laut mempunyai makna tertentu. Di satu sisi ada alasan keamanan, tetapi di sisi lain menunjukkan proses agraris (isolasi di laut para bangsawan/pembesar kerajaan) dan pembatasan aktivitas para bangsawan Buton dalam perdagangan sedang terjadi. Episode *hongt tochten* dalam sejarah VOC dan perdagangan penduduk setempat erat kaitannya dengan situasi ini. Pemberian kompensasi atas penebangan pohon cengkeh dan pemberian gaji bagi sultan dan pejabat kerajaan menjadi paket sempurna atas politik “memasifkan” aktivitas perdagangan (ekonomi) dan pada saat yang sama pesaing VOC dalam perdagangan berkurang.

Dalam situasi demikian, teluk dan pelabuhan berada di bawah kontrol VOC. Dampaknya, Baubau menjadi kota pelabuhan sekaligus salah satu pusat birokrasi dan ekonomi yang ramai pada periode selanjutnya. Permukiman penduduk semakin meluas dan kota mengalami perluasan secara morfologis. Kondisi itu terjadi karena kebijakan pemusatan birokrasi sepanjang abad XIX sampai medio abad XX, di mana Baubau menjadi pusat kota dan pusat politik pemerintah.

Selain itu, terdapat pusat permukiman di selat Buton yang berkembang di kota Raha, Pulau Muna. Kota Raha ditetapkan sebagai ibukota *Onderafdeeling* Muna pada 1920an. Penetapan ini sejalan dengan semakin intensifnya perdagangan dan aktivitas pengangkutan kayu jati dari pulau tersebut. Pelabuhan di kota Raha dibangun sebagai tempat pengangkutan kayu jati yang berasal dari hutan di Pulau Muna yang mencapai 4000an hektar (*ha*). Di kota tersebut, ada rumah kontroleur dan pejabat kerajaan Muna. Rumah Raja Muna dengan kontroleur Belanda berdekatan dan tidak ditempatkan pada lingkungan “terpencil” seperti di Buton. Sketsa kota Raha seperti tampak pada Gambar 2.6 menjelaskan tata kota Raha yang menunjukkan lokasi permukiman Eropa dan Raja Muna di kota Raha berdekatan. Sketsa dibuat oleh Kontroleur Muna, J Couvrer.¹⁴

¹⁴ (Couvreur, 1935b; Rabani, 2010a, p. 67)



Gambar 2.6. Sketsa Permukiman di Kota Raha oleh Couveur 1935

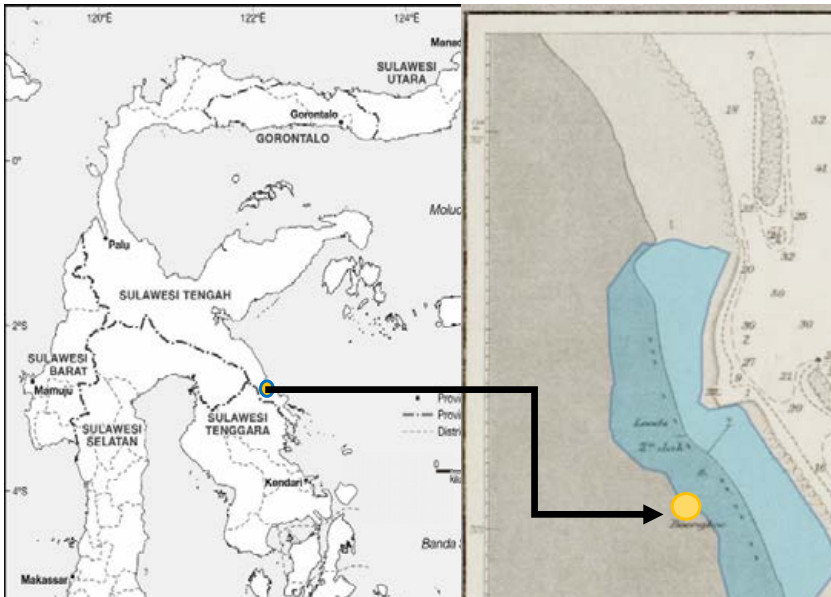
Sumber: J. Couvreur, *Etnografisch Overzicht van Muna*
(Raha: Naskah ketikan tidak diterbitkan, 1935)

Kota Raha sebagai pusat permukiman terus berkembang sejalan dengan eksploitasi kayu jati oleh Perusahaan Kayu *Vejahoma*. Terdapat juga program emigrasi pemerintah Hindia Belanda yang mendatangkan penduduk Jawa dan Madura sebagai pekerja dan pembukaan lahan di Pulau Muna. Dengan menerima limpahan pekerja dari Jawa dan wilayah sekitar, penduduk kota ikut mewarnai dinamika penduduk kota Raha. Berdasarkan sensus penduduk tahun 1930, penduduk Muna mencapai 2.322 jiwa yang terdiri dari 1.106 perempuan dan 1.216 laki-laki.¹⁵

Sementara itu, pusat-pusat permukiman di Bungku menyebar di beberapa desa. Desa-desa yang mengalami perkembangan berarti dari sisi jumlah penduduk adalah Ulunambo, Torokuno, Pulau Tiga, dan Morompoitanga. Ada juga desa Ungkaya, Jawi-jawi, Pelewali, dan Kampung Buton. Nama desa sebagai pusat permukiman yang disebut terakhir seperti mengindikasikan bukan desa asli karena namanya mirip dengan nama etnik, khususnya Mandar, Jawa, dan Buton.

¹⁵ (Economische Zaken, 1936, p. hlm. 29-31)

Kuat dugaan desa itu dihuni oleh pendatang dari Jawa, Mandar, dan Buton. Jumlah Penduduk Bungku dan Mori berdasarkan data sensus (*volksteling*) pada 1930 mencapai 33.553 jiwa dengan penduduk perempuan berjumlah 18.939 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 14.614 orang.¹⁶



Gambar 2.7. Sketsa Pusat Permukiman di Bungku

Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl.

link: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:1996416>

Pusat permukiman di Bungku terletak di pesisir pantai seperti tampak pada Gambar 2.7. Penduduknya berasal dari berbagai wilayah di sekitarnya. Kebanyakan penduduk Tobungku berasal dari Tolaki, Toraja, dan Moronene. Selain itu ada yang berasal dari Muna, Buton, Bajau, dan Bugis. Mata pencaharian penduduk seperti Bajau dan Buton yaitu sebagai nelayan pencari teripang, lola, dan mutiara. Sementara orang-orang Bugis bekerja sebagai pedagang. Bungku berkembang karena komoditas laut dan menjadi salah satu pusat penempaan besi yang dijadikan alat-alat pertanian dan persenjataan. Produk besi dari Bungku sudah dikenal sebelum kedatangan Belanda. Kerajaan Bungku tunduk pada kerajaan Ternate dalam periode yang lama. Data sensus penduduk pada 1930 memperlihatkan orang Bungku di Mori atau Kolodale sebanyak 14.052

¹⁶ (*Economishe Zaken, 1936, p. 29*) Lihat juga; (Nijverheid en Handel, 1941, p. 30)

jiwa dengan 7.081 laki-laki dan 6.971 perempuan.¹⁷ Demikian juga penduduk Bungku di Luwuk. Data menunjukkan bahwa penduduk Bungku melakukan migrasi ke wilayah sekitarnya seperti Kolonodale dan ke Laiwoei (Kendari).

2.4. Pantai Timur Pulau Sulawesi dan Sumber-Sumber Ekonominya

Kawasan pantai timur Pulau Sulawesi pada masa kolonial dikenal dengan *Oost Celebes*. Identitas *Oostkust Celebes* juga digunakan pemerintah untuk menyebut wilayah yang sama. Wilayah *Oostkust Celebes* mencakup satuan geografis Banggai (termasuk Luwuk), Kolonodale di Teluk Tolo, Bungku, Kendari, pulau Muna dan Buton. Bentangan alam wilayah pantai timur Pulau Sulawesi ini jika mengacu pada peta yang dibuat pada kolonial membentang dari selatan ke utara, masih dalam satuan geografis pantai timur Pulau Sulawesi atau *Oostkust van Celebes*. Akan tetapi, ketika kawasan ini dilihat dari terminologi kawasan, maka wilayah Luwuk Banggai sudah berada pada sisi utara Laut Banda.

Wilayah yang membentang ini terintegrasi secara luas dengan kawasan lainnya seperti Kepulauan Maluku sebagai daerah produsen rempah-rempah, Bitung sebagai kota pelabuhan yang terhubung dengan Laut Maluku, Ternate, dan Sulu di Filipina. Pantai timur Pulau Sulawesi juga terhubung dengan baik dengan pelabuhan-pelabuhan utama seperti pelabuhan Makassar, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Priok di Batavia, dan Singapura. Pelabuhan Makassar oleh pemerintah kolonial Belanda dijadikan pelabuhan bebas sejak 1847 untuk menyaingi Singapura di bawah kendali kolonial Inggris.¹⁸ Keterhubungan antar pelabuhan itu telah lama berlangsung dan makin intensif hingga akhir abad XIX ketika perkapalan kolonial sering melayari kepulauan Nusantara.¹⁹

Pada perkembangannya, kebijakan itu mempengaruhi para pedagang, mereka yang biasa mengangkut dan menjual komoditasnya ke pelabuhan Makassar, khususnya para pedagang Bugis Makassar. Para pedagang Bugis-Makassar lebih senang melakukan transaksi komoditas dengan para pedagang

¹⁷ (Economische Zaken, 1936, pp. 29–31)

¹⁸ (Poelinggomang, 2002a)

¹⁹ Singgih T. Sulistiyono, "The Java Sea Network: Patterns in The Development of Interregional Shipping and Trade in the Process of National Economic Integration in Indonesia, 1870s-1970s" *Disertasi* (Leiden University, 2003); Lihat juga, Singgih Tri Sulistiyono, "The Expulsion of KPM and Its Impact on the Inter-Island Shipping and Trade in Indonesia, 1957–1964," *Itinerario* Volume 30, no. Issue 02 (July 2006), hlm. 104–28.

Inggris atau datang langsung ke Singapura daripada harus singgah dan berlabuh di pelabuhan Makassar. Sebagian dari penyebabnya adalah pengenaan pajak tinggi, adanya monopoli perdagangan, dan rendahnya harga komoditas.

Kebijakan pengenaan pajak dan monopoli perdagangan komoditas di pelabuhan “bebas” Makassar oleh Belanda membawa implikasi pada tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat ekonomi baru yang berlangsung sepanjang abad XVI-XIX. Pusat-pusat ekonomi baru itu adalah wilayah yang menjadi pusat-pusat otoritas lokal yang berkembang di teluk, selat, dan muara sungai.²⁰ Kota Kolonodale berlokasi di sisi Barat Teluk Tolo, Kota Bungku terletak dan meluas ke utara di muara Sungai Bungku, Kota Kendari berada di sisi barat Teluk Kendari, Kota Muna berada di sisi barat Selat Buton, dan Kota Baubau terletak di sisi selatan Teluk Baubau.

Perkembangan pusat-pusat ekonomi baru juga sejalan dengan mulai dieksploitasinya hasil hutan, perkebunan, perikanan, dan hasil tambang sebagai komoditas perdagangan. Eksploitasi terhadap komoditas itu adalah sebagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keuangan kolonial karena perkembangan dan kebutuhan pasar global yang berasal dari luar Jawa.²¹ Komoditas sebelumnya seperti rempah-rempah posisinya tetap sama, menjadi komoditas yang diperdagangkan bersama-sama dengan hasil hutan, perkebunan, perikanan, dan pertambangan.

Situasi di atas menjadi salah satu periode sejarah pantai timur Pulau Sulawesi yang memperoleh “berkah” dari persaingan dagang Belanda dan Inggris, khususnya di Sulawesi. Identifikasi dari beberapa laporan awal mengenai alam memberi informasi bahwa sebagian dari daerah itu subur dan dapat dikembangkan menjadi daerah pertanian, perkebunan, terutama di Banggai, Kolodale, Bungku, Kendari, dan sebagian kecil di Pulau Buton.²² Sebagian wilayah lain dari pantai timur Pulau Sulawesi mempunyai hasil hutan dan bahan mineral berupa hasil

²⁰ (Mahid et al., 2012a)

²¹ Jeroen Touwen, “Extremes in the Archipelago: Trade and Economic Development in the Outer Island of Indonesia, 1900-1942” (Rijkuniversiteit, 1997); Lindblad, “Economic Aspects of the Dutch Expansion in Indonesia, 1870-1914,” *Modern Asian Studies* Vol. 23, no. No. 1 (1989): 1–24; Ge’ Prince, “Kebijakan Ekonomi Di Indonesia 1900-1942,” in *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*, ed. Thomas J. Lindblad (Jakarta: LP3ES, 2000); J. Thomas Lindblad, “The Late Colonial State and Economic Expansion, 1900–1930s,” in *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800–2000*, ed. Howard W. Dick et al. (Honolulu: Hawai’i University Press, 2002), hlm. 111–152.

²² Vosmaer, “Korte Beschrijving van het Zuid-Oostelijk-Schiereiland van Celebes,” 1839.

tambang nikel²³ dan aspal.²⁴ Aspal ditemukan di Pasarwajo, Kabungka dan Lawele di Pulau Buton. Sementara nikel ditemukan di Bungku (Morowali).²⁵

Pulau Buton relatif tidak memiliki tanah subur, kecuali di sisi barat dan utara.²⁶ Akan tetapi, Pulau Buton memiliki hasil tambang aspal yang berguna untuk menunjang ekonomi dan pembangunan jalan raya. Produksi dan pemasarannya dilakukan ke kota-kota besar di Nusantara, Eropa, dan Afrika. Aspal alam di Pulau Buton mulai diproduksi pada 1920an. Produksi aspal dilakukan di Lawele, Pasarwajo, dan Kabungka di Pulau Buton. Pertambangan aspal itu memberi kontribusi secara ekonomi dan sosial bagi perkembangan masyarakat di Pulau Buton. Dari sisi demografi, terjadi penambahan penduduk yang berasal dari daerah sekitarnya seperti dari Toraja, Muna, Manado, dan Kepulauan Tukang Besi. Untuk petugas birokrasi didatangkan dari Jawa, Manado, Makassar, dan Belanda (Eropa).²⁷ Kehadiran mereka untuk mengisi tenaga administrasi di perusahaan pertambangan Buton dan birokrasi lainnya yang tidak bisa diisi oleh masyarakat atau elite lokal.

Komoditas yang dihasilkan di Pulau Muna adalah kapas, kayu jati, rotan, dan mutiara. Komoditas lola, teripang, dan sirip ikan hiu menjadi sebagian dari komoditas laut yang dihasilkan oleh orang-orang Bugis dan Bajau di daerah itu. Di Kendari, para nelayan Bugis dan Bajau yang bermukim di sisi selatan teluk juga menjadi pengumpul mutiara, lola, dan teripang untuk dijual kepada para pedagang Cina.²⁸ Para pedagang Bugis juga menjadi penadah, yang kemudian menjual berbagai komoditas tersebut kepada para pedagang Cina, dan sebagian lainnya dijual ke Makassar.²⁹

²³ E. C. Abendanon, *Geologische en Geographische Doorkruisingen van Midden-Celebes 1909-1910*, Deel IV. (Leiden: Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. BRILL, 1718)

²⁴ A. CHR. D Bothe, "De Asfaltgesteenten van het Eiland Boeton, Hun Voorkomen en Economische Beteekenis.," *De Ingenieur; M. Mijnbouw* 4, no. 19 (1928), hlm. 27–45.

²⁵ (Robinson, 1986a) Dalam catatan pemerintah kolonial, Kesultanan Ternate menerima hadiah senjata berkualitas tinggi dari Kerajaan Bungku yang di dalamnya terdapat kandungan nikel atau biji besi berkualitas tinggi. Lihat Jennifer L. Gaynor, "Tiworo in the Seascape of the Spice Wars," *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient* 103 (2017), hlm. 237–56.

²⁶ Produksi padi dilakukan pada kedua wilayah itu. Masyarakat tempatan mengenal wilayah itu dengan Ngkari-ngkari, Bone-bone, dan Lasalimu. Penamaan itu mengindikasikan bahwa Bugis sebagai penghasil beras di Buton. Kondisi yang sama terjadi di Kendari di mana keterlibatan orang-orang Bugis dalam aktivitas pertanian tidak bisa diragukan lagi. Lihat J. C. van Rijneveld, "Celebes of Veldtoegt Der Nederlander op het Eiland Celebes in de Jaaren 1824 en 1825" (Breda, BROESE & COMP., 1840), hlm. 17–18.

²⁷ Ligtfoot, "Beschrijving en Geschiedenish van Boeton."

²⁸ Vosmaer, "Korte Beschrijving van het Zuid-Oostelijk-Schiereiland van Celebes," 1839.

²⁹ (Sutherland & Nas, 1985) J. Knaap and Sutherland, *Manson Traders: Ships, Skippers and Commodities in Eighteenth-Century Makassar*.

Beragam komoditas yang ada di sebagian wilayah pantai timur Pulau Sulawesi itu membutuhkan sarana transportasi untuk pemasarannya, utamanya perkapalan atau perahu. Sarana transportasi ini disediakan oleh orang-orang Buton yang berasal dari Kadatua, Kepulauan Tukang Besi, Katobengke, Siompu, dan sekitarnya. Mereka menjadi bagian penting dalam mengalirkan komoditas yang dihasilkan oleh pantai timur Pulau Sulawesi, terutama dalam pengangkutan dan pemasaran. Komoditas itu di angkut ke kota-kota pelabuhan dan kemudian dijual kepada para pedagang Cina yang ada di kota-kota itu. Pada umumnya, para pedagang itu membawa komoditasnya ke pelabuhan Bitung, Makassar, Surabaya, Batavia, dan Singapura untuk dijual kepada para pembeli.

Sejarah pantai timur Pulau Sulawesi sebelum abad XIX dapat ditelusuri melalui identifikasi sumber-sumber tertulis dalam bentuk dokumen lokal dan laporan perjalanan orang-orang Eropa. Dokumen lokal yang dimaksud dalam bentuk catatan di dalam naskah *La Galigo* dan saduran atau transkrip dari tradisi lisan. Dokumen laporan perjalanan orang-orang Eropa tersedia karena adanya kebiasaan orang-orang Eropa yang selalu mencatat kisah-kisahannya selama dalam perjalanan. Dokumen tertua mengenai sumber naskah dapat ditemukan dalam kitab *Negarakerlagama* karya *Mpu Prapanca* yang menceritakan tentang pulau-pulau di sebelah timur Nusantara. Dalam kitab itu disebut pulau Banggai dan Butun (Buton).³⁰ Pulau Butun (Buton) secara geografis di sisi selatan, sedangkan pulau Banggai berada di sisi utara. Di antara Buton dan Banggai (di Luwuk) adalah wilayah geografis yang dalam disertasi ini disebut sebagai ruang pantai timur Pulau Sulawesi.

Informasi dari kitab *Negarakerlagama* tidak hanya memuat catatan tentang nama gugusan pulau, namun makna dari catatan itu adalah pulau-pulau yang dilalui dalam rute perdagangan dan pelayaran ke pusat produksi rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Menurut Ptak Roderich,³¹ ada dua jalur perdagangan rempah abad XIII sampai XVI, yakni jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara menempati ruang di sebelah utara Kalimantan menuju Laut

³⁰ CH. F. Van Fraanssen, "Drie Plaatsnamen uit Oost-Indonesie in de Nagara-kerlagama: Galiyo, Muar en Wwanin en de Vroege Handels-Geschiedenis van de Ambonse Eilanden." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* Deel 132, 2/3de Afl. (1976) (1976, hlm. 293–305.

³¹ Jalur perdagangan ini didasarkan pada penelitiannya mengenai pasokan komoditas rempah dan hubungan Cina dengan Asia Tenggara. Lihat, Ptak Roderich, "The Northern Trade Route to the Spice Islands: South China Sea-Sulu Zone-North Moluccas (14th to Early 16th Century)," *Archipel* 43, no. 43 (1992), hlm. 27–56.

Sulawesi atau melalui Zona (laut) Sulu, kemudian ke kepulauan Xulla yang membentang di sisi utara laut Banda hingga ke pulau-pulau utama produsen rempah, yakni kepulauan Maluku, seperti Buru, Ambon, Seram hingga Banda.

Jalur selatan membentang dari Malaka menuju pantai utara Jawa, menyusuri kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Key dan Tanimbar, dan kemudian ke utara menyusuri pulau-pulau kecil yang ada di laut Arafuru, untuk selanjutnya menuju ke kepulauan Banda. Para pedagang yang menggunakan jalur selatan adalah dari Arab, India, dan Melayu. Sedangkan jalur utara paling umum digunakan oleh para pedagang Cina menuju Kepulauan Maluku. Catatan itu didasarkan pada adanya pos utama pedagang Cina di Brunei.³² Alasan geografis dan dominasi para pedagang Cina di Laut Cina Selatan menjadi indikasi kuat bahwa rute utara banyak dilayari oleh para pedagang Cina, selain menjadi pilihan rute paling tepat dan cepat.

Naskah *Hikayat Negeri Buton* dan Naskah *Si Panjonga*³³ mengungkap asal-usul kerajaan Buton yang didirikan oleh 4 orang dari luar Buton. Naskah itu juga menjadi sumber yang digunakan oleh Susanto Zuhdi,³⁴ Haeruddin,³⁵ A.M. Zahari,³⁶ Ali Rosdin,³⁷ dan La Ode Taalami³⁸ yang menyetujui bahwa Kerajaan Buton telah berubah menjadi kesultanan seiring dengan pengaruh Islam yang kuat.³⁹ Pendapat para peneliti itu telah menguatkan adanya elemen global di ruang lokal (pantai timur Pulau Sulawesi). Kondisi itu menyediakan ruang bagi naskah lokal yang merekam proses global.

Selain teks lokal, ada juga laporan tertulis yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Menurut *Corpus Diplomaticum*, dan sejumlah sumber VOC, pantai Timur Pulau Sulawesi disebut sebagai wilayah yang juga dihuni bajak

³² (Roderich, 1992).

³³ La Ode Rabani, "Menafsir Ulang Hikayat Sipanjonga Sebagai Sumber Sejarah Buton, Konsekuensi Historiografis dan Analisisnya," dalam *Menafsir Ulang Sejarah dan Budaya Buton*, ed. oleh M. Mu' min Fahimuddin (Baubau: Respect, 2011), hlm. 1–15.

³⁴ (Zuhdi, 2010a)

³⁵ (Haeruddin, 2013)

³⁶ A.M. Zahari, *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton)*, vol. II (Jakarta: Depdikbud, 1977).

³⁷ (Rosdin, 2015)

³⁸ La Ode Taalami, "Hikayat Negeri Buton, Analisis Jalinan Fakta Dan Fiksi Dalam Struktur Hikayat Dan Fungsi Serta Edisi Teks" (Universitas Padjajaran, 2012).

³⁹ Menurut Haliadi dan Abd. Rahim Yunus, Islam masuk ke Buton melalui jalur Ternate. Syeh Abdul Wahid menjadi tokoh penting dan populer dalam sejarah Buton dengan mengajarkan Islam kepada Raja Buton dan kemudian mengajarkannya kepada masyarakat Buton. Lihat; Abdul Rahim Yunus, *Posisi Tasawuf Dalam Sistem Kekuasaan Di Kesultanan Buton Pada Abad Ke-19* (Jakarta: INIS XXIV, 1995); Haliadi Haliadi, Teuku Ibrahim Alfian, and Kuntowijoyo, "Buton Islam dan Islam Buton 1873-1938," *Sosiohumanika* 13, no. 2 (September 2000), hlm. 477–90.

laut.⁴⁰ Pada abad XVII, kawasan ini menjadi ruang yang diperebutkan antara Bugis, Makassar, Ternate, dan Belanda. Peran Makassar yang “diakhiri” dengan ditandatanganinya Perjanjian Bungaya dengan jelas menyebut pengembalian wilayah-wilayah yang sebelumnya dianeksasi oleh kerajaan-kerajaan di atas.⁴¹ Buton tetap menjadi wilayah yang dijadikan pos ekonomi dan pemerintahan VOC Belanda sebagaimana tercantum dalam perjanjian yang ditandatangani pada 1613 dan dinamakan dengan perjanjian abadi. Perjanjian ini berisi perlindungan kedua pihak (Buton dan VOC) dari berbagai ancaman, khususnya dari Kerajaan Gowa dan Ternate.⁴²

Pada 1800an, Belanda melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi temperatur, kandungan garam, dan gas. Laporan yang mengidentifikasi gambaran serta lokasi-lokasi yang memungkinkan pengembangan ekonomi ini dapat dibaca dalam karya Crawford yang diterbitkan pada 1820.⁴³ Pada 1890an, pemerintah Belanda melakukan eksplorasi sumber-sumber ekonomi. Dalam eksplorasi itu ditemukan potensi ekonomi berupa biji besi dan sumber nikel lain di Pomalaa dan Bungku.⁴⁴ Pada 1920an, Belanda berhasil membuat perencanaan untuk produksi aspal alam untuk memenuhi kebutuhan pengerasan jalan di Nusantara, Afrika, dan Eropa. Ekspor pertama hasil pertambangan aspal dilakukan pada 1924 di bawah kendali perusahaan *Borneo en Boeton Maatschappij* (BBM).

2.5. Terbentuknya Zona-Zona Ekonomi

Catatan sejarah mengenai terbentuknya zona-zona ekonomi dapat ditelusuri dalam kitab *Negarakertagama*. Dalam pupuh V kitab tersebut tertulis dengan jelas tiga tempat yaitu, Tobungku, Butun, dan Banggai sebagai wilayah yang berada dalam pengaruh Majapahit. Catatan sejarah Buton dan

⁴⁰ F. S. A. De Clercq, *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate* (Leiden: E.J. Brill, 1890), hlm. 173 dan 179.

⁴¹ (Andaya, 2004; P. Schoorl, 2003b; Stapel, 1922b; Zuhdi, 2010b)

⁴² Zuhdi, *op. cit.*, 1999; Susanto Zuhdi, “Perairan Buton Abad ke-19,” dalam *dalam Cristian Pelras (Peny.)*, *Dialog Prancis-Nusantara, Aneka Ragam Pendekatan Dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya Tentang Asia Tenggara Maritim* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998); J.W. Schoorl, “Power, Ideology and Change in the early state of Buton,” dalam *State and Trade in the Indonesian Archipelago*, ed. oleh G.J. Schutte (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 17–59.

⁴³ John F.R.S. Crawford, *History of the Indian Archipelago: Containing an Account of the Manners, Arts, Languages, Religions, Institutions, and Commerce of Its Inhabitants* (Edinburgh and London: United for Archibald Constable and Co., 1820).

⁴⁴ Kathryn May Robinson, *Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town* (Albany-New York: State University of New York Press, 1986).

Banggai memuat nama berciri khas Jawa pernah menjadi raja di kerajaan Banggai dan Buton. Di Kerajaan Buton nama raja yang berciri khas Jawa (diduga dari Majapahit) adalah Tuarade. Tuarade adalah raja Buton ke-4 yang memerintah pada 1400an. Periode kekuasaan Raja Tuarade ini menandai babak baru dalam tradisi kerajaan Buton, yaitu saat penggunaan bendera dan simbol-simbol (warna) kerajaan diperkenalkan dan digunakan.

Adanya pengaruh Jawa dalam tradisi kerajaan membuat Buton secara politik menjadi bagian dari kekuatan kerajaan dari Jawa. Demikian juga secara ekonomi, keterhubungan Jawa dengan Buton membawa implikasi aktivitas ekonomi pada kedua wilayah tersebut. Politik dan ekonomi abad XIV sulit dipisahkan karena keduanya berjalan beriringan. Siapa yang kuat, maka ia menguasai dan mengontrol aktivitas ekonomi. Majapahit terlibat aktif dalam perdagangan bijih besi dari kerajaan Luwu. Bukti-bukti Arkeologis mengindikasikan kuatnya pengaruh Jawa (Majapahit) pada abad ke-14 di Sulawesi. Keris dan Gong menjadi sebagian dari bukti pengaruh Jawa. Pembesar Jawa yang dikenal sebagai Batara Guru dikenal luas di Sulawesi, termasuk di Kerajaan Gowa dan Luwu

Zona ekonomi periode Indonesia lama selalu identik dengan zona politik yang ditandai dengan pusat-pusat politik/kerajaan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada Abad XVI-XVII, kerajaan-kerajaan mulai menunjukkan eksistensinya, seperti Kerajaan Buton, Pantjana (Wuna), Tobungku, dan Mori. Kerajaan Laiwoei baru dikenal pada abad XVIII. Kerajaan ini diduga kuat berasal dari pecahan Kerajaan Mekongga yang menguasai daratan Kendari sampai di sisi timur Teluk Bone (Kolaka). Pusat-pusat kerajaan itu juga menjadi pusat-pusat ekonomi atau dalam penelitian ini disebut sebagai zona ekonomi. Secara teoritis, eksistensi suatu pusat politik selalu ditunjang oleh sumber daya ekonomi yang baik dan memadai.

Secara ringkas, berikut ini disajikan zona-zona ekonomi di sisi barat Laut Banda. Zona-zona ekonomi yang disajikan berlokasi di pusat-pusat kerajaan dan di dalamnya diuraikan sumber daya yang mendukung zona ekonomi itu bertahan dalam waktu panjang. Sumber daya yang dimaksud adalah geografis, respons atas perubahan, komoditas, eksplorasi, dan inovasi.

Tulisan mengenai Kerajaan Mori oleh E. Poelinggomang memuat data tentang eksistensi Kerajaan Mori hingga pasca kemerdekaan. Kerajaan itu bertahan karena sumber daya ekonomi dan perlindungan yang diperoleh dari

Ternate, Bone, dan Belanda. Bentuk perlindungan yang diperoleh kerajaan Mori berupa perlindungan politik dan ekonomi. Mori memberikan sumber daya manusia, peternakan dan kehutanan kepada pelindungnya, Bone, Ternate, dan Belanda. Sedangkan pelindungnya memberikan keamanan dari gangguan bajak laut dan faktor eksternal lainnya, terutama kepada raja dan masyarakat Mori.

Kerajaan Tobungku berpusat di Bungku. Kerajaan ini menurut catatan di era VOC memiliki produk pandai besi yang berkualitas tinggi. Sumber daya terpenting dari kerajaan ini adalah biji besi yang digunakan untuk industri tukang besi. Hasil lautnya berupa teripang, lola, ikan, dan mutiara. Hasil itu sebagian besar diperoleh dari Kepulauan Menui, yang berlokasi di sebelah Tenggara pusat kerajaan Tobungku (map terlampir). VOC mencatat bahwa Raja Bungku selalu mengirim upeti kepada sultan Ternate berupa produk parang, pedang, dan keris berkualitas tinggi. Bahan dari produk tersebut diambil dari biji besi yang dari alam Bungku.

Zona ekonomi lainnya adalah Teluk Kendari. Teluk ini menurut Vosmaer (1839) pada awalnya dihuni oleh orang-orang Bajo dan Bugis. Mata pencahariannya adalah mencari teripang, mutiara, lola dan sirip ikan hiu. Teluk Kendari semakin dikenal ketika dijadikan pos militer Belanda. Pos ini bertujuan untuk mengamankan lalu lintas perdagangan kolonial Belanda di pantai timur, Sulawesi Timur atau dalam penelitian ini disebut sebagai pantai timur Pulau Sulawesi. Di selat Buton terdapat kerajaan *Pantjana* atau Muna (Wuna) dan berpusat di Raha. Dokumen Belanda memuat catatan bahwa kerajaan ini didirikan oleh orang-orang Bugis. Kalau orang Bugis yang mendirikan, maka periode kerajaan ini, secara teoretis baru ada pasca perjanjian Bungaya. Hal itu didasarkan pada kuatnya pengaruh Bugis (Bone) pada pasca 1667-1669. Periode ini menjadi titik balik atas peralihan kekuasaan dari Makassar ke Bugis (Bone).

Kawasan ekonomi lain yang populer adalah teluk Baubau, tepatnya di selat Buton. Lokasi ini dikuasai kerajaan Buton yang pada perkembangannya kemudian menjadi kesultanan. Interaksi ekonomi dan politik antara kesultanan Buton dan penguasa luar mewarnai sejarah panjang kerajaan itu. Dalam sejarah, Buton pernah berinteraksi dengan Portugis, Inggris, Belanda, Arab, Cina, Jawa, Makassar, Bugis, dan Ternate.⁴⁵ Raja Buton pertama, *Wa Kha Kha*, diindikasikan berasal dari Cina, meskipun mitosnya berasal dari bambu yang terdampar. Hubungan Buton dan Jawa dapat diidentifikasi melalui sejumlah

⁴⁵ (Zuhdi, 1999a, 2010b, p. hlm. 51)

material budaya, bendera, gong, dan pakaian kebesaran kerajaan yang bermotif Jawa. Rajanya pun pernah ada yang berasal dari Jawa. Relasi Buton dengan Makassar terjadi intensif sebelum perjanjian Bungaya. Interaksi Buton-Gowa (Makassar) terjadi baik secara ekonomi maupun politik. Kendali Makassar atas Buton dapat dilihat pada sejumlah catatan harian kerajaan Gowa Tallo, di mana Buton selalu membayar upeti kepada Gowa.⁴⁶

Hubungan Buton dengan Bone makin intensif pasca perjanjian Bungaya. Hubungan yang sama berlaku juga dengan Kerajaan Luwu. Keterkaitan antara Buton dan Bugis (Bone) dapat ditemukan pada sejumlah nama jabatan dan tempat di Buton. Nama seperti sapati Baluwu dan Bone-Bone dapat ditemukan dalam struktur pemerintahan dan wilayah kesultanan Buton. Relasi Buton dengan Ternate dapat ditemukan juga pada jejak Islam di Buton. Sejarah Buton mencatat bahwa Islam di Buton diajarkan melalui oleh syekh Abdul Wahid yang datang dari Ternate.

⁴⁶ (Zuhdi et al., 1996a, p. hlm. 71-72)

BAB III

REMPAH, KOLONIALISME, DAN SISI LAINNYA

3.1. Rempah dan Kolonialisme

Sepanjang sejarah, rempah yang ada di Nusantara telah menjadi “gula manis” yang dicari banyak pihak untuk dimiliki dan dikuasai. Efek rempah Nusantara kemudian membuka ruang yang luas bagi hadirnya bangsa-bangsa di dunia dengan beragam cara. Sebagian dari cara itu adalah dengan melakukan hegemoni atas penguasa lokal, komoditas rempah, dan juga jalur-jalur perdagangannya (Djono et al., 2020; Sartono Kartodirdjo, 1982, 1993). Upaya itu terus diperjuangkan dalam waktu yang panjang. Bangsa-bangsa yang memperebutkannya pun lebih banyak, tergantung dari posisi mereka dalam perdagangan rempah. Banyaknya bangsa yang mencari rempah eksotik itu telah memperlihatkan posisi mereka dalam sejarah rempah Nusantara. Cina misalnya, lebih *soft* dengan keunggulan komparatif yang dimiliki.

Upaya menguasai jalur rempah Nusantara telah dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia seperti India, Cina, dan juga Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Belanda. Tampil sebagai penguasa utama dari kompetisi itu adalah Belanda di bawah Gubernur Jenderal J.P. Coen melalui perusahaan *Vereenigde Oostindische Compagnie/VOC* (Oostindie & Paasman, 1998). Pada awal abad XVII sampai akhir abad XVIII, VOC menguasai perdagangan rempah Nusantara dan kekayaannya jauh melampaui perusahaan Google dan Apple di masa kini. Kenyataan itu menunjukkan bahwa sebagian besar harta dari perusahaan Belanda berasal dari Nusantara yang dihasilkan dari monopoli perdagangan rempah.

Jalan panjang sejarah rempah yang diperebutkan itu kemudian menyeret pusat produksi remah-rempah dunia (Banda dan Kepulauan Maluku serta wilayah sekitarnya) dalam pusaran konflik dan perang. Konflik dan perang ini tidak saja melibatkan bangsa-bangsa Eropa, tetapi juga kekuatan-kekuatan lokal. Persekutuan dan aliansi juga mewarnai upaya membangun kekuatan di

Kepulauan Maluku dan sekitar wilayah produsen rempah seperti VOC-Bone-Ternate-Buton melawan upaya dominasi Makassar pada 1660-an (Leonard Y. Andaya, 2004). Demikian juga upaya menguasai pusat produksi rempah yang melibatkan tentara bayaran Jepang, Inggris, dan Belanda telah melahirkan ketegangan dan memicu terjadinya perang rempah (*spice war*) atau dalam beberapa literatur dikenal dengan *Ambon Massacre* (Pembantaian Ambon). Beberapa kajian menyebut kejadian ini sebagai perang Amboyna (Bassett, 1960; Chancey, 1998; Games, 2011).

Perang Amboyna tidak hanya membawa dampak pada wilayah Ambon, tetapi juga wilayah sekitarnya yang bergantung pada perdagangan rempah. Gaynor, misalnya, telah meneliti perubahan politik di Tiworo dan menemukan ada pergantian majikan politik di wilayah itu dari Makassar (Gowa) ke Bugis (Bone) setelah VOC-Ternate-Bone (Gaynor, 2017b; Xu, 2020). Bone bersama Ternate dan VOC telah menjadi kekuatan baru dan menjadi penghalang dominasi Makassar. Konflik terus terjadi di wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di wilayah pengaruh Makassar seperti Buton dan sepanjang pantai timur Pulau Sulawesi. Relasi politik penguasa lokal dengan VOC-Bone dan Ternate demikian dominan. Kesultanan Buton begitu dekat dengan ketiganya karena di satu sisi mendapat perlindungan, tetapi disisi lain ikut menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan politik yang sedang berlangsung. Kesultanan Buton dan para pembesarnya memanfaatkan situasi ini dengan berdagang seluas dan sejauh mungkin bersama-sama dengan orang-orang Bugis, Mandar, Melayu, dan Jawa.

3.2. Sisi Lain dari Jalur Rempah di Jalur Manila: Jejak Cina dalam Perdagangan Rempah

Hingga kini masih sulit menemukan kajian khusus oleh orang Indonesia dan mungkin Asia Tenggara tentang kehadiran dan keterlibatan Cina dalam perdagangan rempah di Nusantara. Salah satu sebab dari situasi ini adalah penguasaan dan pembacaan sumber-sumber Cina, Spanyol, dan Portugis. Bahasa dari tiga negara yang ikut menjadi kompetitor VOC Belanda saat menguasai perdagangan rempah di Maluku tidak banyak dikuasai sejarawan Indonesia. Penguasaan bahasa ini tampaknya menjadi persoalan serius bagi sejarawan Indonesia. Akibatnya, kajian sejarah yang bersentuhan dengan tiga negara itu jarang dilakukan, khususnya Cina, Spanyol, dan Portugis. Hal ini menyebabkan kajian tentang relasi rempah dengan ketiga negara ini sangat sulit ditemukan. Bagian ini secara khusus disertakan untuk mengisi

sebagian kecil dari temuan data tentang kehadiran Cina dalam perdagangan rempah khususnya melalui Jalur Manila. Jalur ini membentang dari Kawasan Kepulauan Maluku ke Utara sampai ke Laut Zulu, kemudian terus ke utara sampai di Guangzhou Cina (Cook, 2020; Guanmian Xu, 2020; We Koh, 2013).

Jalur Maluku-Manila (dan Guangzhou) telah membuka tabir tentang kehadiran dan peran Cina dalam perdagangan maritim rempah. Jalur ini juga memperkaya akses kepulauan Maluku sebagai pusat produksi rempah utama di Nusantara. Hal ini membuat Maluku sebagai pusat dunia karena komoditas perdagangan paling dicari tidak terbantahkan (Leonard Y. Andaya, 2015). Akses rempah pada periode itu benar-benar luas, sehingga pada saat bersamaan, bangsa-bangsa yang mempunyai kekuatan memperebutkan Maluku untuk dikuasai dengan beragam cara. Cara-cara yang dilakukan di antaranya pemberian hadiah dan juga ada yang memakai jalan kekerasan, seperti terjadinya perang rempah atau perang Amboyna pada 1623.



Gambar 3.1. Peta Jalur Perdagangan Maritim Cina Melalui Jalur Manila

Sumber: diolah dan diadaptasi dari What exactly is the spice route,

link: <https://amazingjourneys.net/blog/what-exactly-is-the-spice-route>; Environmental Science and Pollution Research, Map of Southeast Asia, **Link:** <http://www.freeworldmaps.net/asia/southeastasia/political.html>

Jalur perdagangan maritim Cina melalui jalur Manila telah menambah dan melengkapi studi-studi yang sudah ada. Sebagaimana tampak pada Gambar 3.1 tentang peta jalur perdagangan rempah yang sudah ada dan yang telah ditambahkan dengan jalur Manila, tampak jalur perdagangan rempah semakin utuh direkonstruksi. Jalur perdagangan ini menunjukkan tiga hal. *Pertama*, jalur ini merupakan jalur efektif bagi perdagangan maritim Cina dengan Kepulauan Rempah Maluku. *Kedua*, jalur ini mengungkap kehadiran Cina dalam perdagangan rempah jauh lebih intensif dari apa yang diperkirakan selama ini. Dan *ketiga* dan yang paling penting adalah keterhubungan pusat-pusat perdagangan maritim di Zulu Zone, Guangzhou, dan Kawasan Kepulauan Maluku. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa keterlibatan Cina dalam perdagangan maritim telah berlangsung lama bersama-sama dengan bangsa India dan Arab, serta sebelum kehadiran orang-orang Eropa ke Nusantara.

Realitas di atas juga membuktikan bahwa jalur rempah di utara Nusantara yang dikuasai China terhubung dengan baik dengan jalur-jalur lainnya yang aktif seperti ke Pasifik dan Asia Tenggara melalui pantai timur Pulau Sulawesi, Laut Flores, Laut Jawa, hingga selat Malaka, untuk selanjutnya menuju India, Afrika, dan Eropa. Demikian juga sebaliknya, jaringan perdagangan rempah itu menimbulkan efek di wilayah-wilayah yang dilalui seperti perkembangan kota dan munculnya pusat-pusat ekonomi baru.

Kehadiran Cina di Kepulauan Maluku (Guanmian Xu, 2020) telah menjadi penengah dan mediator bagi pihak-pihak yang berkonflik dalam memperebutkan hegemoni, terutama relasi antara penguasa lokal (Ternate) dan bangsa-bangsa Eropa. Salah satu temuan Xu adalah diterimanya hadiah bedil dari orang-orang Eropa sebagai bagian dari cara melindungi kerajaan dan menyerang musuh. Sebelumnya, raja atau sultan Ternate tidak mengidahkan hadiah ini, mungkin karena operasional dan cara penggunaannya yang dianggap rumit dan berbahaya. Selain itu, orang-orang Cina telah menjadi pemasok cengkeh dan pala bagi para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Portugis, dan Spanyol melalui Filipina. Xu menganggap situasi itu terjadi karena VOC Belanda menjalankan politik laut tertutup (*sea closed politic*) bagi semua orang dan dikecualikan bagi para pedagang Cina yang mempunyai armada Perahu (*Junk*) dalam jumlah memadai (Guanmian Xu, 2020).

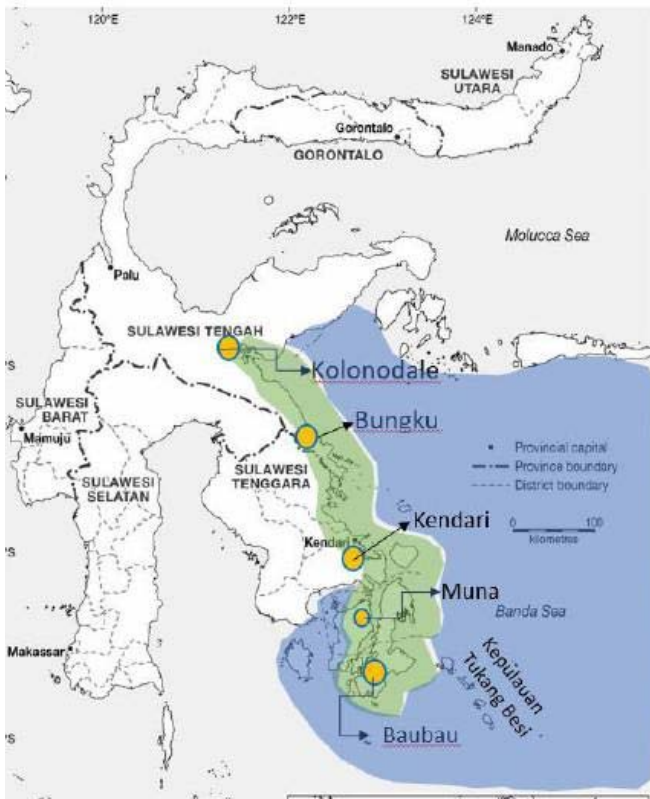
3.3. Relasi Global di Pantai Timur Sulawesi Timur

Untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam sejarah dapat mengacu pada beberapa pendapat, salah satunya berasal dari Immanuel Wallerstein yang mengungkapkan teori hubungan pusat dengan pinggiran (*core-periphery*). Pinggiran dapat menjadi pendukung pusat pertumbuhan. Dalam beberapa kasus, wilayah pinggiran dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru manakala pusat tidak mampu mempertahankan dominasinya di pinggiran. Akan tetapi, disisi lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di pinggiran dapat membuka jalan baru bagi pusat untuk menghegemoni pinggiran, terutama ketika pusat (yang lama) atau penguasa baru melakukan perubahan kebijakan atau ada perkembangan baru di pinggiran yang sangat penting bagi pusat. Pendapat ini sejalan dengan kebijakan *hongitochten* yang menghegemoni pinggiran melalui kebijakan penebangan pohon rempah untuk menjaga harga rempah. Dalam kasus wilayah pantai timur Sulawesi Timur, penemuan hasil tambang dan kontribusi produksi kayu jati di Muna ikut mengubah pandangan pemerintah Hindia Belanda (pusat) untuk melakukan hegemoni yang lebih jauh dan dalam pada wilayah itu.

Wilayah pantai timur Sulawesi Timur dalam sejarahnya menjadi pinggiran dari Ternate dan Gowa-Bone dalam rentang periode masing-masing. Akan tetapi, sejak campur tangan pemerintah Hindia Belanda lebih dalam, termasuk perlindungan dan kendali ekonomi terjadi secara intensif di kawasan ini, terjadi perkembangan baru, yakni adanya penemuan potensi ekonomi berupa komoditas yang dapat diekspor dari zona ini. Dengan potensi ekonomi berupa penemuan komoditas ekspor itu, kawasan itu segera mendapat perhatian serius setelah penandatanganan pernyataan pendek (*Korte Verklaaring*) pada 1906 oleh Sultan Buton La Ode Muhammad Falihi dan Wakil Pemerintah Hindia Belanda A. Broegman. Perjanjian itu juga menandai berlanjutnya monopoli kolonial atas sumber-sumber ekonomi. Pada saat yang sama, Sultan Buton bekerja sama dan memanfaatkan warga lokal untuk sektor tenaga kerja, perkapalan rakyat, dan profesi lain yang tidak dapat diisi oleh orang-orang Eropa (A.M. Zahari, 1990; Zuhdi, Susanto, Ohorella, G.A., Said, 1996).

Selain itu, pusat-pusat ekonomi baru yang berkembang sejalan dengan aktivitas kolonial di pantai timur Sulawesi meliputi wilayah Kolonodale, Bungku, Kendari, Raha, dan Buton (Baubau). Zona-zona ini pada perkembangannya

telah menjadi pusat-pusat kekuasaan, ekonomi, dan tumbuh menjadi kota-kota pantai. Pusat-pusat ekonomi baru ini dapat dilihat pada gambar 2.1. (peta pulau Sulawesi). Kawasan pusat-pusat ekonomi baru itu mempunyai ekologi yang cocok untuk penanaman rempah seperti pala dan cengkeh. Pohon rempah itu dengan mudah dapat ditemukan di Pulau Buton, Bungku, Muna, Kendari, dan Kolonodale. Realitas itu menunjukkan bahwa kawasan ini telah menjadi bagian dari perdagangan rempah dan terlibat aktif dalam sistem ekonomi kolonial. Masuknya kawasan ini dalam wilayah yang wajib menjalankan *hongitochten* memperkuat argumen bahwa kawasan ini bukan wilayah yang sepi. Wilayah ini menjadi salah satu kawasan aktif dalam sistem ekonomi pada periode itu. Kondisi tersebut semakin meluas sejalan dengan penemuan sumber-sumber ekonomi baru di pantai timur Sulawesi Timur.



Gambar 3.2. Peta Pusat-pusat Ekonomi Baru di Pantai Timur Pulau Sulawesi

Sumber: diolah dan diadaptasi dari peta Pulau Sulawesi.

Dilihat dari Gambar 3.2. menampilkan pusat-pusat ekonomi baru di pantai timur Sulawesi Timur. Pusat-pusat ekonomi baru ini pada perkembangannya telah menjadi kota-kota pantai. Dukungan sumber daya bagi perkembangan kota adalah sumber daya ekonomi setelah dominasi komoditas rempah. Penemuan dan eksploitasi sumber daya ini kemudian menciptakan jejaring baru bagi pemasaran komoditas, khususnya di kota-kota di Jawa, Asia Tenggara, Arika dan sampai di Eropa, seperti Belanda dan Inggris.

Selain rempah, sumber-sumber ekonomi baru yang ditemukan dan dikembangkan di pantai timur Sulawesi Timur sepanjang 1900an-1920an berupa pertambangan (aspal dan nikel), peternakan atau budidaya mutiara, produksi ikan kering, penyelaman lola, teripang, dan mutiara. Selain itu, terjadi juga eksploitasi hutan dan pengembangan peternakan. Di bidang agronomi, pemerintah kolonial mengembangkan penanaman kelapa dan kapas. Kelapa diproduksi untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dan diekspor ke pasar internasional. Sedangkan kapas digunakan untuk mendukung produksi tenun lokal dan juga diekspor ke pasar internasional. Pengelolaan kayu jati dan kayu lainnya digunakan untuk kebutuhan tiang listrik dan sebagian lainnya diekspor ke Arika untuk bantalan rel kereta api. Hasil dari pengelolaan dan penjualan komoditas itu sebagian kecil diserahkan ke kas pemerintahan daerah dan sebagiannya yang lebih banyak digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda (Rabani, 2010b, 2021).

BAB IV

KESINAMBUNGAN: TUMBUHNYA PUSAT-PUSAT EKONOMI BARU

4.1. Perluasan Ekonomi Kolonial

Hasil penelitian Thomas Lindblad, J. Touwen, Nahdia Nur, Asrawati, dan ahli sejarah ekonomi luar Jawa lainnya menyepakati bahwa aktivitas kolonial yang dilakukan di luar Jawa lebih sebagai ekspansi dan bagian dari perluasan ekonomi yang telah dilakukan di Jawa. Meskipun demikian, riset ini lebih melihat bahwa yang dilakukan pemerintah kolonial di luar Jawa, secara khusus merupakan suatu proyek baru, karena selain lokasi juga ada instrumen baru berupa perkapalan dan pengangkutan yang lebih intensif.

Selain itu, sejumlah anggaran dikeluarkan untuk menjalankan proyek beserta aktivitas, termasuk eksploitasi sumber-sumber ekonomi baru setelah tunduknya penguasa lokal kepada pemerintah kolonial. Salah satu contohnya adalah pembangunan pelabuhan dan eksploitasi hasil hutan, pertambangan, dan pembangunan fasilitas kota. Bersamaan dengan itu, upaya menjalankan pendidikan, penelitian, eksplorasi, dan eksploitasi dijalankan dengan cepat di Sulawesi, termasuk penyebaran agama melalui misi zending. Ahli pertambangan dan pertanian dikirim untuk meneliti bahan mineral, kemungkinan kandungan minyak, biji besi, dan sejumlah komoditas yang bisa dikembangkan, khususnya di Sulawesi.

Realitas tersebut dikaitkan dengan kebijakan Pax-Neerlandica menunjukkan misi Belanda menjadikan satu wilayah (Indonesia) berada dalam satu pemerintahan. Artinya, seluruh wilayah berada dalam pengawasan dan pengendalian pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian, Belanda bebas mengatur wilayah dan pemerintahan lokal sebagaimana yang pernah dilakukan dengan melakukan perubahan pada penataan wilayah di Sulawesi, khususnya.

4.1.1. Ekspansi Militer dan Kepentingan Ekonomi

Ekspansi militer, atau dalam sumber Belanda dikenal dengan ekspedisi, yang dimaksud dalam riset ini mempunyai dua pengertian, khususnya dalam konteks era kolonial. Pengertian pertama terkait dengan ekspedisi militer, dan yang kedua terkait dengan ekspedisi perjalanan. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah pada kedua pengertian itu, karena ekspedisi militer telah dijalankan pada periode menjelang akhir abad XIX dalam rangka mengurangi sejumlah gangguan sosial, politik, dan ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Pada awal abad XX, khususnya setelah ditandatanganinya pernyataan pendek (*korte verklaring*) oleh kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi, seperti Kerajaan Bone, Buton, Muna, Laiwui, Bungku, dan Mori, menandai secara sah (*de jure*) bahwa Belanda sebagai penguasa tertinggi di sisi Sulawesi.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah Hindia Belanda melakukan integrasi kawasan pantai timur Pulau Sulawesi dalam satuan administratif dengan nama *Oost-Celebes* dan penataan birokrasi lainnya. Fakta itu membuka jalan bagi pengertian kedua, yakni ekspedisi dalam rangka mendeteksi sumber-sumber ekonomi. Aktivitas itu semakin meningkat ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum pernah didatangi. Pejabat pemerintah juga melakukan kerja etnografis, pemetaan, dan penelitian efektif terhadap potensi sumber daya alam dan sosial. Sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi, sementara sumber daya sosial sebagai tenaga kerja dan basis agama, khususnya Kristen dan Katolik melalui pendidikan dan pengobatan.

Pejabat yang melakukan pengajaran dan penyebaran agama melalui “sampul” misi zending adalah mereka yang melakukan riset, pemetaan, dan eksplorasi sumber daya alam. Sebagai gambaran, pejabat seperti Adriani, Abendanon, Trevers, A. Kruijt, dan lainnya adalah kaum cendekiawan Belanda dari berbagai disiplin. Tugas mereka ke Indonesia di atas kertas tertulis menjalankan misi agama, tetapi pada kenyataannya di dalam dokumen mereka melaporkan hasil perjalanannya berbasis etnografi yang juga mencakup geologi di Sulawesi. Artinya, peta sumber daya alam dan sosial dengan jelas digambarkan detail. Penemuan bahan tambang seperti aspal, biji besi, dan nikel adalah hasil kerja para ilmuwan tersebut, yang jauh dari sekadar tugas dengan label misi mengajarkan agama kepada penduduk setempat.

Ekspedisi pemerintah kolonial Belanda sebagaimana tertulis dalam dokumen sezaman,⁴⁷ biasanya terkait dengan pemaksaan terhadap penguasa

⁴⁷ (Rutten, 1932)

lokal yang tidak patuh pada perjanjian sebelumnya. Hal semacam ini terjadi saat ekspedisi militer yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda ke Bone pada 1824-1825.⁴⁸ Demikian juga, ekspedisi ke Mori,⁴⁹ dengan latar belakang yang sama, bahkan dalam ekspedisi tersebut, Belanda menemui rintangan kuat, selain melawan prajurit Kerajaan Mori, Belanda juga mendapatkan perlawanan verbal berupa pernyataan dari para petinggi Kerajaan Mori bahwa akan menyerah dan tunduk pada Belanda bila ada restu dari Kesultanan Bone.⁵⁰

Selain itu, ekspedisi militer dilakukan untuk menguasai berbagai gangguan atas perkapalan dan perdagangan yang dilakukan pemerintah. Dalam kasus ini, biasanya terkait dengan penumpasan secara militer pada bajak laut yang selalu mengganggu perdagangan dan perkapalan pemerintah kolonial Belanda. Laporan-laporan politik yang dimuat dalam BKI pada medio abad XIX sangat jelas menunjukkan adanya gangguan bajak laut pada sejumlah aktivitas ekonomi Belanda, khususnya di Sulawesi dan Kepulauan Maluku. A.B. Lopian⁵¹ dan Esther Velthoen⁵² dalam kajiannya jelas memaparkan kuatnya perlawanan bajak laut yang diduga di bawah komando Kesultanan Ternate, seperti bajak laut Tobelo dan Mindanao serta Balangingi di bawah kendali Kerajaan Sulu⁵³. Bajak laut itu melakukan perampasan terhadap kapal-kapal Belanda yang melakukan pengangkutan (paket) komoditas antarpulau. Singgih Tri Sulistiyono menyebutnya sebagai perdagangan antardaerah dan antarpulau⁵⁴ dalam jangkauan perdagangan internasional, mengingat jalur KPM yang mencapai Eropa, Asia Timur, Asia Barat, dan Eropa.

⁴⁸ (Herfkens, 1900)

⁴⁹ (Uhlenbeck, 1861)

⁵⁰ Uhlenbeck, *ibid.*

⁵¹ (Lopian, 2011)

⁵² Esther Velthoen, "Contested Coastlines: Diasporas, Trade and Colonial Expansion in Eastern Sulawesi 1680-1905" (Australia, Murdoch University, 2002); Esther J. Velthoen, "Wanderers, Robbers, and Bad Folk: The Politics of Violence, Protection and Trade in Eastern Sulawesi 1750-1850," in *The Last Stand of Asian Autonomies: Responses to Modernity in the Diverse States of Southeast Asia and Korea, 1750-1900*, ed. Anthony Reid (St. Martin's Press, 1997), 367-88; Esther J. Velthoen, "Sailing in Dangerous Waters: Piracy and Raiding in Historical Context," *IIAS News Letter*, March 2005; Esther J. Velthoen, "Pirates in Periphery: Eastern Sulawesi 1905," in *Pirates, Ports, and Coasts in Asia, Historical and Contemporary Perspectives*, ed. John Kleinen and Manon Ossweijer (Singapore: ISEAS, 2010), 200-221.

⁵³ (Amirell, 2017; Lopian, 2003; E. J. Velthoen, 2005; Warren, 2007)

⁵⁴ Singgih T. Sulistiyono, "Perkembangan Pelabuhan Cirebon Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon 1859-1930" (Universitas Gadjah Mada, 1994); Singgih Tri Sulistiyono, "The Expulsion of KPM and Its Impact on the Inter-Island Shipping and Trade in Indonesia, 1957-1964," *Itinerario* Volume 30, no. Issue 02 (July 2006): 104-28, <https://doi.org/doi.org/10.1017/S016511530001398X>.

4.1.2. Riset

Ketika membuka dokumen berbasis laporan hasil penelitian yang diterbitkan pemerintah mengenai pantai timur Pulau Sulawesi, terlintas pertanyaan mengapa Belanda melakukan riset yang detail tentang kedalaman laut, spesies, posisi karang, kandungan garam, dan oksigen bawah laut? Penelitian tersebut kemudian dideskripsikan dan disertai sketsa peta yang memadai. Ada dua jawaban mendasar atas pertanyaan penulis. *Pertama*, terkait dengan keamanan jalur pelayaran perkapalan kolonial, khususnya untuk kepentingan ekspedisi (ruang pelabuhan). Hal itu tergambar jelas dalam deskripsi dan peta yang dibuat dilengkapi dengan menuliskan kedalaman laut di semua karang dan sekitar pantai.⁵⁵ Jawaban *kedua* adalah pemetaan sumber daya laut dan posisi geografisnya. Jawaban kedua ini tergambar pada pengukuran kadar garam, sulfur, dan kemungkinan kandungan minyak bumi bawah laut.⁵⁶

Penelitian di Sulawesi tidak hanya di sisi laut, tetapi juga pada sisi darat atau pedalaman. Data atas hasil penelitian itu berupa keadaan ekologi, geologi, lingkungan, penyakit, dan sosial kemasyarakatan. Laporan-laporan tertulis sebagaimana yang dimuat dalam publikasi resmi pemerintah mengindikasikan riset itu dilakukan. Laporan juga mengungkap praktik budaya, keagamaan masyarakat setempat, sumber daya yang bisa menjadi komoditas ekonomi. Kategorisasi yang dibuat dalam laporan serah terima dan laporan perjalanan adalah fakta paling nyata atas adanya penelitian pada kondisi setempat. Kondisi alam, penduduk, kepercayaan, sumber ekonomi, dan tradisi adalah yang paling umum dilaporkan pejabat pemerintah di wilayah penugasannya. Kemungkinan penyebaran agama Kristen melalui misi zending juga dilakukan oleh “tokoh-tokoh agama”⁵⁷ van der Klift, Adriani, Abedanon, dan Albert C. Kruijt.⁵⁸

⁵⁵ J. M. Phaff, “Kustbeschrijving van den Oost-Indischen Archipel,” in *De Zeeën van Nederlandsch Oost-Indië*, ed. Van der Stock (Leiden: E.J. Brill, 1922), 359–94; P.B. van Staden ten Brink, *Zuid-Celebes; Bijdragen Tot de Krijgsgeschiedenis En Militaire Geographie Aan de Zuidelijke Landtong van het Eiland Celebes, Ten Dienste van Officieren Der Land- en Zeemagt* (Nederlands: Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1884).

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Penulis memberi tanda kutip pada frase “tokoh-tokoh agama” itu karena dalam kenyataannya sebagaimana yang terekam dalam laporan-laporan yang mereka buat, tampak bahwa mereka sebagian adalah lulusan Universitas Utrecht dan mereka juga adalah ahli geologi dan pertambangan (Abedanon). Karena itu, penugasan mereka ke Sulawesi tidak sekadar dalam konteks misi agama, tetapi mereka juga melakukan penelitian, pemetaan, dan eksplorasi sumber daya yang ada di wilayah kerjanya. Penyebaran agama pada titik tertentu dapat disebut sebagai media adaptasi ke dalam masyarakat lokal Sulawesi, khususnya Sulawesi Timur.

⁵⁸ A. G. en H. Van Der Klift—Snijder, *La Matoengga* (Rotterdam: Nederlandsche Zendingvereening, 1920); H. van der Klift, “De Ontwikkeling van het Zendingswerk op Z. O. Celebes,” *Tijdschrift voor Zendingwetenschap “Mededeelingen”* 77ste JAARGANG (1933): 161–77.

Penelitian yang dilakukan oleh para tokoh itu terletak di sisi darat Pulau Sulawesi, khususnya di wilayah yang mereka sebut sebagai *Midden Celebes*, *Oost Celebes*, dan *Zuid-Oost Celebes*. Penelitian tersebut antara lain menemukan sumber daya alam yang ikut mereduksi citra kawasan itu dari dikesankan “miskin” menjadi wilayah yang mempunyai potensi kemakmuran dan membawa keuntungan ekonomi pemerintah kolonial. Sumber daya yang dimaksud adalah pertambangan aspal yang ada di Lawele, Waisoe, Wariti, dan Kabungka yang berada di distrik Pasar Wajo, meskipun diakui bahwa penemuan produk tambang berupa aspal itu berasal dari informasi dari warga setempat.

Penemuan lain dari hasil penelitian seperti hasil hutan berupa rotan dan kayu jati. Kayu jati ditemukan di Rumbia dan Muna. Daerah persebaran kayu jati ini mencapai ribuan hektare (*ha*). Penanaman jati di Muna dan sebagian Pulau Buton berdasarkan beberapa sumber dinyatakan bahwa pohon jati itu ditanam dengan bibit yang berasal dari Sumbawa. Sementara bibit jati dari Jawa hasilnya tidak berkembang baik. Data itu diperoleh dari penelusuran saksama karena areal hutan banyak ditumbuhi kayu jati. Pada perkembangannya dan pasca-eksploitasi, jati di Muna ditanam kembali dengan bibit Jati dari Sumbawa karena secara ekologi cocok. Beberapa percobaan pemerintah menanam bibit jati dari Jawa, hasilnya tidak berkembang baik, termasuk di yang diuji coba di Maros, Sulawesi Selatan.⁵⁹

Komoditas lain yang ditemukan dalam penelitian adalah areal penanaman/perkebunan kelapa untuk produk kopra. Pemerintah membuka lahan perkebunan kelapa di Muna, tepatnya di Tobeia dan Lohia, wilayah Muna Utara. Terdapat dua areal perkebunan di wilayah itu, yakni perkebunan Tamponabale 1 dan 2.⁶⁰ Pembukaan perkebunan ini menjadi bagian dari pengembangan komoditas yang dilakukan pemerintah kolonial untuk memenuhi kebutuhan kopra dunia dan industri pengolahan minyak kelapa. Kelapa atau kopra juga dapat dijadikan sebagai bahan baku sabun dan kecap. Oleh karena itu, produksi kelapa pada periode 1930-1960an sejatinya untuk keperluan industri minyak kelapa dan kebutuhan industri rumah tangga lainnya.

4.1.3. Eksplorasi dan Eksploitasi

Korte Verklaring yang ditandatangani oleh sultan Buton pada 1906 telah menjadi pintu masuk bagi pemerintah Belanda untuk melakukan eksplorasi

⁵⁹ (Couvreur, 1935a) Lihat juga, (Engelhard, 1884, p. 275)

⁶⁰ (Rabani, 2010a)

dan eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam yang menonjol seperti kayu jati di Pulau Muna, tambang aspal di Lawele, Wariti, Waisoe, dan Kabungka (Pasarwajo) di Pulau Buton,⁶¹ bijih besi/nikel di Pomala dan Bungku sudah direncanakan untuk dieksploitasi.⁶²

Rencana eksploitasi hutan jati beserta kompensasi yang diberikan kepada pemerintah kesultanan Buton telah diatur oleh pemerintah Belanda. Pembayaran kompensasi itu dilakukan pemerintah kolonial Belanda sebagai ucapan terima kasih dan sebagai bantuan kepada pemerintah lokal atas hilangnya sumber pendapatan yang berasal dari penjualan kayu jati di Pulau Muna.⁶³ Selain itu, warga setempat juga diperbolehkan dan dijamin oleh pemerintah untuk mengambil kayu dengan bebas sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah.⁶⁴

Dalam perkembangannya, pengelolaan dan eksploitasi kayu jati di Raha, Pulau Muna dilakukan oleh perusahaan Vejahoma. Perusahaan kayu Vejahome berpusat di Jawa. Eksploitasi ini dilakukan di bawah pengawasan pemerintah kolonial dan keuntungannya juga dinikmati pemerintah kolonial. Pemerintah setempat mendapatkan bagian hanya sebagai ucapan terima kasih, yang besarnya tergantung dari pemerintah kolonial Belanda. Tidak diketahui alasan yang cukup mengapa kompensasi dari hasil hutan jati di Muna kepada pemerintah lokal ditentukan secara sepihak dan tidak diatur dalam rencana eksploitasi yang diterbitkan pada 1904.⁶⁵

Pada 1909, dilakukan investigasi areal kayu jati di Muna. Hasil investigasi itu memperkirakan luas hutan jati adalah 45.000 hektar. Akan tetapi, setelah dilakukan penelitian secara saksama, ditetapkan luas hutan yang berisi kayu jati adalah seluas 73.573 hektar.⁶⁶ Kualitas jati disebutkan tidak semuanya bagus, tetapi juga ada yang lebih baik dari kayu jati Jawa, khususnya tingkat kepadatan serat dan usia jati telah tua yang ditandai dengan diameter pohon.⁶⁷

⁶¹ Bothe, "De Asfaltgesteenten van het Eiland Boeton, Hun Voorkomen en Economische Beteekenis."; lihat juga Steevensz, "De Asphaltgesteenten van Het Eiland Boeton, Hun Voorkomen en Economische Beteekenis."

⁶² Frijling, "Afbakening van Hét Gebruik, Te Maken van Artikel 3 Der Korte Verklaring, Bijlage 7. Missive van Den Wd. Directeur van L (Gouvernements Renvooi van 25 d.a.v. No 28 (Gouvernements Renvooi van Den 25sten d.a.v. No. 28411), Houdende Voorstellen Met Betrekking Tot Het van Gouvernementswege in Geregeld Beheer en Exploitatie Nemen van de Bosschen in Het Landschap Boeton van Het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden.," hlm. 57–60.

⁶³ (Landbouw, 1913, p. hlm. xii dan 279.)

⁶⁴ (F. Frijling, personal communication, February 12, 1909, p. hlm. 59)

⁶⁵ (F. Frijling, personal communication, February 12, 1909)

⁶⁶ (Landbouw, 1910, p. 68) Lihat juga (Blink, 1914, pp. 282–283)

⁶⁷ (Landbouw, 1910, p. Ibid.)

Penelitian lanjutan atas kualitas jati di Muna dilakukan dengan menugaskan ahli hutan, H.J. van Hasselt. Hasil dari penelitian lanjutan van Hasselt adalah kayu jati berkualitas tinggi seluas 15.000 hektar.⁶⁸

Selain jati, pertambangan aspal juga populer sejak deposit aspal ditemukan. Sejumlah koran dan hasil kajian dipublikasikan, khususnya jumlah deposit dan potensi keuntungan dan penggunaan aspal. Kajian dan publikasi tentang aspal tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan negara-negara lain dan dalam negeri untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Berikut ini disajikan data-data mengenai dinamika produksi dan pertambangan aspal di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

Tabel 4.1. Aspal Dunia dan Perusahaan Pengelolaanya

Wilayah Tambang	Ketebalan Lapisan (m)	Sebaran Lapisan (m)	Bintumen (%)	Jumlah (ton)	Kapasitas Produksi (ton)	Perusaan Pengelola
Margerun (Alabama)	0.3-4	3--4	5-8.5	ta	1000	Alabama Rock asphalt Co.
Cherokeestation (Alabama)	1.5-4	3--4	0-15	ta	2000	Rock Asphalt Corporation
Cherokeestation (Alabama)	0.3-17	1.2-5	4-6	ta	1250	Colbert Limerhoek Asphalt Co.
Kyrockky (Kentucky)	3--15	5--18	3-10	ta	1200	Kentucky Rock Asphalt Co.
Uvalde (Texas)	ta	ta	10-20	ta	ta	Kentucky Rock Asphalt Co.
Kabungka (Buton)	0.80-1.20	3--6	13-25	1,2 juta	200	Mijnbouw & Cult. Mij. Boeton
Lawele (Buton)	0-0.8	250	10-30	100 juta	ta	Mijnbouw & Cult. Mij. Boeton

Sumber: Diolah dari A.Chr. D. Bothe, "De asfaltgesteenten van het eiland Boeton, hun voorkomen en economische beteekenis" dalam *De Ingenieur M. Mijnbouw 4. No. 19*, 12 Mei 1928, hlm. M. 38.

Produksi aspal pertama kali dilakukan pada 1924 di Kabungka dengan rata-rata produksi sebesar 140 ton per hari. Dalam perjalanannya, sejumlah masalah dihadapi oleh perusahaan untuk peningkatan produksi. Permasalahan itu antara lain area pertambangan yang mempunyai medan berat seperti banyak kayu yang harus dipotong untuk proses penggalian, berbukit dan jarak antara areal pertambangan dengan pusat pengangkutan (pelabuhan) di Teluk Pasar Wajo mencapai 5 km. Selain masalah itu, terdapat juga masalah tenaga kerja

⁶⁸ (Landbouw, 1910, p. 315)

yang terserang malaria sehingga mengganggu proses produksi, khususnya pada 1930an.

Masalah serius terjadi pada 1931 saat para pekerja meninggalkan areal pertambangan aspal di Kabungka yang jaraknya 15 km dari areal pengapalan di Pasar Wajo. Sebanyak 70 pekerja yang ada melarikan diri ke Palopo, meskipun kemudian bisa dikembalikan. Koran *de Telegraaf* memberitakan bahwa pelarian itu terkait dengan jauhnya areal penambangan dan masih tersedianya aspal sebanyak 15.000 ton yang belum diangkut. Kuat dugaan bahwa pekerja melarikan diri karena merasa berat bekerja di medan yang berat dan juga penjualan aspal yang tidak lancar lagi.⁶⁹

Pada masa-masa yang sulit itu, pemegang saham perusahaan pertambangan dan tanaman Buton (*N. V. Mijnbouw en Cultuur Mij. Boeton*) sebagai perusahaan pemegang konsesi terus mendapat dukungan dari pemerintah Belanda dengan kepastian pengapalan/pengiriman aspal. Sejumlah kapal uap datang ke Pasar Wajo Buton untuk mengangkut ribuan ton aspal. Kapal uap pertama yang mengangkut 1.000 ton aspal dari Buton ke Pasar Wajo adalah s.s. (*stoom schepen*) van der Capelen. Kapal lain di antaranya adalah ss. Amasis dari Jerman yang mengangkut 1.500 ton untuk dibawa ke Amsterdam.

Pada 1930, perusahaan menerima pesanan sebanyak 25.000 ton untuk jangka waktu 6 bulan (1 semester) dan dikirim ke Amsterdam.⁷⁰ Pada 1931, perusahaan juga mendapat tugas dari pemerintah Belanda untuk mengapalkan aspal dari Buton untuk areal seluas 66.000 m untuk sebuah proyek pembangunan jalan di London, Inggris.⁷¹ Sejumlah perkembangan ini ikut menenangkan para investor dan saham perusahaan Pertambangan Buton dapat bertahan pada tren positif.⁷²

Penemuan dan eksploitasi aspal di Pulau Buton telah menyebabkan Buton mengalami proses transformasi dari kondisi sepi menjadi semakin ramai. Para pekerja datang ke Buton dan sejumlah ahli hadir untuk melakukan penelitian pada komposisi aspal Buton. Penelitian itu dibutuhkan perusahaan untuk tujuan pemasaran. Ekstraksi aspal alam tentu tidak cocok untuk semua tipe jalan.

⁶⁹ Lihat, "Boeton Mijnbouw en Cultuur Maatschappij. Op het Kaboengka-terrein wordt thans niet meer gewerkt. – De hoeveelheid asphalt valt tegen. ". *De Telegraaf*. Amsterdam, 1931/03/17

⁷⁰ Lihat "MIJNBOW- EN CULTUUR MIJ. BOETON. Order voor levering 25.000 ton asphalt." dalam *Algemeen Handelsblad*. Amsterdam, 14 February 1930, hlm. 11.

⁷¹ Lihat, "MAATSCHAPPIJ „BOETON. "Een nieuwe opdracht." dalam "Algemeen Handelsblad". Amsterdam, 11 Oktober 1931, hlm. 14.

⁷² Sumber; *Delftsche courant, 02-07-1930*, hlm. 12; juga, *Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant*, 30-06-1930, hlm. 5.

Oleh karena itu, dukungan para ahli diperlukan untuk mendorong peningkatan pemasaran. Aspal Buton dipergunakan untuk jalan di perkotaan Jawa, termasuk yang di pinggiran atau di sekitar pantai. Dalam perkembangannya, penjualan dan pemasaran aspal dari Buton juga digunakan untuk jalan provinsi. Pengiriman ke daerah-daerah perkotaan telah melalui penelitian dulu, sehingga komposisi aspal dan kondisi lingkungan jalan bisa bertahan lama.⁷³

4.2. Aktivitas Komersial

Secara teoritis, suatu wilayah dan masyarakat yang terintegrasi dengan ekonomi dunia memiliki kesempatan yang lebih cepat untuk berkembang, khususnya secara ekonomi. Integrasi ekonomi itu didorong oleh sejumlah faktor, di antaranya, lokasinya berada pada jalur perdagangan komoditas yang dibutuhkan dunia, dan masyarakatnya memiliki kemampuan sebagai faktor penunjang untuk terlibat langsung dalam aktivitas komersial. Faktor alamiah yang menunjang itu adalah keterlibatan dalam produksi, pengangkutan, dan perdagangan komoditas. Kondisi alam dan masyarakat juga ikut terlibat aktif dalam mengalirkan komoditas ke berbagai kawasan dari dan ke pantai timur Pulau Sulawesi dengan perahu layar dan kemampuan navigasi yang dimiliki.

Data ekonomi perdagangan kawasan ini dalam studi sejarah ekonomi tidak banyak diperoleh. Namun tetap ditemukan beberapa sumber, antara lain studi Gerrit Knaap dan Heather Sutherland,⁷⁴ Schoorl⁷⁵, James Fox⁷⁶, Michael Southon,⁷⁷ Edward L. Poelinggomang,⁷⁸ J. Touwen,⁷⁹ David Henley,⁸⁰ Syakir Mahid, Haliadi, dan Wilman D,⁸¹ Haeruddin,⁸² Esther Velthoen,⁸³ dan La Ode Rabani.⁸⁴ Data-data itu diperoleh dari catatan perdagangan sejak era VOC hingga masa kolonial Belanda.⁸⁵

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ (Knaap & Sutherland, 2004)

⁷⁵ (J. W. Schoorl, 1991b)

⁷⁶ (Fox, 1993)

⁷⁷ (Shouton, 1995)

⁷⁸ (Poelinggomang, 2002b) Lihat juga, (Poelinggomang, 2008)

⁷⁹ (Touwen, 1997b)

⁸⁰ David Henley, *Fertility, Food and Fever: Population, Economic and Enviroment in North and Central Sulawesi, 1600-1930* (Leiden: KITLV Press, 2005).

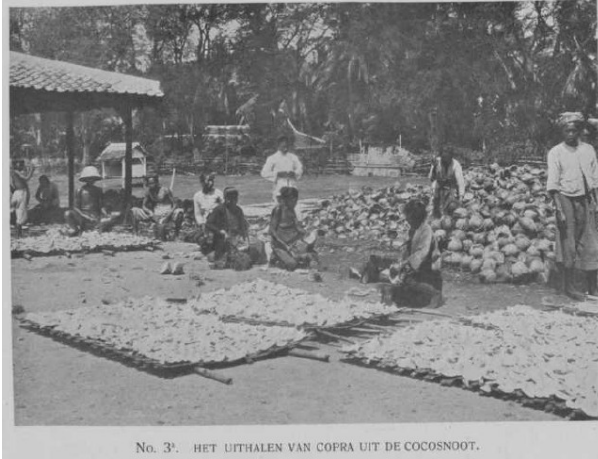
⁸¹ Syakir Mahid, Haliadi Sadi, dan Wilman Darsono, *Sejarah Kerajaan Bungku* (Yogyakarta: Ombak, 2012).

⁸² (Haeruddin, 2013)

⁸³ (E. Velthoen, 2002)

⁸⁴ (Rabani, 2016b)

⁸⁵ Data-data komoditas yang diperdagangkan tidak semuanya berjenis rempah. Ada yang berasal dari hasil hutan seperti kayu dan rotan. Hasil perikanan laut seperti teripang dan ikan kering serta hasil pertambangan berupa aspal dan nikel.



Gambar 4.1. Pengolahan Kopra tahun 1935

Sumber: B. Streefland, *Olie-Industrie in Nederlandsch-Indie*, Batavia-Landsdrukkerij: Mededeelingen van de in Nederlandsch-Indie No



Gambar 4.2. Kopra Kering Kualitas 1.

Sumber: B. Streefland, *Olie-Industrie in Nederlandsch-Indie*, Batavia-Landsdrukkerij: Mededeelingen van de in Nederlandsch-Indie No.4., 1918, hlm 44.

Dari hasil penelitian para ahli di atas, ditemukan bahwa komoditas rempah yang dihasilkan dan diperdagangkan berupa kopra, cengkeh, pala, dan kemiri. Hasil laut yang bisa disejajarkan dengan rempah adalah teripang karena fungsinya sebagai obat dan tentu saja juga sebagai logistik selama pelayaran. Kopra, cengkeh, dan pala adalah yang paling umum dikenal dan dikomersialkan. Dengan tiga komoditas itu, pantai timur Pulau Sulawesi ikut

menyumbang intensitas perdagangan sejak era pemerintah kolonial Belanda. Sampai medio abad XX, komoditi kelapa yang paling dikenal ada di Selayar. Ada dua lokasi perkebunan kelapa yang subur di Muna, yakni di Tamponabale I dan II. Pasar Wajo dan Bungku juga menjadi salah satu penghasil utama kelapa. Kelapa beserta komoditas lainnya seperti kapuk, mutiara, sirip ikan hiu, rotan, dan sejenisnya ikut memberi andil dalam aktivitas komersial bersama-sama dengan komoditas lain seperti hasil hutan, perikanan (mutiara), kayu jati dan besi, serta hasil tambang.

Bagaimana aktivitas komersial mempengaruhi perkembangan kota-kota pelabuhan? Jawaban atas masalah itu sangat kompleks. Akan tetapi secara sederhana, beragam komoditas yang diperdagangkan oleh masyarakat setempat dari dan ke luar pantai timur Pulau Sulawesi seperti Makassar, Surabaya, Johor, dan Singapura menjadi salah satu indikator bahwa perdagangan masyarakat memberikan keuntungan. Dengan pengalaman aktivitas semacam itu, secara tidak langsung memberi spirit bagi masyarakat pantai timur Pulau Sulawesi melakukan beragam cara agar keuntungan dan aktivitas ekonomi rutin dilakukan. Salah satu caranya adalah menyiapkan infrastruktur ekonomi seperti pembukaan perkebunan dan penanaman rempah, pembuatan sarana transportasi, jasa pengangkutan, pembangunan pelabuhan, dan pengetahuan navigasi agar aktivitas komersial terus berlanjut. Model navigasi Bugis (*Zigzag/opala*) dipraktikkan agar aktivitas ekonomi terus berjalan, meskipun angin bertiup dari depan kapal layar.⁸⁶

Pada 1910an, pantai timur Pulau Sulawesi hanya dilayari sekali dalam sebulan oleh kapal-kapal KPM dari jalur utara. Kapal KPM memuat ragam komoditas dari wilayah itu. Kondisi itu terus berlangsung hingga 10 tahun kemudian (1920). Rendahnya kunjungan kapal KPM menunjukkan bahwa kapal-kapal lokal (perahu) menggantikan peran KPM dalam pengangkutan komoditas ke pelabuhan-pelabuhan ekspor seperti di Makassar dan Jawa. Sepanjang 1920an hingga menjelang depresi ekonomi pada 1930, kapal KPM menyinggahi kawasan itu 2 kali dalam sebulan. Peningkatan volume kunjungan kapal KPM ini memberi arti bahwa ada intensitas, ada komoditas yang harus diangkut, dan ada manusia (penumpang) yang melakukan mobilitas dari dan ke pantai timur Pulau Sulawesi. Para pejabat kolonial datang ke pantai timur Pulau Sulawesi seiring dengan kebijakan pembangunan pelabuhan,

⁸⁶ (Ammarell, 1999)

perkembangan kota, misionaris, dan eksplorasi hasil alam yang membentang di Sulawesi, khusus pesisir timur Pulau Sulawesi atau pantai timur Pulau Sulawesi. Dengan demikian, intensitas itu berimplikasi pada penambahan demografi dan bermuara pada perluasan morfologis kota. Kota-kota yang berkembang terkoneksi dengan daerah-daerah yang menguntungkan secara ekonomi. Konektivitas itu berkaitan dengan pasar komoditas dan barang manufaktur yang dibutuhkan masyarakat. Kota-kota dan pelabuhan yang terkoneksi secara luas dengan masyarakat dan kota-kota adalah Makassar, Dili, Surabaya, Batavia, dan Singapura. Konektivitas itu memberi keuntungan pada para pedagang dan pelayar karena muatan kapal ketika kembali dari Makassar, Surabaya, Singapura, dan Batavia penuh dengan bahan pangan, pakaian, dan keperluan (peralatan) rumah tangga yang tidak diproduksi pantai timur Pulau Sulawesi atau di pulau-pulau lainnya di Indonesia bagian timur. Kondisi seperti itu terus berlangsung hingga 1950an.⁸⁷

Kota-kota yang berkembang dari akhir abad XIX sampai medio abad XX adalah Kolodale, Bungku, Kendari, Raha, dan Buton. Kemajuan kota-kota tersebut dipicu oleh perkembangan perdagangan rempah. Perkembangan kota itu sejalan dengan intensifnya hubungan kota-kota dengan daerah lain melalui jalur laut. Pembangunan pelabuhan telah mengefektifkan pengangkutan dan distribusi barang dari dan ke kota-kota pelabuhan. Fasilitas pelabuhan yang memadai tidak saja mendukung aliran komoditas yang makin lancar untuk ekspor, tetapi juga telah mendorong komoditas lain ikut dalam perdagangan. Kayu, rotan, damar, kapuk, mutiara, dan sejenisnya secara bersama-sama diperdagangkan oleh orang-orang lokal, Arab, Timur Asing, dan orang-orang Eropa. Sektor pendidikan dan kesehatan juga dibangun di kota-kota pelabuhan. Pada tahap awal, pendirian pendidikan dan balai pengobatan hanya mendukung kesehatan kerja dan pengetahuan para administrator lokal yang dipekerjakan pemerintah kolonial. Akan tetapi, pada perkembangannya, pemerintah kolonial menggunakan fasilitas itu untuk kepentingan misionaris.

Sebagai sebuah kota yang baru berkembang, peran aktif masyarakatnya tidak bisa dinafikan. Melalui pengamatan dan riset, penulis menemukan bahwa aktivitas pelayaran dan perdagangan masyarakat lokal dengan perahu layarnya memberi andil besar dalam mendorong perluasan morfologi kota. Beberapa aspek lain seperti persoalan *immigration* (migrasi masuk) ke kota-

⁸⁷ (Hadara, 1987)

kota pelabuhan berasal dari daerah-daerah masyarakat Bugis Makassar, yang dalam beberapa hal disebabkan oleh persoalan politik. Pada perkembangannya, masyarakat migran ini beradaptasi dengan masyarakat lokal secara baik, sehingga ketegangan kultural dapat dihindari. Kuat dugaan bahwa keduanya di masa lalu pernah memiliki ikatan kultural yang dekat.

4.3. Pusat-Pusat Baru, Pengembangan Kota dan Pelabuhan

Kota dan pelabuhan dalam arti ekonomi bagai dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan, khususnya pada periode saat perkapalan dan birokrasi menjadi hal dominan. Periode akhir abad XIX adalah periode menguatnya pengangkutan perkapalan dan perahu. Perkapalan diwakili oleh pemerintah dan perusahaan Eropa, khususnya Belanda, sedangkan perahu diwakili oleh orang-orang lokal yang dikendalikan oleh penguasa lokal dan sangat tergantung pada pergerakan angin sebagai sumber tenaga penggeraknya untuk mencapai tujuan atau destinasinya. Untuk pengangkutan dan penumpang, jumlahnya relatif terbatas sebagaimana ditunjukkan dengan jumlah kapal yang dioperasikan oleh KPM dan perusahaan Eropa lainnya.

Pada awal abad XX, pengembangan komoditas mulai menampakkan hasil yang ditandai dengan meningkatnya produksi komoditas di berbagai daerah. Sejumlah perkebunan kelapa sebagai penghasil kopra mulai berproduksi. Khusus untuk perkebunan kelapa dibuka di Tamponabale I dan 2. Perkembangan itu telah mendorong perusahaan perkapalan KPM untuk terus mengintensifkan rutennya dan memperluas ke daerah-daerah yang tidak terjangkau sebelumnya. Frekuensi kedatangan serta keberangkatan pun ditambah.

Pelabuhan yang disinggahi adalah Kolonodale, Bungku, Kendari, Raha, dan Baubau. Beberapa pelabuhan baru levelnya ditingkatkan seiring dengan perkembangan produksi komoditas, dari pelabuhan biasa menjadi pelabuhan ekspor. Yang disebut terakhir terjadi pada pelabuhan Pasar Wajo yang mulai memproduksi aspal sejak tahun 1924. Pelabuhan Raha juga mengalami hal yang sama ketika berjalannya eksploitasi kayu jati dilakukan oleh perusahaan Vejahoma di Raha (di Pulau Muna).⁸⁸ Perencanaan eksploitasinya telah dilakukan sejak tahun 1904.⁸⁹

⁸⁸ (Asrawati, 2006)

⁸⁹ Pada 1904, Pulau Muna secara administratif ada dalam Afdeeling Boeton. Lihat, (F. Frijling, personal communication, February 12, 1909)

Tabel 4.2. Data Komoditas dan pelabuhan-pelabuhan 1920

No	Wilayah	Pelabuhan	Komoditas
1	Boeton (Muna/Raha)	Boeëpinang, Laora, Kabaëna. Talaga, Raha, Lambiko, Napobalano, Wasalarigka, Groot Tobe, Bae-Bae. Sampolawa. Pasar Wadjo. Nambo. Kalingsoesoe. Laboean Balanda. Tampoenable. Kapantore. Wantji. Kalidoepa. Popalia.	Kayu Jati, rotan, aspal, kapok, mutiara, teripang, lola, sarang burung, penyu, kulit ular, kopra, ikan kering, sirip ikan hiu, nikel, cengkeh, pala, mete, kakao, kayu besi, dan sejenis.
2	Laiwoei	Toroboeloe. Kolono. Wawosoengoe. Kendari. La solo.	Nikel, teripang, sirip ikan hiu, mutiara, dan kopra.
3	Boengkoe	Salabangka. Boengkoe. Bahoembeloe.	Nikel, Biji Besi, ikan kering, industri kerajinan (kerajinan dari besi; keris, parang, kampak, dan sejenisnya),
4	Mori	Kolonedale, Onematobe	Kerbau, kambing, ikan, dan teripang

Sumber: diolah dari Staatsblad tahun 1920, no. 817, hlm. 1-3. Juga Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 16 November 1920 No. 34.

Data pelabuhan yang dimasukkan dalam dokumen resmi pemerintah Hindia Belanda pada tabel di atas menunjukkan beberapa fakta. *Pertama*, geliat perdagangan yang terus berkembang. *Kedua*, pelabuhan-pelabuhan itu berlokasi di daerah yang mempunyai komoditas dan orang untuk diangkut. *Ketiga*, banyaknya pelabuhan mencerminkan efektivitas mobilitas barang dan orang dilakukan melalui laut, dan *Keempat* adalah perekonomian dominan ditunjang oleh perdagangan komoditas.

Fakta-fakta di atas sejalan dengan perkembangan baru yang mengemuka sejak awal abad ke-20 di mana hasil eksplorasi, penelitian, dan eksploitasi atas peluang ekonomi baru oleh pemerintah Hindia Belanda. Fakta itu juga mengonfirmasi bahwa penemuan komoditas baru menjadi stimulus atas berkembangnya pelabuhan dan kemudian sebagian di antaranya menjadi kota. Produksi dan perdagangan aspal telah dipandang sebagai pintu masuk bagi modernitas dan akses yang menjadi kunci bagi perkembangan kota dan pelabuhan. Kapal-kapal uap dari berbagai negara datang ke sisi barat untuk mengangkut komoditas pertambangan dan komoditas ekonomi lainnya ke pantai timur Pulau Sulawesi.

Pengembangan komoditas yang sebelumnya endemik seperti kelapa yang menghasilkan kopra, kapuk, mutiara, dan teripang juga telah menjaga kesinambungan produksi dan keberlanjutan ekonomi. Selain itu, penemuan, penelitian, dan eksploitasi komoditas perdagangan juga telah menjadi stimulus baru yang menggerakkan kawasan ini terlibat aktif dalam perdagangan global. Kemampuan navigasi yang dikuasai sebelumnya juga telah menjadi modal utama untuk terlibat aktif dari proses ekonomi yang berlangsung aktif. Banyaknya kehadiran orang-orang dari pantai timur Pulau Sulawesi di berbagai kota pelabuhan di Nusantara diduga kuat karena keahlian mereka dan perlindungan pemerintah Hindia Belanda yang membutuhkan mereka terkait sarana dan pengetahuan yang dimiliki.

Kota-kota utama yang tumbuh karena adanya stimulus komoditas adalah Baubau, Kendari, Raha, Bungku, dan Mori. Kota Kendari tumbuh karena perdagangan beras, kerbau, kopra dari Wawotobi, Unaha, dan daerah sekitarnya. Nikel berasal dari Pomalaa, dan teripang yang dikumpulkan oleh orang-orang Bajo dan Bugis serta diperdagangkan di Teluk Kendari. Meskipun Kota Kendari diketahui sebagai pos militer “pantau” sejak abad XIX untuk mengamankan jalur perdagangan pemerintah kolonial dari gangguan bajak laut di bawah kendali dan kontrol J.N. Vosmaer, tetapi kota ini berkembang ketika perdagangan komoditas semakin berkembang, bahkan menjadi salah satu pusat perdagangan karena lingkungan pelabuhannya yang berada di teluk yang aman dari gangguan badai.

Kota Raha adalah sebuah kota yang berkembang di Pulau Muna. Posisi atau letak Kota Raha ada di selat Buton pada sisi Pulau Muna. Kota ini menjadi penting ketika eksploitasi hutan kayu jati dijalankan oleh perusahaan Vejahoma. Pemerintah Hindia Belanda menjadikan status Muna sebagai *Onder Afdeeling* pada 1920an. Status itu memberi arti bahwa pejabat pemerintah Hindia Belanda setingkat *controleur* wajib ada dan ditugaskan ke Muna. Ibukota dari *Onder Afdeeling* Muna adalah Raha, sehingga Raha menerima beberapa dampak, di antaranya menjadi pusat pemerintahan dan menjadi daerah tujuan migran penduduk dari wilayah sekitarnya. Administrasi juga dipusatkan di Raha, termasuk menjadi pos pemantauan eksploitasi kayu jati di Pulau Muna. Untuk mendukung pemerintahan, perdagangan, dan pengangkutan komoditas dari Pulau Muna, pemerintah mengembangkan Pelabuhan Raha untuk mendukung aktivitas ekonomi di selat Buton dan Pulau Muna.

Koran terbitan Belanda memuat ulasan mendasar tentang penemuan tambang aspal di Pulau Buton dan kontribusi aspal bagi pemerintah dan masyarakat di Pulau Buton. Masyarakat di Pulau Buton sebelum penemuan aspal dikategorikan sebagai penduduk miskin, termasuk juga miskin sumber daya alam. Sejarah kemiskinan masyarakat Pulau Buton di mulai ketika "*hongt tochten*" dijalankan oleh VOC, yaitu saat rempah-rempah yang menjadi penopang ekonomi masyarakat Buton dihancurkan dengan penebangan pohon cengkeh. Periode itu masih berlanjut pada era kolonial di mana orang-orang Buton menjadi pekerja kebun pala di Banda dan cengkeh di Kepulauan Maluku. Orang-orang Buton benar-benar tidak sempat menanam cengkeh di wilayah sendiri usai VOC menghancurkan sumber utama pendapatan mereka. Bekerja di perkebunan cengkeh dan menjadi pelayar antardaerah (pulau) adalah jalan baru bagi mereka. Akan tetapi, jalan itu tidak mampu mengembalikan posisi ekonomi Buton seperti sebelum *hongt tochten* yang dijalankan oleh VOC pada 1620an.

Perubahan ekonomi masyarakat Buton dan sekitarnya terjadi ketika pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan penelitian dan eksplorasi di wilayah yang baru dikuasai berdasarkan pernyataan pendek (*korte Verklaring*) pada 1906. Dua penemuan penting dari eksplorasi itu adalah hutan jati di Muna (saat itu termasuk dalam wilayah Kesultanan Buton) dan tambang aspal di Pasar Wajo, Wariti, Kabungka dan Lawele. Dua komoditas itu oleh Belanda disebut sebagai harapan baru dan percepatan transformasi ekonomi Buton. Buton memperoleh sumber keuangan baru dari komoditas kayu jati dan keuntungan dari hasil penjualan aspal.

Dampak lain dari eksploitasi tambang aspal bagi Buton adalah perkembangan Kota Baubau dan pelabuhannya, termasuk peningkatan status pelabuhan Pasar Wajo menjadi pelabuhan ekspor mulai pada 1930an. Status itu diperoleh sejalan dengan meningkatnya ekspor aspal dari Pasar Wajo ke Amsterdam, London, dan wilayah Hindia Belanda yang membutuhkan aspal untuk perbaikan kualitas jalan, seperti di Jawa. Selain dampak tersebut, Kota Baubau menerima limpahan penduduk dari berbagai wilayah seperti dari Jawa, Bugis, Toraja, Manado, Ambon, dan daerah sekitar yang memanfaatkan peluang ekonomi baru. Kota Baubau juga memiliki kesempatan untuk perbaikan infrastruktur dalam memenuhi fasilitas standar perkotaan pemerintah Hindia Belanda.

Fasilitas standar perkotaan di antaranya adalah lingkungan yang sehat, bebas dari ancaman penyakit, tersedianya listrik, pelabuhan, jaringan jalan,

jembatan, dan sumber air minum yang bersih (PAM). Sampai pada 1920an, Kota Baubau masih menjadi ruang endemik nyamuk *Anopheles*, dan warga kota itu terus mengalami ancaman kematian dari wabah demam berdarah. Untuk mengatasi wabah itu, pemerintah Hindia Belanda melakukan perbaikan lingkungan Kota Baubau. Perbaikan itu antara lain mendesain ulang tata lingkungan kota, lingkungan rumah penduduk, pembangunan saluran air yang lebih lebar dan langsung mengalir ke laut, dan penimbunan rawa-rawa yang menjadi sarang nyamuk *anopheles* dengan tanah. Hasilnya dapat dilihat pada data tabel 4.3.

Tabel 4.3. Data Penderita Malaria di Kota Baubau pada Bulan Januari-Juni 1922 dan 1923

TGL	1922						1923					
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
1	1	1	4	5	5	6	0	0	0	3	1	1
2	4	1	5	7	0	4	0	0	1	2	0	0
3	2	1	6	5	6	5	1	1	1	3	2	1
4	2	3	7	5	4	0	1	1	1	2	1	1
5	2	4	10	4	2	4	2	1	2	2	1	1
6	3	6	8	8	2	0	2	1	0	2	0	0
7	2	6	5	7	2	2	2	1	0	0	2	0
8	2	7	4	8	4	2	2	0	0	0	0	0
9	3	5	4	11	6	3	0	0	1	3	2	0
10	6	6	3	5	6	3	0	2	1	2	2	0
11	3	8	4	7	6	5	0	3	0	1	1	1
12	4	10	6	6	6	4	2	3	0	1	2	1
13	2	9	4	10	6	3	2	7	0	0	2	0
14	0	8	3	10	3	1	1	6	0	1	1	0
15	1	10	4	10	2	1	3	4	0	1	0	0
16	1	8	4	4	3	2	2	3	0	2	0	0
17	3	6	5	6	2	2	1	0	0	1	0	0
18	4	8	3	10	2	1	2	1	0	3	3	0
19	6	9	4	8	1	0	0	1	1	2	0	0
20	11	8	6	5	0	0	2	1	1	2	1	1
21	9	8	5	2	0	0	4	0	1	2	1	1
22	10	7	4	3	2	2	2	0	0	2	0	1

23	6	5	3	4	2	1	0	0	1	1	3	2
24	5	6	4	5	2	1	0	0	1	1	2	1
25	3	9	3	6	3	2	0	2	1	0	2	0
26	4	7	1	9	4	2	3	1	1	0	2	0
27	4	4	2	5	0	1	1	0	1	0	1	0
28	3	4	2	7	0	0	2	0	1	1	0	0
29	2	0	5	4	4	1	0		0	1	0	0
30	3	0	5	3	8	1	1		0	1	0	0
31	5	0	6	0	8	0	1		2		1	
	116	174	139	189	101	59	39	39	18	42	33	12
	778						183					

Sumber: Jh. L. van Hasselt, *De Assainering van Baeo-Baeo, Hoofplaats de Onderafdeeling Boeton (Zuid-Oost Celebes)*, 1925, lamp.

Angka-angka pada tabel 4.3. menunjukkan penurunan sangat drastis penderita penyakit malaria, yakni dari 778 kasus pada 1922 menjadi hanya 183 kasus pada bulan yang sama di tahun berikutnya (1923). Penurunan ini terjadi karena dampak dari perbaikan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di bawah komando L. van Hasselt. L. van Hasselt meniru pola perbaikan lingkungan yang dilakukan Dr. Vogel untuk mengurangi malaria yang menyerang warga di kota Sibolga. Hasil dari perbaikan di kedua kota itu menunjukkan hasil yang sama, yakni berkurangnya secara signifikan penderita malaria di kedua kota, Sibolga dan Baubau.

Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada kaitan antara pemberantasan penyakit di Kota Baubau dengan pertambangan aspal yang belum lama ditemukan di Pulau Buton? Sekilas memang titik persinggungan kedua kasus ini nampak agak jauh. Akan tetapi, ketika keduanya dibingkai dengan konsep “kepentingan”, terutama kepentingan Belanda, persinggungan itu amatlah dekat.

Perbaikan kota dan pemberantasan penyakit adalah hal yang paling dibutuhkan oleh pemerintah kota yang akan menjadi pusat bisnis dalam rangka menjadi ruang pengendalian perusahaan dan eksploitasi tambang aspal. Produksi dan pertambangan aspal yang menjanjikan keuntungan ekonomi secara teoretis membutuhkan tenaga kerja ahli dari berbagai negara, khususnya Belanda, dan tempat permukiman yang sesuai bagi mereka adalah Kota Baubau. Satu-satunya kota yang representatif di Pulau Buton saat itu

adalah Kota Baubau yang sebelumnya menjadi ibukota *Afdeling* Sulawesi Timur dan pada perkembangannya juga menjadi ibukota *Afdeling* Buton dan Laiwui (Kendari). Pada titik itulah, Belanda berkepentingan menyediakan ruang kota yang bebas dari ancaman penyakit bagi warga Belanda dan Eropa untuk menjalankan birokrasi dan operasional perusahaan di Kota Baubau.

Kota Bungku dan Kolonodale adalah dua kota yang juga di dorong oleh penemuan komoditas baru, yakni nikel, bijih besi dan produk pangan berupa peternakan dan hasil laut. Komoditas mutiara, nikel, dan bijih besi yang dieksploitasi pemerintah Hindia Belanda di Bungku telah menjadi pendorong geliat ekonomi di Bungku. Demikian juga di Kolonodale, wilayah bekas Kerajaan Mori itu mengandalkan produk mutiara, teripang, kerbau, kambing dan juga biji besi yang berasal dari produk tambang. Produk-produk itu diperdagangkan dengan para pedagang Cina dan Bugis. Kolonodale juga menghasilkan kopra yang kemudian diangkut oleh kapal uap KPM dengan jadwal kedatangan sekali tiap bulannya. Perahu layar juga ikut memuat dan membeli kopra dari Kolonodale.

BAB V

PENUTUP

Rempah dan kolonialisme adalah dua entitas yang berbeda, tetapi sebagai dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan dalam proses sejarahnya. Kolonialisme salah satunya didorong oleh semangat kapitalis yang mengedepankan semangat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, apa pun caranya. Upaya hegemoni terus dilakukan oleh bangsa-bangsa lain di dunia terhadap Indonesia sebagai negara produsen rempah-rempah paling dikenal di dunia. Bangsa-bangsa dunia yang menguasai Indonesia secara sosio-kultural pada awalnya adalah yang membawa budaya Hindu-Buddha. Pada perkembangan selanjutnya, budaya Islam masuk bersamaan dengan kehadiran bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Beberapa negara seperti Cina dan Jepang pengaruhnya tampak tidak kuat, tetapi ikut aktif dalam perdagangan. Hal yang berbeda diperoleh dari Portugis, Inggris, dan Belanda yang mewariskan sistem pertahanan benteng. Benteng-benteng itu pada perkembangannya telah menjadi pusat-pusat ekonomi dan politik masyarakat sepanjang abad XVI-XVIII. Wilayah di sekitar benteng berkembang menjadi kota, khususnya di pusat-pusat perdagangan.

Berada di wilayah tropis dan *ring of fire*, Indonesia mempunyai sumber daya alam melimpah yang dibutuhkan manusia di seluruh dunia. Sumber daya itu berupa sumber daya alam dan sumber pertambangan yang berasal dari proses vulkanik. Akibatnya, Indonesia menjadi pusat produsen bahan mentah untuk memasok kebutuhan industri dan pasar di Eropa dan bahkan dunia. Indonesia atau Hindia Timur juga pada saat yang sama telah menjadi ruang pasar bagi barang-barang yang diproduksi Eropa dan Asia lainnya. Hal ini ditandai dengan kehadiran barang-barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekunder dari Eropa dan negara Asia seperti kain dari Belanda dan India, manik-manik dari Asia Barat, dan sejenisnya. Barang-barang itu didatangkan oleh kapal-kapal pedagang dan pemerintah kolonial yang datang ke Nusantara.

Pertukaran barang telah menjadi media awal terjadinya kontak yang berkembang sangat serius. Ketika upaya monopoli hingga hegemoni terus diperjuangkan oleh negara-negara seperti Belanda, Inggris, dan Portugis, terjadi gesekan yang kadang berujung konflik berkepanjangan di antara negara-negara itu. Konflik tersebut terjadi dalam bentuk persaingan dagang, perebutan komoditas, monopoli hingga berujung pada peperangan. Beberapa perang terjadi antara Belanda dengan Inggris, Belanda dengan Perancis, Belanda melawan penguasa lokal Nusantara, dan sebagainya. Konflik keras terjadi juga antara Belanda dengan Inggris ketika peristiwa perang Ambon (*Amboyna war*) atau Inggris menyebutnya dengan *Amboyna Massacre*.

Amboyna war menjadi fokus pembahasan ini karena dua hal. *Pertama*, kaitan antara rempah yang pusatnya di Kepulauan Ambon dan menjadi arena atau ruang adaptasi hingga praktik kekerasan yang melibatkan Inggris dan Belanda. *Kedua*, sebagai pusat produsen rempah, Kepulauan Maluku dan pulau-pulau di sekitarnya menjadi penerima konsekuensi paling intensif dari sisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pada tataran ini, penting melihat bagaimana situasi di pinggiran khususnya di Pantai Timur Pulau Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya. Ketika pusat mengalami gejolak, yang pertama-tama mendapat dampak adalah wilayah pinggiran karena kedekatan geografis dan akses yang lebih mudah dan cepat. . Makna lain dari kedekatan geografis adalah ruang pantau dari pinggiran pada pusat.

Sebagian dari kontribusi perdagangan komoditas apa pun adalah keuntungan ekonomi dan perbaikan infrastruktur. Ketika perdagangan tersebut melibatkan banyak orang dan komunitas dalam jangka waktu yang panjang, kebutuhan untuk mencapai keuntungan maksimal dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas sebagaimana pola ekonomi kapitalis (mengejar keuntungan sebesar-besarnya) dan infrastruktur penunjangnya disiapkan melalui investasi. Investasi pada sektor pelabuhan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas itu berdampak pula pada gerak ekonomi di sekitarnya. Sebagian di antaranya adalah aktivitas perdagangan di pasar dengan segala komoditas, perbaikan infrastruktur jalan, pembukaan perkebunan untuk menunjang kelangsungan aktivitas pelabuhan, dan pencarian atau eksplorasi komoditas baru.

Realitas di atas dapat ditemukan di sepanjang pantai timur Pulau Sulawesi. Tidak kurang dari enam kota (Luwuk, Kolonodale, Bungku, Kendari, Raha, dan Baubau) tumbuh sebagai dampak dari perdagangan intensif, tidak hanya rempah

tapi juga komoditas lain, baik di internal kawasan maupun di luar kawasan pantai timur Pulau Sulawesi. Eksplorasi dan pengembangan tanaman baru untuk kepentingan perdagangan terus dilakukan oleh masyarakat lokal sebagai inovasi untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan aktivitas perdagangan dari dan ke pantai timur Pulau Sulawesi. Sarana penunjang perdagangan seperti transportasi, peningkatan kemampuan navigasi, motorisasi dan penyediaan pelabuhan dalam berbagai bentuk terus diadakan oleh masyarakat setempat. Hal itu sejalan dengan perkembangan ekonomi.

Ragam rempah dan intensitas perdagangan dengan jelas memberi kontribusi nyata pada tumbuh dan berkembangnya kota Pelabuhan. Di antara lima kota yang tumbuh, Kendari dan Bau-Bau menjadi dua kota yang perkembangannya lebih cepat. Sejumlah kebijakan pemerintah kolonial yang menguntungkan dan perluasan infrastruktur kota termasuk pelabuhan di dua kota memberi dampak berarti bagi perkembangan kota. Baubau menjadi ibukota *Afdeling* Sulawesi Timur meski hanya seumur jagung. Begitu juga dengan Kota Kendari yang lalu ditunjuk menjadi ibukota provinsi Sulawesi Tenggara saat negara Indonesia baru merdeka.

Ramainya aktivitas ekonomi dan terintegrasinya kawasan pantai timur Pulau Sulawesi secara aktif menunjukkan kawasan itu sejajar dengan lima zona maritim yang disebut Denys Lombard. Karena itu, pantai timur Sulawesi menjadi kawasan keenam, melengkapi lima kawasan lain seperti Teluk Bengal, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Laut Jawa. Dengan tambahan itu pula buku ini melengkapi temuan Lombard tentang zona perdagangan maritim, yakni pantai timur Pulau Sulawesi atau sisi barat laut Banda.

Tampaknya zona perdagangan maritim di Nusantara tidak harus berhenti di pantai timur pulau Sulawesi, tetapi bisa melihat kawasan Pasifik yang terintegrasi dalam jaringan rempah. Oleh karena itu, tema ini harus terus mendapat perhatian dalam bentuk pendanaan untuk kebutuhan publisitas dan produksi pengetahuan sehingga menjadi *soft diplomacy* Indonesia untuk terus diakui sebagai “pemilik” di jalur rempah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abendanon, E. C. (1918). *Geologische en Geographische Doorkruisingen van Midden-Celebes 1909-1910*. (DEEL IV.). Boekhandel En Drukkerij Voorheen E. J. Brill.
- A.M. Zahari. (1990). *Darul Butuni: Sejarah dan Adatnya*. Balai Pustaka.
- Amir, A. (2020). Peranan Pedagang Melayu di Makassar Dalam Jaringan Perdagangan Rempah Nusantara Abad ke-16 dan Ke-17. In M. A. R. Effendy & A. R. Hamid (Eds.), *Rempah Nusantara Merajut Dunia* (pp. 87–102). BPCB-Ruas.
- Amirell, S. E. (2017). Pirates and pearls: Jikiri and the challenge to maritime security and American sovereignty in the Sulu Archipelago, 1907–1909. *International Journal of Maritime History*, 29(1), 44–64.
- Ammarell, G. (1999). *Bugis Navigation*. Yale University Press and Southeast Asia Studies Program.
- Andaya, L. Y. (2000). A History of Trade in the Sea of Melayu. *Itinerario*, 24(1), 87–110. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/S016511530000869X>
- Andaya, L. Y. (2004). *Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17*. Ininnawa.
- Asrawati. (2006). *Eksplorasi Hutan di Muna 1906 -1936*. Gadjah Mada.
- Bassett, D. K. (1960). The “amboyna massacre” of 1623. *Journal of Southeast Asian History*. <https://doi.org/10.1017/S0217781100000107>
- Beaujard, P. (Ed.). (2019). Southeast Asia: Era of the Merchant Sultanates. In *The Worlds of the Indian Ocean: A Global History: Volume 2: From the Seventh Century to the Fifteenth Century CE* (Vol. 2, pp. 496–514). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108341219.019>
- Berg, E. J. van den. (1954). Mededelingen uit de verslagen van Dr E.J. van den Berg; Taalambtenaar op Buton 1936-1941. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 110(2), 154–184.
- Blink, H. (1914). *Nederlandsch Oost-Indië als productie- en handelsgebied, een economisch-geographische studie van het heden en de ontwikkeling gedurende de laatste eeuw*. Mouton & Co.,.

- Bothe, A. CHR. D. (1928). De asfaltgesteenten van het eiland Boeton, hun voorkomen en economische beteekenis. *De Ingenieur; M. Mijnbouw*, 19(4), 27–45.
- Chancey, K. (1998). The Amboyna Massacre in English Politics, 1624–1632. *Albion*. <https://doi.org/10.2307/4053850>
- Clercq, F. S. A. D. (1890). *Bijdragen tot de Kennis der Residentie Ternate*. E.J. Brill.
- Cook, H. J. (2020). *The Dutch in the Early Modern World: A History of a Global Power*. David Onnekink and Gijs Rommelse. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. Xxii + 294 pp. \$29.99. *Renaissance Quarterly*. <https://doi.org/10.1017/rqx.2020.162>
- Couvreur, J. (1935a). *Etnografisch Overzicht van Moena*. Naskah ketikan tidak diterbitkan.
- Couvreur, J. (1935b). *Etnografisch Overzicht van Moena*. Naskah ketikan tidak diterbitkan.
- Crawfurd, J. F. R. S. (1820). *History of the Indian Archipelago: Containing an Account of the Manners, Arts, Languages, Religions, Intitutions, and Commerce of its Inhabitants*. United for Archibald Constable and Co.
- Darmawan, Y., & Fahimuddin, M. M. (Eds.). (2012). *Negeri Seribu Benteng; Lima Abad Dinamika di Kota Baubau*. Respect.
- Djono, D., Joebagio, H., & Abidin, N. F. (2020). Gerak Sejarah Integratif-Multidimensional: Warisan Sartono Kartodirdjo Bagi Filosofi Pendidikan Sejarah Menuju Society 5.0. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*. <https://doi.org/10.36706/jc.v9i1.10258>
- Economische Zaken, D. van. (1936). *Volkstelling 1930, Deel V, Inhemsche Bevolking van Borneo, Celebes, de Kleine Soenda Eilanden en de Molukken*. Landsdrukkerij.
- Effendy, M. A. R., & Hamid, A. R. (2020). *Rempah Nusantara Merajut Dunia*. BPCB-Ruas.
- Engelhard, H. E. D. (1884). Mededelingen over het Eiland Seleijer. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, 8(2), 264–503.
- Evers, H.-D. (1988). Traditional Trading Networks of Southeast Asia. *Archipel*, 35, 89–100.
- Findlay, R., & O'Rourke, K. H. (2001). Commodity Market Integration, 1500–2000. *Working Paper, No. 8579*, 1.
- Fong, G. Y. (2013). *Perdagangan dan Politik, Banjarmasin 1700-1747*. Lilin Press.
- Fox, J. J. (1993, November 22). *Bajau Voyages to the Timor Area, The Ashmore Reef and Australia*. International Seminar on Bajau Communities, Jakarta.

- Fraanssen, CH. F. V. (1976). Drie Plaatsnamen uit Oost-Indonesie in de Nagara-kertagama: Galiyo, Muar en Wwanin en de Vroege Handels-Geschiedenish van de Ambonse Eilanden. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde, Deel 132, 2/3de Afl.* (1976), 293–305.
- Freedman., P. (2008). *Out of the East Spices and the Medieval Imagination.* Yale University Press.
- Frijling, F. (1909, February 12). *Afbakening van hét Gebruik, te Maken van Artikel 3 der Korte Verklaring, Bijlage 7. Missive van den Wd. Directeur van L (Gouvernements renvooi van 25 d.a.v. No 28 (Gouvernements renvooi van den 25sten d.a.v. No. 28411), houdende voorstellen met betrekking tot het van Gouvernementswege in geregeld beheer en exploitatie nemen van de bosschen in het landschap Boeton van het gouvernement Celebes en Onderhoorigheden.* [Personal communication].
- Games, A. (2011). Anglo-Dutch Connections and Overseas Enterprises: A Global Perspective on Lion Gardiner's World. *Early American Studies: An Interdisciplinary Journal.* <https://doi.org/10.1353/eam.2011.0012>
- Gaynor, J. L. (2017a). Tiworo in the Seascape of the Spice Wars. *Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient, 103,* 237–256.
- Gaynor, J. L. (2017b). Tiworo in the Seascape of the Spice Wars. *Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient.* <https://doi.org/10.3406/befeo.2017.6249>
- Guanmian Xu. (2020). Junks to mare clausum: China-Maluku connections in the Spice Wars, 1607–1622. *Itinerario, 44(1),* 196–225.
- Hadara, A. (1987). *Sistem Pelayaran dan Perdagangan Masyarakat Kepulauan Wakatobi: Tinjauan Kependidikan Sejarah.* Universitas Haluoleo.
- Haeruddin. (2013). *Akhir dari Persekutuan, Aneksasi Buton dalam Pax Neerlandica 1900-1918.* Ombak.
- Haliadi. (2000). *Islam Buton dan Buton Islam: Islamisasi, Kolonialisme, dan Sinkretisasi Agama" 1873-1938.* Universitas Gadjah Mada.
- Haliadi, H., Alfian, T. I., & Kuntowijoyo. (2000). Buton Islam dan Islam Buton 1873-1938. *Sosiohumanika, 13(2),* 477–490.
- Hall, K. R. (2010). Ports-of-Trade, Maritime Diasporas, and Networks of Trade and Cultural Integration in the Bay of Bengal Region of the Indian Ocean: C. 1300-1500. *Journal of the Economic and Social History of the Orient, 53(1/2),* 109–145.
- Hall, K. R. (2011). *A history of early Southeast Asia: Maritime trade and societal development, 100–1500.* Rowman & Little Field Publishers, I N C .

- Hall, K. R. (2016). Commodity Flows, Diaspora Networking, and Contested Agency in the Eastern Indian Ocean c. 1000–1500. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 4(2), 387–417. <https://doi.org/10.1017/trn.2016.21>
- Hasselt, Jh. L. van. (1925). De Assaineering van Baeo-Baeo, Hoofdplaats van de Onderafdeeling Boeton (Zuid-Oost Celebes). In C. D. D. Langen, J. Huizinga, & S. L. Brug (Eds.), *Mededeelingen van den Dienst, der Volksgezondheid in Nederlandsch-Indië* (pp. 74–93). ANNO.
- Henley, D. (2005). *Fertility, Food and Fever: Population, Economic and Environment in North and Central Sulawesi, 1600-1930*. KITLV Press.
- Herfkens, J. W. F. (1900). *De Expeditien naar Boni 1859-1860: Vol. II*. Militaire Academie.
- Hilmar, F. (2020). Dekolonisasi Jalur Rempah Demi Memajukan Kebudayaan Nasional. In M. A. R. Effendy & A. R. Hamid (Eds.), *Rempah Nusantara Merajut Dunia* (pp. 1–16). BPCB-Ruas.
- Hussin, N. (2011). *Perdagangan dan Peradaban di Laut Melayu*. UKM Press.
- Iskandar, M. (2005). Nusantara dalam era niaga sebelum abad ke-19. *Wacana*, 7(2), 175–190.
- Ismail, M. G. (1991). *Seuneubok lada, uleëbalang dan kumpeni: Perkembangan sosial ekonomi di daerah batas: Aceh Timur, 1840-1942*. Rijksuniversiteit te Leiden.
- Kartodirdjo, S. (1992a). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia.
- Kartodirdjo, S. (1992b). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imporium* (1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Kielstra, E. B. (1908). Het sultanaat van Boeton. *Onze Eeuw, Maandschrift voor Staatkunde, Letteren, Wetenschap En Kunst*, 4, 452–472.
- Kliff, H. van der. (1933). De ontwikkeling van het Zendingswerk op Z. O. Celebes. *Tijdschrift voor Zendingswetenschap "Mededeelingen," 77ste Jaargang*, 161–177.
- Kliff—Snijder, A. G. en H. V. D. (1920). *La Matoengga*. Nederlandsche Zendingsvereeniging.
- Knaap, G., & Sutherland, H. (2004). *Monsoon Traders: Ships, Skippers and Commodities in Eighteenth-century Makassar*. KITLV Press.
- Knapp, G. J. (1992). *Crisis and Failure: War and Revolt in the Ambon Islands, 1636 - 1637*. <http://hdl.handle.net/10125/4124>
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah* (I). Bentang.
- Lailatussyukriyah, L. L., & Hartutik, H. (2017). Perkembangan dan Kemunduran Perdagangan Lada di Aceh Abad 19. *SEUNEUBOK LADA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, 4(1), 69–89.

- Landbouw, D. van. (1910). *Jaarboek van het Departement van Landbouw in Nederlandsch-Indië 1909*. Landsdrukkerij.
- Landbouw, D. van. (1913). *Jaarboek van Het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel in Nederlandsch-Indië*. Landsdrukkerij.
- Lapian, A. B. (2003). Laut Sulawesi: The Celebes Sea, from Center to Peripheries. *Moussons*, 7, 3–16. <https://doi.org/10.4000/moussons.2445>
- Lapian, A. B. (2011). *Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi*. Komunitas Bambu.
- Leonard Y. Andaya. (2004). *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*. Innawa.
- Leonard Y. Andaya. (2015). *Dunia Maluku, Indonesia Timur Pada Zaman Modern Awal*. Ombak.
- Ligtvoet, A. (1878). Beschrijving en Geschiedenish van Boeton. *BKI*, I, 1-.
- Lindblad. (1989). Economic Aspects of the Dutch Expansion in Indonesia, 1870-1914. *Modern Asian Studies*, Vol. 23(No. 1), 1–24.
- Lindblad, J. T. (2002). The late colonial state and economic expansion, 1900–1930s. In H. W. Dick, V. J. H. Houben, J. T. Lindblad, & T. K. Wie (Eds.), *The emergence of a national economy: An economic history of Indonesia, 1800–2000* (pp. 111–152). Hawai'i University Press.
- Mahid, S., Sadi, H., & Darsono, W. (2012a). *Sejarah Kerajaan Bungku*. Ombak.
- Mahid, S., Sadi, H., & Darsono, W. (2012b). *Sejarah Kerajaan Bungku*. Ombak.
- Mansyur, S. (2011). Jejak Tata Niaga Rempah-Rempah dalam jaringan Perdagangan Masa Kolonial di Maluku. *Kapata Arkeologi*, t(13), 20–39.
- Mansyur, S. P., Mursalin, M., & Wisnu, S. (2019). *Sahang Banjar: Banjarmasin Dalam Jalur Perdagangan Rempah Lada Dunia Abad 18*.
- Milton, G. (2015). *Pulau Run: Magnet Rempah-rempah Nusantara*. Pustaka Alvabet.
- Nagel, J. G. (2018). Changing connectivity in a world of small islands: The role of Makassar (Sulawesi) as a hub under Dutch hegemony. In *In Connectivity in Motion: Island Hubs in the Indian Ocean World* (pp. 397–420). Palgrave Macmillan.
- Nijverheid en Handel, C. K. voor de S. van het D. van L. (1941). *Indisch Verslag 1941*. Statistisch Jaaroverzicht Van Nederlandsch – Indië Over Het Jaar 1940.
- Noor, Y., & Sayyidati, R. (2020). Tionghoa Muslim dan Dunia Perdagangan di Banjarmasin Abad ke-13 hingga ke-19. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 182–194.
- Oostindie, G., & Paasman, B. (1998). Dutch Attitudes Towards Colonial

- Empires, Indigenous Cultures, and Slaves. *Eighteenth-Century Studies*.
<https://doi.org/10.1353/ecs.1998.0021>
- Pattikayhatu, J. A. (2012). Bandar Niaga di Perairan Maluku dan Perdagangan Rempah-Rempah. *Kapata Arkeologi*, 8(1), 1–8.
- Phaff, J. M. (1922). Kustbeschrijving van den Oost-Indischen Archipel. In V. der Stock (Ed.), *De Zeeën Van Nederlandsch Oost-Indië* (pp. 359–394). E.J. Brill.
- Poelinggomang, E. L. (2002a). *Makassar Abad XIX, Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Poelinggomang, E. L. (2002b). *Makassar Abad XIX, Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Poelinggomang, E. L. (2008). *Kerajaan Mori, Sejarah Sulawesi Tengah*. Komunitas Bambu.
- Poeze, H. A., & Schoorl, P. (1991). *Excurcies in Celebes*. KITLV Press.
- Prince, G. (2000). Kebijakan Ekonomi di Indonesia 1900-1942. In T. J. Lindblad (Ed.), *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*. LP3ES.
- Rabani, L. O. (2005). *Dari Kota Buton ke Kota Bau-Bau: Studi tentang Perubahan Nama Kota 1930-1960*. Kerjasama LIPI-NIOD.
- Rabani, L. O. (2010a). *Kota Kota Pantai di Sulawesi Tenggara*. Ombak.
- Rabani, L. O. (2010b). *Kota Kota Pantai di Sulawesi Tenggara*. Ombak.
- Rabani, L. O. (2011). Menafsir Ulang Hikayat Sipanjonga Sebagai Sumber Sejarah Buton, Konsekuensi Historiografis dan Analisisnya. In M. M. Fahimuddin (Ed.), *Menafsir Ulang Sejarah dan Budaya Buton* (pp. 1–15). Respect.
- Rabani, L. O. (2016a). Penyelundupan dan Terbentuknya Kawasan Ekonomi Maritim Wakatobi Tahun 1980-an. *Lembaran Sejarah*, 12(2), 132–143.
- Rabani, L. O. (2016b, November 3). Perdagangan Maritim di Pantai Timur Sulawesi Timur pada awal Abad XX. *Makalah Konferensi Nasional Sejarah XX Sub Tema Perdagangan Maritim*. Konferensi Nasional Sejarah XX, Jakarta.
- Rabani, L. O. (2017). *Porambanga, Sabangka, Sarope dalam Masyarakat Wakatobi*. Direktorat Sejarah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rabani, L. O. (2019). Commercial activities and development of the towns in the west side of Banda Sea Indonesia, early twentieth century. In *Urban Studies: Border and Mobility* (pp. 47–52). Routledge.
- Rabani, L. O. (2020). Efek Rempah Dan Perkembangan Kota-Kota Pelabuhan Pada Medio Abad XX. In M. A. R. Effendy & A. R. Hamid (Eds.), *Rempah Nusantara Merajut Dunia* (pp. 295–306). BPCB-Ruas.

- Rabani, L. O. (2021). *Hegemoni dan Integrasi: Tumbuhnya Pusat-Pusat Ekonomi Baru 1890s–1940an*. Gadjah Mada.
- Rijneveld, J. C. van. (1840). *Celebes of Veldtoegt Der Nederlander op het Eiland Celebes in de Jaaren 1824 en 1825*. Breda, BROESE & COMP. <http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKIT03:000157402:pdf>
- Robinson, K. M. (1986a). *Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town*. State University of New York Press.
- Robinson, K. M. (1986b). *Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town*. State University of New York Press.
- Roderich, P. (1992). The northern trade route to the spice islands: South China Sea-Sulu Zone-North Moluccas (14th to early 16th century). *Archipel*, 43(43), 27–56. <https://doi.org/10.3406/arch.1992.2804>
- Rosdin, A. (2015). *Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat Buton: Kajian Filologi dan Sosiologi Sastra serta Suntingan Teks dan Terjemahan terhadap Naskah Ka□anti Ajonga Yinda Malusa*. Universitas Gadjah Mada.
- Rutten, L. M. R. (1932). *De Geologie van Nederlandsch Indie*. N.V. Boek-en Uitgevers-Mij v/h-W.P. van Stockum & Zoon.
- Sartono Kartodirdjo. (1982). Melihat Sejarah dari Segi Baru. In *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. LP3ES.
- Sartono Kartodirdjo. (1993). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Gramedia Pustaka Utama.
- Schoorl, J. W. (1991a). Het “Eeuwige” verbond tussen Buton en de VOC, 1613-1667. In H. A. Poeze (Ed.), *Excursies in Celebes: En Bundel Bijdragen bij het afscheid van J.Noorduyn als directeursecretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde* (pp. 21–61). KITLV Press.
- Schoorl, J. W. (1991b). Het “Eeuwige” Verbond tussen Buton en de VOC, 1613-1667. In H. A. Poeze (Ed.), *Excursies in Celebes: En Bundel Bijdragen bij het afscheid van J.Noorduyn als directeursecretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde* (pp. 21–61). KITLV Press.
- Schoorl, J. W. (1994). Power, Ideology and Change in the early state of Buton. In G. J. Schutte (Ed.), *State and Trade in the Indonesian Archipelago* (pp. 17–59). KITLV Press.
- Schoorl, P. (1991). *Excursies in Celebes: En Bundel Bijdragen bij het afscheid van J.Noorduyn als directeursecretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde* (H. A. Poeze, Ed.). KITLV Press.

- Schoorl, P. (2003a). *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton*. Djambatan.
- Schoorl, P. (2003b). *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton*. Djambatan.
- Sharangi, A. B. (2018). *Indian Spices*. Springer International Publishing.
- Sheriff, A., & Currey, J. (1987). *Slaves, Spices & Ivory in Zanzibar; Integration of an East African Commercial Empire into the World Economy, 1770-1873*. Ohio University Press.
- Shouton, M. (1995). *The Navel of the Prah: Meaning and Value in the Maritime Trading Economic of a Butonese, Village*. Australia National University.
- Siringoringo, R. A. (2017). *Perdagangan Rempah-Rempah Pada Masa Kolonial Belanda Di Nusantara (1602-1789)*. Negeri Medan (Unimed).
- Soedewo, E. (2007). Lada Si Emas Panas: Dampaknya bagi Kesultanan Aceh dan Kesultanan Banten. *Jurnal Universitas Sumatera Utara*. Medan.
- Staden ten Brink, P. B. van. (1884). *Zuid-Celebes; bijdragen tot de krijgsgeschiedenis en militaire geographie aan de Zuidelijke landtong van het eiland Celebes, ten dienste van officieren der land- en zeemagt*. Koninklijk Instituut voor de Tropen. <https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKIT03%3A000157403%3A00001&query=De+Bonische+Expeditien&coll=boeken>
- Stapel, F. W. (1922a). *Het Bongaais verdrag*. Wolters. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB21:030983000>
- Stapel, F. W. (1922b). *Het Bongais Verdrag*. Rijksuniversiteit.
- Stark, K. (1996). The Response of Early Ambonese Foragers to the Maluku Spice Trade: The Archaeological Evidence. *Cakalele*, 7, 51–67.
- Steevensz, Aug. (1928). De asphaltgesteenten van het eiland Boeton, hun voorkomen en economische beteekenis. *De Ingenieur*, 43(9), 77–78.
- Sulistiyono, S. T. (1994). *Perkembangan Pelabuhan Cirebon dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon 1859-1930*. Universitas Gadjah Mada.
- Sulistiyono, S. T. (2003). *The Java Sea Network: Patterns in The Development of Interregional Shipping and Trade in the Process of National Economic Integration in Indonesia, 1870s-1970s*. Leiden University.
- Sulistiyono, S. T. (2006). The Expulsion of KPM and its Impact on the Inter-island Shipping and Trade in Indonesia, 1957–1964. *Itinerario, Volume 30*(Issue 02), 104–128. <https://doi.org/doi.org/10.1017/S016511530001398X>
- Susilowati, E. (2009). “Modernisasi Pelabuhan Banjarmasin dan Pengaruhnya Terhadap Aktivitas Pelayaran dan Perdagangan pada Pertengahan Kedua Abad ke-20.” In *Bondan Kanumayoso, dkk. (Ed.), Kembara Bahari, Esei Kehormatan 80 Tahun Adrian B. Lopian*,. Komunitas Bambu.

- Sutherland, H., & Nas, P. J. M. (1985). Eastern Emporium and Company Town: Trade and Society in Eighteenth Century Makassar. In *The Indonesian City: Studies in Urban Development and Planning*. Foris Publication.
- Swantoro, P. (2019). *Perdagangan Lada Abad XVII*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Taalami, L. O. (2012). *Hikayat Negeri Buton, Analisis Jalinan Fakta dan Fiksi dalam Struktur Hikayat dan Fungsi Serta Edisi Teks*. Universitas Padjajaran.
- Taalami, L. O., Sumiman, U., & Rabani, L. O. (2015). *Historiografi Benteng-Benteng di Wakatobi* [Laporan Penelitian].
- Touwen, J. (1997a). *Extremes in the Archipelago: Trade and Economic Development in the Outer Island of Indonesia, 1900-1942*. Rijkuniversiteit.
- Touwen, J. (1997b). "Extremes in the Archipelago: Trade and Economic Development in the Outer Island of Indonesia, 1900-1942". Rijkuniversiteit.
- Udu, S. (2012). Membedah Benteng di Wakatobi. In *Negeri Seribu Benteng; Lima Abad Dinamika di Kota Baubau* (pp. 133–146). Respect.
- Uhlenbeck, O. A. (1861). De Tomori-Expeditie in 1856. In *Mededelingen Betreffende het Zeewezen: Vol. Eerste Deel* (pp. 49–115). 's-Gravenhage, De Zorg van het Departement van Marine.
- Ulaen, A. J. (2020). Kota Pelabuhan di Pesisir Utara Sulawesi dalam Lintasan Jalur Rempah-Ternate. In M. A. R. Effendy & A. R. Hamid (Eds.), *Rempah Nusantara Merajut Dunia* (pp. 129–140). BPCB-Ruas.
- Velthoen, E. (2002). *Contested Coastlines: Diasporas, Trade and Colonial Expansion in Eastern Sulawesi 1680-1905*. Murdoch University.
- Velthoen, E. J. (1997). Wanderers, Robbers, and Bad Folk: The Politics of Violence, Protection and Trade in Eastern Sulawesi 1750-1850. In A. Reid (Ed.), *The Last Stand of Asian Autonomies: Responses to Modernity in the Diverse States of Southeast Asia and Korea, 1750-1900* (pp. 367–388). St. Martins Press.
- Velthoen, E. J. (2005, March). Sailing in dangerous waters: Piracy and raiding in historical context. *IIAS News Letter*, # 3 6, 8.
- Velthoen, E. J. (2010). Pirates in Periphery: Eastern Sulawesi 1905. In J. Kleinen & M. Osseweijer (Eds.), *Pirates, Ports, and Coasts in Asia, Historical and Contemporary Perspectives* (pp. 200–221). ISEAS.
- Vosmaer, J. N. (1839). Korte beschrijving van het Zuid-Oostelijk-Schiereiland van Celebes. *Verhandelingen van Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten En Wetenschappen*, 17.
- Vuuren, L. van. (1920). *Het gouvernement Celebes: Proeve eener monographie* (Vol. 1). Hoofd Encyclopaedisch-Bureau.

- Warren, J. F. (2007). *The Sulu Zone 1768-1898: The Dynamics of External Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State* (2nd ed.). NUS Press. <https://b-ok.asia/book/5524829/f5359f>
- We Koh, K. (2013). History without Borders: The Making of an Asian World Region, 1000–1800 by Geoffrey C. Gunn. *Journal of World History*. <https://doi.org/10.1353/jwh.2013.0079>
- Weber, M. (1977). Apakah Yang Disebut Kota. In S. Kartodirdjo (Ed.), *Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial* (pp. 11–42). Bharatara Karya Aksara.
- Xu, G. (2020). Junks to Mare Clausum: China-Maluku Connections in the Spice Wars, 1607-1622. In *Itinerario*. <https://doi.org/10.1017/S016511531900055X>
- Yunus, A. R. (1995). *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton pada Abad ke-19*. INIS XXIV.
- Zahari, A. M. (1977a). *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton): Vol. I*. Depdikbud.
- Zahari, A. M. (1977b). *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (Buton): Vol. II*. Depdikbud.
- Zuhdi, S. (1998a). Perairan Buton Abad ke-19. In *Dalam Cristian Pelras (Peny.), Dialog Prancis-Nusantara, Aneka Ragam Pendekatan Dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya Tentang Asia Tenggara Maritim*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhdi, S. (1998b). Perairan Buton Abad ke-19. In *Dalam Cristian Pelras (Peny.), Dialog Prancis-Nusantara, Aneka Ragam Pendekatan Dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya Tentang Asia Tenggara Maritim*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhdi, S. (1999a). *Labu Rope Labu Wana, Sejarah Butun Abad XVII – XVIII*. Universitas Indonesia.
- Zuhdi, S. (1999b). *Labu Rope Labu Wana, Sejarah Butun Abad XVII – XVIII*. Universitas Indonesia.
- Zuhdi, S. (2010a). *Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana*. Rajawali Press.
- Zuhdi, S. (2010b). *Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana*. Rajawali Press.
- Zuhdi, S. (2014). *Nasionalisme, Laut dan Sejarah*. Komunitas Bambu.
- Zuhdi, S. (2018). *Sejarah Buton yang Terabaikan; Labu Rope Labu Wana* (Edisi Revisi). Wedatama Widyasastra.
- Zuhdi, S. (2020). Jalur Pelayaran dan Perdagangan Rempah di Sulawesi Tenggara

- Dalam Abad Ke-17 dan Ke-18. In M. A. R. Effendy & A. R. Hamid (Eds.), *Rempah Nusantara Merajut Dunia* (pp. 17–36). BPCB-Ruas.
- Zuhdi, S., Ohorella, G. A., & Said, D. (1996a). *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*. Depdikbud.
- Zuhdi, S., Ohorella, G. A., & Said, D. (1996b). *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*. Depdikbud.
- Zuhdi, S., Ohorella, G. A., & Said, D. (1996c). *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*. Depdikbud.
- Zuhdi, S., Ohorella, G.A., Said, D. (1996). *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*. Depdikbud.

Buku ini membahas tentang rempah, kolonialisme, dan kesinambungan ekonomi di Pantai Timur Sulawesi. Pantai timur yang dimaksud meliputi sebagian daratan dan wilayah pantai timur Pulau Sulawesi seperti sebagian wilayah Sulawesi Tengah dan sebagian Sulawesi Tenggara, termasuk pulau-pulau di sekitarnya seperti Pulau Buton, Muna, Kepulauan Menui, Salabangka, dan Siompu. Pulau-pulau itu ditempatkan dalam konteks pendukung aktivitas ekonomi di sepanjang jalur rempah di pantai timur Pulau Sulawesi. Paradigma integrasi positif yang diperkenalkan oleh Prof. Sartono Kartodirjo membantu kita memahami bahwa tidak selamanya kolonialisme membawa dampak buruk. Masyarakat bisa belajar dari perjumpaan dengan berbagai pihak dan dapat mengambil sisi positif dari perjumpaan itu. Dalam konteks pantai timur Pulau Sulawesi, pelabuhan dibangun, perkapalan dan pelayaran selalu menggunakan pelabuhan, komoditas lokal diangkut, dieksplorasi, dieksploitasi, diteliti, dan dibudidayakan. Komoditas baru ditanam dan diperluas area nya, transportasi lokal ikut memasok komoditas ke perkapalan Eropa, dan sebagainya. Pada saat yang sama, fasilitas pelabuhan diperbaiki, kota dibangun dengan konsep kota sehat, dan pemberantasan penyakit menular digalakkan. Dengan fakta-fakta itu, anggapan bahwa semua yang dilakukan tidak terlepas dari kepentingan penjajah, secara tidak langsung tidak selamanya benar. Keikutsertaan masyarakat lokal dalam arus mata rantai ekonomi global menjadikan mereka secara historis menjadi bagian dari sejarah kawasan yang menjadi salah satu pusat baru ekonomi yang aktif dalam jangka panjang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

ISBN 978-602-244-918-8 (PDF)

